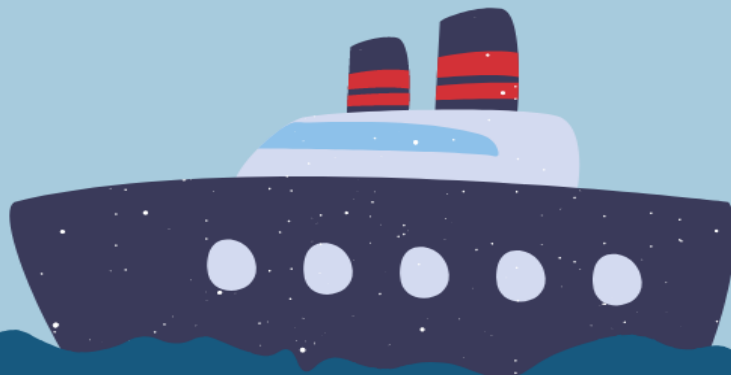




**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2025



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Semarang, 12 September 2024
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650117 199010 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses dan tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 juga disusun dengan memperhatikan evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Jawa Tengah tahun 2025 akan fokus pada pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan didukung daya saing sumber daya manusia. Renja 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan diselaraskan dengan Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, RPD Tahun 2024-2026, RENSTRA Tahun 2024-2026, RPJMN 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 - Kepmendagri 050-3708.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dengan Tema **“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter”** diarahkan pada :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025;
2. Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Gambar 1.2

Hubungan Rencana Kerja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 46);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 60);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 87);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 21).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program maupun anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, adalah :

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran program kegiatan Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan Dinas berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022;
- b. Merumuskan rencana program dan kegiatan prioritas Dinas beserta indikasi, pagu anggaran dan target indikator kinerja Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
- 4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB V P E N U T U P

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD

Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam Renstra tahun 2018-2023. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis meliputi :

1. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, indikator sasaran : produksi perikanan (ton/tahun), tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun) dan produksi garam (ton/tahun), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi);
2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan indikator sasaran : Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan (%);
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah indikator sasaran : Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka);
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah indikator sasaran : Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka).

Tolak ukur capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu :

1. Produksi perikanan (ton/tahun),
2. Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)
3. Produksi garam (ton/tahun),
4. Nilai Tukar Nelayan (NTN),
5. Nilai Tukar Pembudidaya (NTP).

Tolak ukur capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan (%).

Tolak ukur capaian Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka).

Tolak ukur capaian Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka).

Pada tahun 2021 merupakan tahun transisi mulai berlakunya Permendagri No 90 Tahun 2019 sehingga terdapat perubahan nomenklatur program dan/atau kegiatan. Tahun 2022 program Dinas kelautan dan Perikanan melaksanakan 6 Program dan 95 kegiatan. Berikut perubahan nomenklatur program prioritas tersebut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Jawa Tengah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	Urusan Pilihan										
	Urusan Kelautan dan Perikanan										
		Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sub Sektor Perikanan	%	1,5	1,4	1,5	1,5	100	n/a	n/a	n/a
		Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	81	84,25	81	87	107,41	n/a	n/a	n/a
		Produksi Perikanan	Ton	1.023.928,09	866.372,65	1.023.928,09	855.734,92	83,57	927.350	927.350	100
		Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita /Tahun	37,07	37,25	37,07	38,83	104,75	40,12	40,12	100
		Produksi Garam	Ton	207.505,12	135.792,09	207.505,12	595.984,41	287,21	133.320	133.320	100
		Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100
		Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	101,19	101,19	100
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	108	104,86	n/a	n/a	n/a	105	105	100
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Angka	101	109,95	n/a	n/a	n/a	110	110	100
		Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,75	0,75	100
		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	82	82	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN										

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
	TANGKAP										
		Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,1	0,04	0,1	-	-	n/a	n/a	n/a
		Persentase produksi perikanan tangkap	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100
		Indeks harga yang diterima oleh nelayan	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	108,27	108,27	100
		Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	44,44	44,44	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	%	100	90	100	100	100	72	72	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	%	100	90	100	100	100	72,72	72,72	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	%	81,82	90,91	81,82	90,91	111,11	81,82	81,82	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor	%	100	90,91	100	100	100	70	70	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	81,82	72,73	81,82	81,82	100	62,62	62,62	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	%	100	90,91	100	100	100	81	81	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	100	90,91	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	100	90,91	100	100	100	100	100	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	%	63,64	63,64	63,64	63,64	100	63,63	63,63	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Logending	%	100	90,91	100	100	100	63	63	100
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	%	100	100	100	100	100	72	72	100
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil										
		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	502.823,78	333.361,47	502.823,78	320.586,61	63,76	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Nelayan yang memperoleh perlindungan	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10.100	10.100	100
		Jumlah pelabuhan yang menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Jumlah produksi perikanan yang didaratkan	Ton	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	327.350	327.350	100
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan										

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
	Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan tangkap	Dokumen	150	519	150	452	300	n/a	n/a	n/a
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi										
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	Jenis	11	11	11	11	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	%	50	45	50	100	200	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Asemdayong Kelas B)	Jenis	11	9	11	8	72,73	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Wonokerto Kelas B)	%	40	85,45	40	85,45	213,63	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan	%	50	45	50	50	100	n/a	n/a	n/a

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		(UPT PPP Klidanglor Kelas A)									
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Tawang Kelas B)	%	40	36	40	40	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Morodemak Kelas A)	%	50	45	50	50	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)	Jenis	11	11	11	11	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Tasikagung Kelas A)	Jenis	11	10	11	10	90,91	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Karimunjawa Kelas B)	%	40	36	40	40	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Lohgending Kelas A)	%	50	45	50	50	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan	%	40	36	40	40	100	n/a	n/a	n/a

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Perikanan yang dilaksanakan (UPT PPP Larangan Kelas B)									
		Jumlah Pelayanan Kepelabuhanan (UPT PPP Larangan Kelas B)	Jenis	11	10	11	11	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Tegalsari Kelas A	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9	9	100
		Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan PPP Tegalsari Kelas A	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	7	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Tegalsari Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	16	16	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Tegalsari Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60	60	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Tegalsari Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85	85	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Tegalsari Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	15	15	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Asemdayong Kelas B	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100
		Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan PPP	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Asemdayong Kelas B									
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Asemdayong Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14	14	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Asemdayong Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	20	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Wonokerto Kelas B	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	7	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Wonokerto Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14	14	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Wonokerto Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	39	39	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Wonokerto Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Wonokerto Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9	9	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Klidanglor Kelas A	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9	9	100
		Jumlah fungsi perusahaan	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	6	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		yang dilaksanakan PPP Klidanglor Kelas A									
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Klidanglor Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Klidanglor Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	50	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Klidanglor Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Klidanglor Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Tawang Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18	18	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Tawang Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	6	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Tawang Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	46	46	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	20	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Tawang Kelas B									
		Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan PPP Tawang Kelas B	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	6	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Tawang Kelas B	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	6	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Morodemak Kelas A	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	6	100
		Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan PPP Morodemak Kelas A	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	4	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Morodemak Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	42	42	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Morodemak Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	55	55	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Morodemak Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	7	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Bajomulyo Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	6	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	85	85	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		PPP Bajomulyo Kelas A									
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Bajomulyo Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	65	65	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Bajomulyo Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	29	29	100
		Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan PPP Bajomulyo Kelas A	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	7	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Bajomulyo Kelas A	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	9	9	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Tasikagung Kelas A	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6	6	100
		Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan PPP Tasikagung Kelas A	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Tasikagung Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	42,86	42,86	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Tasikagung Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Tasikagung Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25	25	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Tasikagung Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,7	3,7	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Karimunjawa Kelas B	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100
		Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan PPP Karimunjawa Kelas B	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Karimunjawa Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	40	40	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Karimunjawa Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	50	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Karimunjawa Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	50	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Karimunjawa Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	65	65	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Lohgending Kelas A	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50	50	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		PPP Lohgending Kelas A									
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Lohgending Kelas A	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	7	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Lohgending Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	54	54	100
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan PPP Larangan Kelas B	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan PPP Larangan Kelas B	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan PPP Larangan Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	20	100
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik PPP Larangan Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	40	40	100
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi PPP Larangan Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	7	7	100
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya PPP Larangan Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30	30	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN										

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
	BUDIDAYA										
		Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase peningkatan produksi benih	%	25	2,5	25	25	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya	%	0,2	0,2	0,2	0,4	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase produksi ikan konsumsi air laut	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100
		Produksi perikanan budidaya	Ton	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	600.000	600.000	100
		Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	111,27	111,27	100
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		Jumlah usaha pembudidaya ikan yang diterbitkan layanan rekomendasi perizinannya	Unit	3	3	3	26	300	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Ijin Usaha	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	381	381	100
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut										
		Jumlah Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan (BLPKIL	Kasus	300	270	300	300	100	n/a	n/a	n/a

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Kelas A)									
		Persentase peningkatan pengguna layanan pengujian mutu (BLPKIL Kelas A)	%	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Calon Induk Ikan (Tawar dan Payau) (BBIAPL Kelas A)	%	60	61	60	60	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase peningkatan kelulus hidupan (SR) Benih dan Ikan Konsumsi (Laut) (BBIAPL Kelas A)	%	40	43	40	-	-	n/a	n/a	n/a
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	521.104,31	533.011,18	521.104,31	535.148,31	102,7	n/a	n/a	n/a
		Persentase Pengguna Layanan Pengujian	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	20	100
		Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkatkan Kompetensinya	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	29	29	100
		Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani	Kasus	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	350	350	100
		Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Lokasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100
		Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100
		Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	2	100
		Jumlah Pembudidaya Ikan	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60	60	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		yang Meningkat Keterampilannya									
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL										
		Persentase peningkatan produksi garam	%	25	0,05	25	37,99	151,96	n/a	n/a	n/a
		Persentase produksi garam	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir	%	30	5	30	30	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	17,6	2,5	17,6	17,6	100	5	5	100
		Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat)	%	25	1	25	38,63	154,52	n/a	n/a	n/a
		Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Barat)	%	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan)	%	25	1	25	38,99	155,96	n/a	n/a	n/a
		Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Selatan)	%	1	1	1	1,08	108	n/a	n/a	n/a
		Persentase Peningkatan Luas	%	25	0,57	25	30,43	121,72	n/a	n/a	n/a

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur)									
		Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Timur)	%	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,7	3,7	100
		Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1,39	1,39	100
		Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,7	3,7	100
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil										
		Jumlah KUGAR terakses sarana prasarana peningkatan produksi garam	Kelompok	5	5	5	12	240	n/a	n/a	100
		Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang berkembang skala usaha nya	Kelompok	2	2	2	3	150	n/a	n/a	100
		Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya	Kelompok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumah KUGAR yang meningkat kompetensinya	Kelompok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25	25	100
		Jumlah sentra garam rakyat yang didata potensinya	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100
		Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Kelompok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	4	100
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										
		Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	Lokasi	1	1	1	1	100	n/a	n/a	100
		Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (CDK Wilayah Barat)	Ha	3	3	3	3	100	n/a	n/a	100
		Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (CDK Wilayah Timur)	Ha	2	2	2	3,95	197,5	n/a	n/a	100
		Jumlah wilayah pesisir yang terehabilitasi (CDK Wilayah Selatan)	Ha	2	2	2	2	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Lokasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100
		Jumlah pelaku usaha yang diverifikasi persyaratan KKPRL	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100
		Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi CDK Wilayah Barat	Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	2	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola CDK Wilayah Barat	Lokasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	2	100
		Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi CDK Wilayah Selatan	Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	2	100
		Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi CDK Wilayah Timur	Ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	2	100
		Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola CDK Wilayah Timur	Lokasi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	2	100
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi										
		Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (CDK Wilayah Barat)	Dokumen	3	3	3	3	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (CDK Wilayah Timur)	Dokumen	12	12	12	12	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah rekomendasi dokumen perijinan yang dikeluarkan (CDK Wilayah Selatan)	Dokumen	12	12	12	13	108,33	n/a	n/a	n/a
		Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu CDK Wilayah Barat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu CDK Wilayah Selatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu CDK Wilayah Timur	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										
		Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku di sektor perikanan	%	72	71	72	72	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp	%	45	40	45	45	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah	%	2	2	2	2	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur	%	2	2	2	1	200	n/a	n/a	n/a

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jawa Tengah									
		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah	%	2	2	2	2	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	70	70	100
		Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	2	100
		Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	61	61	100
		Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	2	100
		Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	61	61	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	2	100
		Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	61	61	100
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil										
		Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan sampai dengan 12 mil	Kasus	250	77	250	271	108,4	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya	Kelompok	45	60	45	45	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (CDK Wilayah Barat)	Kasus	4	5	4	4	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (CDK Wilayah Timur)	Kasus	4	5	4	4	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah pelanggaran sektor	Kasus	4	5	4	4	100	n/a	n/a	n/a

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil (CDK Wilayah Selatan)									
		Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	18	18	100
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kelompok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	35	35	100
		Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil CDK Wilayah Barat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan CDK Wilayah Barat	Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	10	100
		Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil CDK Wilayah Selatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan CDK Wilayah Selatan	Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	10	100
		Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil CDK Wilayah Timur	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan CDK Wilayah Timur	Kali	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	10	10	100
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		Jumlah penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan di perairan umum daratan	Kasus	40	20	40	54	135	n/a	n/a	n/a
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Kasus	4	5	4	4	100	n/a	n/a	n/a

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		(CDK Wilayah Barat)									
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (CDK Wilayah Timur)	Kasus	4	5	4	4	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (CDK Wilayah Selatan)	Kasus	4	5	4	4	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	180	180	180

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		perundangan sektor KP									
		Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya CDK Wilayah Barat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya CDK Wilayah Selatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya CDK Wilayah Timur									
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN										
		Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu	%	5	2	5	37,61	752,2	n/a	n/a	n/a
		Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan	%	50	7,12	50	72,9	145,8	n/a	n/a	n/a
		Jumlah produksi olahan ikan	Ton	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	160.000	160.000	100
		Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4	4	100
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		Jumlah Unit Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Unit	6.550	8.064	6.550	9.524	145,4	n/a	n/a	n/a
		Jumlah rekomendasi ijin usaha pengolah dan pemasar	Dokumen	3	4	3	9	300	n/a	n/a	n/a
		Persentase Unit Pengolahan Ikan yang terdata	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20	20	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar										
		Jumlah Produksi Hasil Olahan Ikan	Ton	55.000	48.776	55.000	78.399,21	142,54	n/a	n/a	n/a
		Jumlah reakreditasi ISO (BPMHP Kelas A)	Dokumen	1	3	1	2	200	n/a	n/a	n/a
		Jumlah Usaha Kelautan dan Perikanan yang dipromosikan	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	35	35	100
		Jumlah jenis pelatihan peningkatan keterampilan dan kompetensi	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	2	100
		Jumlah Poklahsar yang Meningkat Usahanya	Kelompok	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	100
		Jumlah Rekomendasi sertifikat Good Manufacturing Product (GMP) yang diterbitkan	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Jumlah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	100
		Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	400	400	100
	PROGRAM PENUNJANG										

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	2	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Tegalsari Kelas A)	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Asemdayong Kelas B)	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Wonokerto Kelas B)	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Klidanglor Kelas A)	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Tawang Kelas B)	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Perangkat Daerah (PPP Morodemak Kelas A)									
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Bajomulyo Kelas A)	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Tasikagung Kelas A)	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Karimunjawa Kelas B)	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Lohgending Kelas A)	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BLPKIL Kelas A)	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BBIAPL Kelas A)	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Larangan Kelas B)	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A)									
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A)	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A)	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPMHP Kelas A)	%	100	100	100	100	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Tegalsari Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		PPP Asemdayong Kelas B									
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Wonokerto Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Klidanglor Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Tawang Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Morodemak Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Bajomulyo Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Tasikagung Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Karimunjava Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		keuangan perangkat daerah PPP Lohgending Kelas A									
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BLPKIL Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BBIAPL Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah PPP Larangan Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK Wilayah Barat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK Wilayah Selatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK Wilayah Timur	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPMHP Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	Perencanaan,										

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	2	2	2	1	50	n/a	n/a	n/a
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	0	0	n/a	n/a	n/a
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	0	0	n/a	n/a	n/a
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jenis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
	Administrasi										

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
	Kepegawaian Perangkat Daerah										
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	0	0	n/a	n/a	n/a
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	0	0	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Asemdayong Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Wonokerto Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Klidanglor Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Tawang Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Morodemak Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Tasikagung Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Karimunjawa Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Lohgending Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT BLPKIL Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT BBIAPL Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		administrasi umum Perangkat Daerah (UPT PPP Larangan Kelas B)									
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (CDK Wilayah Selatan Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (CDK Wilayah Barat Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (CDK Wilayah Timur Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (UPT BPMHP Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Tegalsari Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Asemdayong Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Wonokerto Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Klidanglor Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Tawang Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Morodemak Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Bajomulyo Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Tasikagung Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		layanan PPP Karimunjawa Kelas B									
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Lohgending Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BLPKIL Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BBIAPL Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan PPP Larangan Kelas B	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK Wilayah Barat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK Wilayah Selatan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK Wilayah Timur	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan BPMHP Kelas A	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	0	0	n/a	n/a	n/a
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1	1	0	0	3	3	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	3	3	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Asemdayong Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	3	3	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Wonokerto Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	3	3	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Klidanglor Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	3	3	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tawang Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	3	3	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Morodemak Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	3	3	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	3	3	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tasikagung Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	3	3	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT	Dokumen	1	1	1	1	100	3	3	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		PPP Karimunjawa Kelas B)									
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Lohgending Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	3	3	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BLPKIL Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	3	3	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BBIAPL Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	3	3	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Larangan Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	3	3	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Selatan Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	3	3	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Barat Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	3	3	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Timur Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	3	3	100
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Dokumen	1	1	1	1	100	3	3	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Pemerintahan Daerah (UPT BPMHP Kelas A)									
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1	1	0	0	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tegalsari Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Asemdayong Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Wonokerto Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Klidanglor Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tawang Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Morodemak Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Tasikagung Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Karimunjawa Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Lohgending Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BLPKIL Kelas A)									
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BBIAPL Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPP Larangan Kelas B)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Selatan Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Barat Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDK Wilayah Timur Kelas A)	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	1	1	100	n/a	n/a	n/a

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT BPMHP Kelas A)									
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Tegalsari Kelas A	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Asemdayong Kelas B	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Wonokerto Kelas B	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Klidanglor Kelas A	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Tawang Kelas B									
		Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal PPP Morodemak Kelas A	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Bajomulyo Kelas A	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Tasikagung Kelas A	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Karimunjawa Kelas B	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Lohgending Kelas A	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BLPKIL Kelas A	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018- 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiran Realisa Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BBIAPL Kelas A	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan PPP Larangan Kelas B	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK Wilayah Barat	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK Wilayah Selatan	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK Wilayah Timur	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan BPMHP Kelas A	Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	100

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan selama tahun 2018–2023. Adapun program-program yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dari keenam program yang dilaksanakan, ditetapkan indikator utama pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - a) Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap
 - b) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari
 - c) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemboyong
 - d) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto
 - e) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor
 - f) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang
 - g) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak
 - h) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo
 - i) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung
 - j) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa
 - k) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Logending
 - l) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - a) Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan
 - b) Persentase peningkatan produksi benih
 - c) Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya
3. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
 - a) Persentase peningkatan produksi garam
 - b) Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir
 - c) Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif
 - d) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat)
 - e) Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Barat)
 - f) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan)
 - g) Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Selatan)
 - h) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur)
 - i) Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Timur)
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - a) Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu

- b) Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan
- 5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
 - a) Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di sektor perikanan
 - b) Persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp
 - c) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah
 - d) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah
 - e) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah
- 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah
 - b) Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD
 - c) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Tegalsari Kelas A)
 - d) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Asemdayong Kelas B)
 - e) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Wonokerto Kelas B)
 - f) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Klidanglor Kelas A)
 - g) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Tawang Kelas B)
 - h) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Morodemak Kelas A)
 - i) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Bajomulyo Kelas A)
 - j) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Tasikagung Kelas A)
 - k) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Karimunjawa Kelas B)
 - l) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Lohgending Kelas A)
 - m) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BLPKIL Kelas A)
 - n) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BBIAPL Kelas A)
 - o) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (PPP Larangan Kelas B)
 - p) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A)
 - q) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A)
 - r) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A)

s) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPMHP Kelas A)

Target indikator Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dan tahun 2024 serta realisasi indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 serta proyeksi capaian tahun 2024 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							
	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap			0,1	n/a	0	n/a	
	Persentase produksi perikanan tangkap			n/a	5	n/a	5	
	Indeks harga yang diterima oleh nelayan			n/a	108,27	n/a	108,27	
	Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya			n/a	44,44	n/a	44,44	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari			100	72	100	72	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong			40	72,72	100	72,72	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto			40	81,82	90,91	81,82	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor			100	70	100	70	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang			40	62,62	81,82	62,62	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak			100	81	100	81	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa			40	63,63	63,64	63,63	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Logending			100	63	100	63	
	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan			40	72	100	72	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan			100	n/a	100	n/a	
	Persentase peningkatan produksi benih			25	n/a	25	n/a	
	Persentase Pertumbuhan Produksi Budidaya			0,2	n/a	0,4	n/a	
	Persentase produksi ikan konsumsi air laut			n/a	5	n/a	5	
	Produksi perikanan budidaya			n/a	600.000	n/a	600.000	
	Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya			n/a	111,27	n/a	111,27	
III	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL							
	Persentase peningkatan produksi garam			25	n/a	0,05	n/a	
	Persentase produksi garam			n/a	3	n/a	3	
	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir			30	n/a	30	n/a	
	Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif			17,6	n/a	17,6	n/a	
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat)			25	n/a	38,63	n/a	
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Barat)			1	n/a	1	n/a	
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan)			25	n/a	38,99	n/a	
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Selatan)			1	n/a	1,08	n/a	
	Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur)			25	n/a	30,43	n/a	
	Persentase Peningkatan Verifikasi Perizinan Unit Usaha (Wilayah Timur)			1	n/a	1	n/a	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah			n/a	4,5	n/a	4,5	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Barat							
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan			n/a	4,61	n/a	4,61	
	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur			n/a	12,3	n/a	12,3	
IV	PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	Persentase penanganan kasus pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di sektor perikanan			72	n/a	71	n/a	
	Persentase peran aktif kelompok masyarakat pengawas dalam pengawasan sdkp			45	n/a	40	n/a	
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah			2	n/a	2	n/a	
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah			2	n/a	2	n/a	
	Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah			2	n/a	2	n/a	
	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan			n/a	70	n/a	70	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat			n/a	2	n/a	2	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat			n/a	61	n/a	61	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan			n/a	2	n/a	2	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan			n/a	61	n/a	61	
	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur			n/a	2	n/a	2	
	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur			n/a	61	n/a	61	
V	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
	Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu			50	n/a	72,9	n/a	
	Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan			25	n/a	37,61	n/a	
	Jumlah produksi olahan ikan			n/a	160.000	n/a	160.000	
	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan			n/a	4	n/a	4	
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Tegalsari Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Asemdayong Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan			100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2023	Proyeksi Capaian Tahun 2024	Catatan Analisis
				2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perangkat Daerah (UPT PPP Wonokerto Kelas B)							
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Klidanglor Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Tawang Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Morodemak Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Bajomulyo Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Tasikagung Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Karimunjawa Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Lohgending Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT BLPKIL Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT BBIAPL Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT PPP Larangan Kelas B)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A)			100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (UPT BPMHP Kelas A)			100	100	100	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menelaah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, maka kami uraikan sebagai berikut:

a) Permasalahan

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala pembangunan sub sektor kelautan dan perikanan antara lain :

1. Masih belum optimalnya peningkatan produksi perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya) dan produksi garam rakyat dikarenakan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi serta kurang efisiennya sistem distribusi logistik ikan Jawa Tengah.
2. Masih tingginya resiko usaha, belum adanya jaminan usaha kelautan dan perikanan, serta belum optimalnya perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha perikanan dan pergaraman;
3. Masih belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan melalui diversifikasi produk olahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan;
4. Menurunnya daya dukung lingkungan akibat kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) yang diiringi dengan belum seimbang upaya rehabilitasi yang dilakukan.

b) Tantangan

1. Optimalisasi hasil kelautan dan perikanan terutama pada usaha skala kecil dan menengah;
2. Rendahnya konsumsi makan ikan dan belum meratanya distribusi ikan segar terutama pada kabupaten/kota non pesisir;
3. Digitalisasi sektor kelautan dan perikanan;
4. Kualitas SDM pelaku usaha perikanan;
5. Keterbatasan infrastruktur dan penyedia logistik di sentra perikanan;
6. Keterbatasan teknologi informasi untuk logistik perikanan;
7. Fasilitasi kemudahan perijinan;
8. Produksi komoditas unggulan perikanan budidaya di Jawa Tengah;
9. Inovasi, diseminasi dan pendampingan teknologi di Jawa Tengah;
10. Produksi garam yang masih bergantung cuaca, serapan pasar ke garam rakyat masih rendah;
11. Rekomendasi perijinan ruang laut;
12. Pengelolaan kawasan konservasi.

c) Peluang

1. Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan dalam mencukupi kebutuhan akan pangan;
2. Permintaan pasar akan ikan dan produk hasil olahan kelautan dan perikanan;
3. Pemanfaatan potensi SDA dan SDM;
4. Pengembangan infrastruktur.

d) Formulasi isu-isu penting

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan berpotensi memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis pembangunan lingkup kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan tata ruang laut dan sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah;
2. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan dan garam rakyat;
3. Masih rendahnya Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan dikarenakan belum optimalnya perlindungan usaha;
4. Angka Konsumsi ikan di Jawa Tengah yang masih dibawah rata-rata Angka Konsumsi Ikan Nasional dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan, rendahnya kompetensi sdm poklhasar, belum optimalnya jaminan mutu produk perikanan serta belum terbentuknya jejaring pemasaran produk kelautan dan perikanan;
5. Rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir dikarenakan minimnya kompetensi dan keterampilan yang dimiliki, bagi hasil yang tidak proporsional, praktik ijon, serta belum optimalnya jaminan perlindungan terhadap pelaku usaha;
6. Terjadinya *overfishing* di wilayah pengelolaan perikanan, *overcapacity* di Pelabuhan perikanan, *unreported* data produksi perikanan, serta minimnya teknologi penangkapan ikan;
7. Tingginya harga pakan, wabah dan hama penyakit ikan, menurunnya kualitas benih dan induk, rendahnya teknologi serta sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
8. Kerusakan ekosistem pesisir akibat abrasi, alih fungsi lahan, minimnya pengetahuan stakeholder dalam pengawasan SDKP, serta adanya ketidaksesuaian antara rencana alokasi ruang laut dengan pemanfaatan ruang laut;

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu dilakukan dengan melakukan langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi program dan/atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
3. Catatan penting berisi hasil temuan apabila terjadi perbedaan antara kebutuhan dan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besaran volume/target serta anggaran berbeda, perbedaan indikator kinerja dengan RKPD dan lainnya.

Reviu tersebut tertuang dalam tabel 5 berikut :

Tabel 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
		Bidang Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	5 %	1.400.191		Bidang Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	5 %	1.400.191
			Persentase Lokasi Yang dilindungi Sumber Daya Ikannya	44,44 %	227.375			Persentase Lokasi Yang dilindungi Sumber Daya Ikannya	44,44 %	227.375
			Indeks Harga Yang Diterima Oleh Nelayan	108,27	575.760			Indeks Harga Yang Diterima Oleh Nelayan	108,27	575.760
		Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	72 %	1.197.023		Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	72 %	1.197.023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Kelas A					Kelas A			
		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemduyong Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	72,72 %	583.640		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemduyong Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	72,72 %	583.640
		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	81,82 %	554.947		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	81,82 %	554.947
		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	70 %	1.104.456		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	70 %	1.104.456
		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	62,62 %	614.684		Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	62,62 %	614.684

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodema k Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	81 %	834.694		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodema k Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	81 %	834.694
		Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	100 %	635.108		Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	100 %	635.108
		Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	100 %	1.259.793		Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	100 %	1.259.793
		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunja wa Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	63,63 %	584.829		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunja wa Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	63,63 %	584.829
		Pelabuhan Perikanan	Persentase Ketercapaian	63 %	592.038		Pelabuhan Perikanan	Persentase Ketercapaian	63 %	592.038

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pantai Lohgendin g Kelas A	Pelayanan Kepelabuhanan				Pantai Lohgendin g Kelas A	Pelayanan Kepelabuhanan		
		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	72 %	537.390		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan	72 %	537.390
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
		Bidang Usaha dan Pengemba ngan Komoditas	Produksi Perikanan Budidaya	600.000 Ton	2.101.500		Bidang Usaha dan Pengemba ngan Komoditas	Produksi Perikanan Budidaya	600.000 Ton	2.101.500
			Indeks Harga Yang Diterima Oleh Pembudidaya	111,27	396.500			Indeks Harga Yang Diterima Oleh Pembudidaya	111,27	396.500

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	100 %	808.192		Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	Persentase Penanganan Kasus Hama Penyakit Ikan	100 %	808.192
		Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	5 %	11.274.856		Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	5 %	11.274.856
III	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANA					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANA				
		Bidang Usaha dan Pengembangan	Jumlah Produksi Olahan Ikan	160.800 Ton	801.310		Bidang Usaha dan Pengembangan	Jumlah Produksi Olahan Ikan	160.800 Ton	801.310

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Komoditas					Komoditas			
		Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4 %	1.140.810		Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4 %	1.140.810
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				
		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	Persentase Produksi Garam	2 %	520.062		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	Persentase Produksi Garam	2 %	520.062
			Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju	5 %	382.824			Persentase Kawasan Konservasi yang ditata menuju	5 %	382.824

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			pengelolaan yang efektif					pengelolaan yang efektif		
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	Persentase Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi di Wilayah Kerja	3,7 %	386.389		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	Persentase Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi di Wilayah Kerja	3,7 %	386.389
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	Persentase Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi	1,39 %	282.954		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	Persentase Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi	1,39 %	282.954
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	Persentase Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi di Wilayah Kerja	3,7 %	533.881		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	Persentase Luas Kawasan Mangrove yang direhabilitasi di Wilayah Kerja	3,7 %	533.881
V	PROGRAM PENGAWASAN					PROGRAM PENGAWASAN				

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	70 %	606.023		Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	70 %	606.023
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
		Sekretariat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian,	100 %	51.272.346		Sekretariat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian,	100 %	51.272.346

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			dan keuangan perangkat daerah					dan keuangan perangkat daerah		
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %	741.745			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %	741.745
		Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	416.480		Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	416.480
		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemduyo	Persentase tingkat pelayanan umum,	100 %	148.500		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemduyo	Persentase tingkat pelayanan umum,	100 %	148.500

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		ng Kelas B	kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah				ng Kelas B	kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		
		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	100.500		Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	100.500
		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	116.052		Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	116.052
		Pelabuhan Perikanan	Persentase tingkat	100 %	97.000		Pelabuhan Perikanan	Persentase tingkat	100 %	97.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pantai Tawang Kelas B	pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah				Pantai Tawang Kelas B	pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		
		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodema k Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	115.200		Pelabuhan Perikanan Pantai Morodema k Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	115.200
		Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	229.724		Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	229.724

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	513.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	513.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	174.000		Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	174.000
		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	100 %	188.254		Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan	100 %	188.254

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			perangkat daerah					perangkat daerah		
		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	117.590		Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	117.590
		Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	164.500		Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	164.500
		Balai Budidaya Ikan Air Payau dan	Persentase tingkat pelayanan umum,	100 %	608.000		Balai Budidaya Ikan Air Payau dan	Persentase tingkat pelayanan umum,	100 %	608.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Laut Kelas A	kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah				Laut Kelas A	kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		
		Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	253.000		Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	253.000
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	64.300		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	64.300
		Cabang Dinas	Persentase tingkat	100 %	94.000		Cabang Dinas	Persentase tingkat	100 %	94.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Kelautan Wilayah Timur Kelas A	pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah				Kelautan Wilayah Timur Kelas A	pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		
		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	248.690		Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %	248.690

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hasil telaah dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP/ Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kab. Demak, Kab. Pekalongan, Kab. Brebes, Kab. Kebumen	Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	8 Paket	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA/ Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Kab. Magelang, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Klaten, Karanganyar, Banyumas, Semarang, Purworejo, Tegal, Kota Semarang, Kota Salatiga	Jumlah kelompok yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya	33 Paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Visi Pembangunan Nasional:

Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang harus didukung oleh industrialisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi.

Misi Presiden :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Agenda Prioritas Pembangunan :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Pembangunan Kelautan (RPJMN 2020-2024)

Arah kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Pembangunan Nasional Kelautan tahun 2020-2024, dapat dilihat pada gambar 3.1. dan 3.2.



Gambar 1. Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024



Gambar 2. Arah Kebijakan Sektor Kelautan dan Perikanan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

- a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah;
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran selama satu tahun; dan
- c. Menciptakan kepastian kebijakan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah:

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. Menjadikan acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena memuat kebijakan publik;
- c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara seksi-seksi di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan		Persentase Luasan Mangrove Yang Direhabilitasi	(%)	0,79
		Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	(%)	63

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan		Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	(%)	1,10
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi Perikanan	Ton	952.718
		Meningkatnya Produksi Garam	Produksi Garam	Ton	134.640
3	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,6
4	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan		Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Angka	108,05
		Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	40,92
		Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Angka	105,50
		Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Angka	110,50

3.3 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 3.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan	Menurunnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	16	Semakin jauhnya wilayah tangkapan ikan, adanya hama penyakit ikan, cuaca buruk dan tingginya biaya operasi/produksi	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Pembuatan TKB, pengawasan penggunaan alat tangkap, monitoring hama penyakit ikan dan hibah/bantuan kepada nelayan dan pembudidaya ikan	Kepala OPD	1 tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Produksi Garam	Produksi garam	Tingginya curah hujan dan proses produksi tradisional	16	Petambak garam tidak dapat memproduksi sepanjang tahun	Produktifitas petambak garam rendah	Penggunaan teknologi dalam produksi garam dan bantuan/hibah kepada petambak garam	Kepala Dinas	1 tahun
Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan	Masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya konsumsi ikan	12	Rendahnya konsumsi ikan masyarakat	kekurangan gizi pada masyarakat	Kampanye gemar makan ikan di masyarakat	Kepala Dinas	1 tahun
Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Penurunan SDI dan cuaca buruk	12	Produksi perikanan tangkap menurun	Kesejahteraan nelayan rendah	Pembuatan TKB, pengawasan penggunaan alat tangkap dan hibah/bantuan kepada nelayan	Kepala Dinas	1 tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Terjadinya serangan hama penyakit ikan, cuaca buruk dan tingginya biaya produksi	12	Rendahnya volume produksi perikanan budidaya	Kesejahteraan pembudidaya ikan rendah	Monitoring hama penyakit ikan dan bantuan/hibah kepada pembudidaya ikan	Kepala Dinas	1 tahun
Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR) yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	Masih adanya IUU dan kegiatan masyarakat yang merusak SDKP	16	Kurangnya patroli pengawasan SDKP	Rusaknya SDKP di Jawa Tengah	Sosialisasi kepada masyarakat dan peningkatan operasi pengawasan SDKP	Kepala Dinas	1 tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Personil OPD tidak mempunyai orientasi pelayanan	9	Pelayanan lambat	Buruknya tingkat pelayanan kepada masyarakat	Rapat evaluasi dan pengendalian kegiatan setiap bulan	Kepala Dinas	1 tahun
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Kurang pemahaman identifikasi risiko	9	Kurangnya sosialisasi SPIP	Risiko tidak teridentifikasi	Pertemuan dan pembinaan SPIP setiap tahun, penilaian maturitas SPIP	Kepala Dinas	1 tahun

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2025. Rencana tersebut dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan									2.914.380.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Angka	108.05		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)								1.942.120.000		
						Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/ta	40.92	1.942.120.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						1.942.120.000		
						Jumlah produksi olahan ikan	Ton	160800	801.310.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					99.500.000		
						Persentase Unit Pengolahan Ikan yang terdata	%	20	99.500.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.01.0003			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				95.500.000		
						Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan Data	Kabupaten/ Kota	35	95.500.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.06.1.01.0005			Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko				4.000.000		
						Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi perijinan	Orang	30	4.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					697.810.000		
						Jumlah jenis pelatihan peningkatan keterampilan dan kompetensi	Jenis	2	282.940.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.02.0004			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				282.940.000		
						Jumlah SDM dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang meningkat keterampilanny	Orang	70	282.940.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Poklahsar yang Meningkat Usahnya	Unit	5	130.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.02.0002			Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				130.000.000		
						Jumlah sarana yang diberikan kepada pengolah dan pemasar	Paket	0	130.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
						Jumlah Usaha Kelautan dan Perikanan yang dipromosikan	Unit	35	284.870.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.06.1.02.0004			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				284.870.000		
						Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN	Orang	900	235.750.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengolah dan Pemasar yang difasilitasi Pemasaran	Orang	30	49.120.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					4.000.000		
						Jumlah Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan	Dokumen	1	4.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
		3.25.06.1.03.0001			Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				4.000.000		
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Penyedia Layanan Jasa Logistik yang dibina	Orang	25	4.000.000	SEKSI LOGISTIK, BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	
						Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	1.140.810.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					1.140.810.000		
						Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan	Sertifikat	425	950.122.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.0004			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				950.122.000		
						Jumlah Dokumen ISO 17025:2017	Dokumen	1	708.432.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						Jumlah Prasarana Laboratorium Penujian Yang Memada	Paket	2	140.690.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						Jumlah Sarana Laboratorium Pengujian Yang Memadai	Unit	2	101.000.000	SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						Jumlah Rekomendasi sertifikat Good Manufacturing Product (GMP) yang diterbitkan	Sertifikat	100	87.980.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.0004			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				87.980.000		
						Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina kelayakan dasar	Unit	80	87.980.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						Jumlah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)	Dokumen	1	102.708.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.0004			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				102.708.000		
						Jumlah Dokumen ISO 17065:2012 dan ISO 9001:2015	Dokumen	2	73.552.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						JUmlah DOKumen Kesesuaian Produk Yang Akan Disertifikasi	Dokumen	2	13.336.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
						Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya	Orang	20	15.820.000	SEKSI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan								575.760.000		
						Nilai Tukar Nelayan	Angka	105.5	575.760.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						575.760.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Indeks harga yang diterima oleh nelayan	Angka	108.54	575.760.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					558.510.000		
						Jumlah Nelayan yang memperoleh perlindungan	Orang	5050	558.510.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
		3.25.03.1.01.0002			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				558.510.000		
						Jumlah Dokumen Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan	Dokumen	1	7.000.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Nelayan yang diberikan premi asuransi	Orang	5000	528.760.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah nelayan yang terdaftar kartu nelayan	Orang	25	13.250.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah RTP yang difasilitasi usahanya	Kelompok	25	9.500.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					17.250.000		
						Jumlah nelayan yang meningkat ketrampilan dan kompetensi	Orang	60	17.250.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0004			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				17.250.000		
						Jumlah Nelayan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	30	17.250.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan								396.500.000		
						Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Angka	110.5	396.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						396.500.000		
						Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	Angka	111.55	396.500.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					396.500.000		
						Jumlah Pembudidaya Ikan yang Meningkatkan Keterampilannya	Orang	60	396.500.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				396.500.000		
						Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang di fasilitasi sosialisasi kelembagaan	Kelompok	20	12.120.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
						Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti pelatihan	Orang	40	384.380.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
Meningkatkan Kualitas Ekosistem Kelautan Perikanan									3.569.784.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Persentase luasan mangrove yang direhabilitasi	%	0.79		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif								3.569.784.000		
						Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	%	63	3.569.784.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						1.586.048.000		
						Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	5	382.824.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					382.824.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Lokasi	1	155.813.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				155.813.000		
						Jumlah kajian pencadangan kawasan konservasi	Dokumen	1	155.813.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha yang diverifikasi persyaratan KKPRL	Orang	4	227.011.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	
		3.25.02.1.01.0002			Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat				227.011.000		
						Jumlah Stakeholder yang memahami peraturan perundang-undangan	Orang	200	155.786.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Yang Dimanfaatkan	Lokasi	4	71.225.000	SEKSI PENGELOLAAN RUANG LAUT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	4	386.389.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					362.219.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Lokasi	2	53.360.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				53.360.000		
						Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi	Dokumen	2	9.160.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk	Unit	2	10.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	Orang	60	34.200.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi	Ha	2.2	308.859.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				308.859.000		
						Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	22000	308.859.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					24.170.000		
						Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	%	100	24.170.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.0007			Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan				24.170.000		
						Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	%	100	24.170.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	2.93	282.954.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					266.514.000		
						Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi	Ha	2.2	266.514.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				266.514.000		
						Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	22000	266.514.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					16.440.000		
						Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	%	100	16.440.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.0007			Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan				16.440.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	%	100	16.440.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	7.8	533.881.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					506.881.000		
						Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Lokasi	2	138.140.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				138.140.000		
						Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi	Dokumen	2	65.440.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk	Unit	2	57.800.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	Orang	60	14.900.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi	Ha	2.2	368.741.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.01.0003			Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				368.741.000		
						Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	Batang	22000	249.370.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan	Unit	4	119.371.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi					27.000.000		
						Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	%	100	27.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.02.1.02.0007			Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan				27.000.000		
						Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	%	100	27.000.000	SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						227.375.000		
						Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	%	50	227.375.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					227.375.000		
						Jumlah lokasi yang dilindungi SDI nya	Lokasi	1	227.375.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0004			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				227.375.000		
						Jumlah Nelayan Yang Mengetahui Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Ramah Lingkungan	Orang	30	227.375.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.756.361.000		
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	61	109.162.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					109.162.000		
						Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan	Kali	7	109.162.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				109.162.000		
						Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	20	109.162.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	61	151.676.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					151.676.000		
						Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan	Kali	10	151.676.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				151.676.000		
						Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	20	151.676.000	SEKSI PENGAWASAN	
						Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	61	83.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					83.000.000		
						Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan	Kali	8	83.000.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				83.000.000		
						Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	Unit	10	83.000.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	%	70	606.023.000	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					494.123.000		
						Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kelompok	35	50.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0004			Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				50.000.000		
						Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)yang Menerima Sarana dan prasarana	Kelompok	3	50.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	18	81.900.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				27.300.000		
						Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	27.300.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				27.300.000		
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	27.300.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan				27.300.000		

					sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						
						Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	27.300.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil	%	100	362.223.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				71.071.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	%	100	71.071.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				278.452.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	%	100	278.452.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				12.700.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	%	100	12.700.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					111.900.000		
						Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	180	81.900.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				27.300.000		
						Jumlah pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	27.300.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				27.300.000		
						Jumlah pelaku usaha pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	27.300.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				27.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pelaku usaha pada usaha pembudidaya di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Orang	30	27.300.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
						Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya	%	100	30.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				15.000.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	15.000.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				7.500.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	7.500.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				7.500.000		
						Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	7.500.000	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN	
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	2	293.075.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					251.735.000		
						Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	%	100	251.735.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				10.390.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	6	10.390.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				230.955.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	12	230.955.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				10.390.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	6	10.390.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					41.340.000		
						Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	41.340.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				15.820.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	15	15.820.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				15.130.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	10	15.130.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				10.390.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	10	10.390.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	2	240.505.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					73.826.000		
						Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	%	100	73.826.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				9.350.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	12	9.350.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				8.468.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	12	8.468.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				56.008.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	10	56.008.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					166.679.000		
						Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	166.679.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				55.898.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Orang	12	55.898.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				56.263.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya sesuai kewenangan provinsi	Orang	10	56.263.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				54.518.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya sesuai kewenangan provinsi	Orang	12	54.518.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	2	272.920.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					119.322.000		
						Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	%	100	119.322.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.01.0013			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				56.048.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	Orang	18	56.048.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0014			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				5.909.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	Orang	24	5.909.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.01.0016			Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi				57.365.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Orang	18	57.365.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					153.598.000		
						Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	%	100	153.598.000	SEKSI PENGAWASAN	
		3.25.05.1.02.0003			Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				57.086.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	18	57.086.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.05.1.02.0005			Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				46.216.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	18	46.216.000	SEKSI PENGAWASAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.05.1.02.0006			Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				50.296.000		
						Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	Orang	18	50.296.000	SEKSI PENGAWASAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah									55.662.881.000		
						Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	83			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah								54.921.136.000		
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84	54.921.136.000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						54.921.136.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	248.690.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					88.960.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	88.960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.000 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.690.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.690.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.000 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				52.230.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	52.230.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.000 9			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33.040.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	33.040.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					68.400.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	68.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.000 1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.600.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.000 2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				64.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	64.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					91.330.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	91.330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.000 2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.880.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	24.880.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.450.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	6.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	97.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					21.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	21.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	9.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	46.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	10.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					17.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	17.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.850.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.850.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	7.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.650.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	8.650.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					34.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	34.500.000		
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				33.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	33.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					48.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	48.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				17.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	5	17.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	18	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEKALONGAN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	253.000.000	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					24.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	24.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	4.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					202.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	202.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	200.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					26.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	26.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	2	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	164.500.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					11.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	11.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					98.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	98.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				97.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	97.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.500.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	54.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8.500.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	8.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				41.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	41.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	117.590.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					31.120.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	31.120.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.820.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.820.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.300.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	18.300.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	11.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					32.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	32.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					54.470.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	54.470.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				16.220.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	16.220.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.250.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	3.250.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	64.300.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					12.660.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	12.660.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.160.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	5.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					34.500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	34.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					17.140.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	17.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				9.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.140.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	3.140.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> MAGELANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	51.272.346.000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					48.061.846.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	1	48.061.846.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				46.991.846.000		
						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	327	46.991.846.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0002			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				920.000.000		
						Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	920.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				150.000.000		
						Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	150.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000		
						Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000		
						Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					220.000.000		
						Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0003			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		
						Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0005			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				150.000.000		
						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				60.000.000		
						Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	30	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					756.250.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	756.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				40.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	40.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000		
						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000		
						Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				462.250.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	462.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0010			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.000.000		
						Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12.000.000		
						Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	1	12.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					507.250.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	1	507.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				507.250.000		
						Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	1	507.250.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.437.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	1.437.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	7.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				430.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	430.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.000.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					190.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	190.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				80.000.000		
						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0008			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		
						Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	115.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					30.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	53.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.200.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					32.000.000		
						Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal	Unit	1	32.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	116.052.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.300.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	55.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				53.300.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	53.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	45.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				45.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.652.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	15.652.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.652.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	8.652.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	416.480.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					122.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	122.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	12.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	50.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					189.480.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	189.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186.480.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	186.480.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					105.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	105.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	94.000.000	Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					24.540.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	24.540.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.950.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.740.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	4.740.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16.850.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	16.850.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					39.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	39.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				38.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.460.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	30.460.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				14.510.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	14.510.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.950.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	148.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					50.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	50.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	3.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34.500.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	34.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.500.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	12.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					42.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	42.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				40.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					56.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	56.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	10.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	11.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				35.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	35.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	188.254.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					60.254.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	60.254.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	7.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.754.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	32.754.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					73.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	73.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				72.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	72.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	608.000.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					38.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	38.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					460.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	460.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				455.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	455.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					110.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				60.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	60.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA SEMARANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	174.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					18.500.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	18.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	12.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	4.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	119.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				117.800.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	117.800.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					35.700.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	35.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	5.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.700.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	5.700.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	513.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					104.000.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	104.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				54.000.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	20.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					284.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	284.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				282.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	282.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					125.000.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				55.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	229.724.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					81.324.000		
						Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	81.324.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000		
						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				73.324.000		
						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	73.324.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.000.000		
						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					82.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	1	82.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	4.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				78.000.000		
						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	78.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					66.400.000		
						Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	66.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		
						Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	1	25.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.400.000		
						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	1	31.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
		X.XX.01.1.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		
						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah								741.745.000		
						Indeks Manajemen Risiko	Angka	2.6	741.745.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						741.745.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	741.745.000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					741.745.000		
						Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	741.745.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				359.445.000		
						Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	359.445.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				382.300.000		
						Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	382.300.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan									24.603.403.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
						Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	%	1.1		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Meningkatnya Produksi Garam								520.062.000		
						Produksi garam	Ton	134640	520.062.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						520.062.000		
						Persentase produksi garam	%	2	520.062.000	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil	
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					520.062.000		
						Jumah KUGAR yang meningkat kompetensinya	Kelompok	25	42.880.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				42.880.000		
						Jumlah petambak garam yang difasiltasi dan dibina	Orang	100	42.880.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Kelompok	4	13.645.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				13.645.000		
						Jumlah masyarakat pesisir yang meningkat kapasitas usahanya	Orang	25	13.645.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya	Kelompok	5	452.737.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				452.737.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang diberikan ke petambak garam	Jenis	1	207.300.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Luas lahan garam yang menerapkan teknologi	Ha	10	245.437.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sentra garam rakyat yang didata potensinya	Lokasi	5	10.800.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		3.25.02.1.03.0001			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil				10.800.000		
						Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data potensi garam	Kabupaten/ Kota	9	10.800.000	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Produksi Perikanan								24.083.341.000		
						Produksi perikanan	Ton	952718	24.083.341.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						9.898.793.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	%	72.72	583.640.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					583.640.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	5	120.980.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				120.980.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	10	52.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	70	6.150.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	18.480.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	30	44.350.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Jumlah fungsi pengusaha yang dilaksanakan	Jenis	5	9.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				9.000.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	80	4.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	75	4.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	20	2.300.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				2.300.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	2.300.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	50	66.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				66.500.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	66.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	3	4.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				4.500.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	4	4.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	30	380.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				380.360.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	4	380.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PEMALANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	100	635.108.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					635.108.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	9	416.888.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				416.888.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	2800	349.168.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	100	27.870.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	16.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	320	23.850.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	87.665.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				87.665.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	100	87.665.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	43	123.355.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				123.355.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	123.355.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	90	7.200.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				7.200.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	40000	7.200.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> PATI
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	%	72.27	584.829.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					584.829.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	5	31.887.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				31.887.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	300	5.887.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	45	16.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	40	4.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	3	18.327.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				18.327.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	40	5.025.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	60	13.302.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	50	60.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				60.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	3	60.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	60	98.215.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				98.215.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	2	98.215.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	60	50.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				50.000.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	30	50.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketramplannya	%	70	326.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				326.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	10	326.400.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> JEPARA
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	%	70	1.104.456.000		
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.104.456.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	9	46.000.000		
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				46.000.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	2800	8.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	1100	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	16.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	110	1.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Jenis	6	3.000.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				3.000.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	1200	1.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	3	1.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	10	100.000.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				100.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	60	400.000.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				400.000.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	400.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	10	31.656.000		
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				31.656.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	3500	31.656.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	10	523.800.000		
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				523.800.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	523.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BATANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	%	72	537.390.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					537.390.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	6	64.060.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				64.060.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	140	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	15	9.472.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	6.148.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	40	8.440.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Jenis	4	11.585.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				11.585.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	120	9.895.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	41	1.690.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	20	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				40.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	45	115.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				115.500.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	115.500.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	9	2.885.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				2.885.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	15	2.885.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	32	303.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				303.360.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	3	303.360.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhananan PPP Lohgending	%	63	592.038.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					592.038.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	5	165.275.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				165.275.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	36	8.700.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	118	70.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	80.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	120	6.575.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	17.500.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				17.500.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	165	10.925.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	10	6.575.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	50	14.575.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				14.575.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	14.575.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	54	383.538.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				383.538.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	383.538.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	60	4.575.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				4.575.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	90	4.575.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	30	6.575.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				6.575.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	6.575.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KEBUMEN
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	%	81	834.694.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					834.694.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	7	100.592.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				100.592.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	300	20.402.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	55	10.440.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	61.250.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	40	8.500.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	5	23.275.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				23.275.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	150	10.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	100	13.275.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	57	8.775.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				8.775.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	8.775.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	66	310.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				310.000.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	310.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	20	7.500.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				7.500.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	150	7.500.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	14	384.552.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				384.552.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	3	384.552.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> DEMAK
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	100	1.259.793.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.259.793.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	7	93.153.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				93.153.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	6500	9.830.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	6500	20.000.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	30.443.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	60	32.880.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Jenis	6	94.410.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				94.410.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	6500	43.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	75	51.210.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	57.14	60.960.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				60.960.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	60.960.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	100	215.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				215.000.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	2	215.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	35	63.550.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				63.550.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	20000	63.550.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	7.4	732.720.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				732.720.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	4	732.720.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> REMBANG
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	71.72	614.684.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					614.684.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	7	78.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				78.000.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	50	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	5	15.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	18.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	60	30.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	40.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Perusahaan Pelabuhan Perikanan				40.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	2000	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	43	20.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	20	55.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				55.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	55.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	50	100.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				100.000.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	100.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	7	26.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				26.000.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	60	26.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketramplilannya	%	25	315.684.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				315.684.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	315.684.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KENDAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhananan PPP Tegalsari	%	72	1.197.023.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					1.197.023.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	9	885.329.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				885.329.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	3000	785.424.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	200	23.760.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	69.240.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	350	6.905.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	7	41.189.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				41.189.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	1300	15.000.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	100	26.189.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	33	7.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				7.200.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	7.200.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	70	183.853.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				183.853.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	183.853.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	90	24.465.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				24.465.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	10000	24.465.000	SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	30	54.987.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				54.987.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	1	54.987.000	SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA TEGAL
						Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhananan PPP Wonokerto	%	81.82	554.947.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi					554.947.000		
						Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Jenis	7	16.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				16.200.000		
						Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	Dokumen	1050	3.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	Unit	60	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	Laporan	12	2.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	Orang	40	9.200.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Jenis	4	119.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				119.000.000		
						Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	Unit	120	6.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	%	40	113.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	%	28	7.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				7.000.000		
						Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen	1	7.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	%	42	408.447.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				408.447.000		
						Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	Unit	1	408.447.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	%	16.22	1.300.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0002			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan				1.300.000		
						Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	Orang	30	1.300.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	%	25	3.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	
		3.25.03.1.06.0003			Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan				3.000.000		
						Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	Orang	3	3.000.000	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> KOTA PEKALONGAN
						Persentase produksi perikanan tangkap	%	5	1.400.191.000	Bidang Perikanan Tangkap	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil					238.216.000		
						Jumlah pelabuhan yang menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan	Dokumen	4	180.931.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.25.03.1.01.0002			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				180.931.000		
						Jumlah KUB yang difasilitasi Kelembagaannya	Kelompok	1	9.500.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelabuhan perikanan yang ditingkatkan tata kelola dan operasional kepelabuhannya	Lokasi	1	171.431.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah produksi perikanan yang didaratkan	Ton	343717.5	57.285.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	
		3.25.03.1.01.0001			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				57.285.000		
						Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaporkan Data	Kabupaten/Kota	34	57.285.000	SEKSI KEPELABUHAN DAN KENELAYANAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					1.161.975.000		
						Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan	Unit	280	150.100.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0004			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				150.100.000		
						Jumlah Kapal Perikanan yang Terdaftar Melalui TDKP	Unit	160	82.650.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi alokasi usaha perikanan yang dikeluarkan	Unit	40	67.450.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Kapal Perikanan yang menerapkan teknologi Penangkapan Ikan	%	0.25	1.011.875.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	
		3.25.03.1.02.0003			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				610.000.000		
						Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Unit	0	610.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.03.1.02.0004			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				401.875.000		
						Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	Unit	15	376.875.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah lokasi kapal yang menerapkan Teknologi Penangkapan Ikan	Lokasi	1	25.000.000	SEKSI PENGENDALIAN PENANGKAPAN, KAPAL DAN ALAT TANGKAP	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						14.184.548.000		
						Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	808.192.000	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					808.192.000		
						Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani	Kasus	350	452.707.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	
		3.25.04.1.05.0006			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				452.707.000		
						Jumlah Kab/Kota yang Melaporkan Data Peredaran Obat Ikan	Kabupaten/Kota	35	44.932.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Lokasi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Lokasi	35	396.675.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaku Usaha yang Terakses Informasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Orang	350	11.100.000	SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pengguna Layanan Pengujian	%	20	340.485.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				340.485.000		
						Jumlah Parameter Pengujian	Unit	1	171.500.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium	sampel	400	20.660.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Sertifikasi Laboratorium yang memenuhi standar teknis (2 Sertifikat)	Sertifikat	2	148.325.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkatkan Kompetensinya	%	29	15.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				15.000.000		
						Jumlah jenis pelatihan yang diikuti petugas	Jenis	5	15.000.000	SEKSI PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN DAN HAMA PENYAKIT IKAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase produksi ikan konsumsi air laut	%	5	11.274.856.000	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					622.000.000		
						Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut	Jenis	1	20.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	
		3.25.04.1.05.0007			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi				20.000.000		
						Jumlah Tenaga Teknis (SDM) Loka yang Meningkatkan Keterampilannya	Orang	5	20.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Lokasi	1	602.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	
		3.25.04.1.05.0002			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				250.000.000		
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang direhabilitasi/dibangun	Unit	1	250.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				352.000.000		
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	Kg	1575	352.000.000	SEKSI PELAYANAN USAHA DAN JASA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	Lokasi	9	10.652.856.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	
		3.25.04.1.06.0003			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.652.856.000		
						Jumlah Ikan Endemik Lokal yang di Produksi	Ekor	200000	38.000.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kolam yang dilakukan Rehabilitasi	Unit	9	4.611.566.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Kolam yang dilakukan Rehabilitasi/Dibangun	Kg	10500	2.755.546.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Produksi Benih Unggul	Ekor	31500000	351.712.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Produksi Calon Induk Bermutu	Ekor	5250	2.896.032.000	SEKSI PRODUKSI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Produksi perikanan budidaya	Ton	609000	2.101.500.000	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	
				Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					203.500.000		
						Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Ijin Usaha	Orang	127	203.500.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.01.0002			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				110.000.000		
						Jumlah unit pembenihan yang memiliki sertifikat CPIB	Unit	3	64.040.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit pembesaran ikan yang memiliki SP4 CBIB / sertifikat CBIB	Unit	5	37.420.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit produksi pakan ikan yang memiliki sertifikat CPPIB	Unit	1	8.540.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		3.25.04.1.01.0003			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan				93.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2025			
								Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan data	Kabupaten/Ko	35	93.500.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut					1.898.000.000		
						Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Jenis	3	1.898.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	
		3.25.04.1.05.0004			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				1.898.000.000		
						Jumlah kelompok yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya	Kelompok	0	1.898.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									86.750.448.000		

4.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 4.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program								
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase produksi perikanan tangkap	Jumlah ikan hasil tangkapan di laut jawa menurun	12	Kerusakan habitat ikan	Lokasi penangkapan ikan semakin jauh dan kebutuhan perbekalan melaut bertambah	Penenggelaman rumah ikan, sosialisasi pengelolaan sdi yang lestari dan berkelanjutan dan pemberian bantuan alat tangkap ramah lingkungan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	1 Tahun

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	Pelayanan Kepelabuhanan tidak maksimal	16	Tidak tersedianya saprass yang memadai	Rendahnya kepuasan publik atas layanan PPP Lohgending	Sosialisasi dan Pelatihan, Pembinaan personil	Kepala Pelabuhan	Desember

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta pengawasan dan keamanan operasional pelabuhan tidak berjalan optimal	16	kurangnya sapas dan pengawasan kegiatan nelayan di kawasan pelabuhan	Pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan dan kegiatan operasional kapal perikanan tidak optimal, Jumlah kapal di kawasan pelabuhan kurang termonitor	Sosialisasi, Pengadaan sapas (CCTV) di kawasan pelabuhan	Kepala Pelabuhan	Desember

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan	16	kurangnya fasilitas yang memadai	pemanfaatan Fasilitas pelabuhan terlaksana kurang optimal	Sosialisasi dan publikasi terkait fasilitas yang tersedia di pelabuhan	Kepala Pelabuhan	Desember
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	percepatan pengembang an pelabuhan terhambat	16	Belum adanya sertifikat tanah pelabuhan sebagai salah satu bentuk penguasaan terhadap suatu wilayah kerja	Penyusunan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) terhambat	Koordinasi dengan instansi terkait (ATR/BPN, BBWS, BPKAD)	kepala pelabuhan	Desember
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	kurangnya fasilitas pokok, penunjang, fungsional yang dimiliki pelabuhan	16	sapras tidak memadai	Kegiatan operasional pelabuhan terhambat	perbaiki halaman ruang pertemuan SPI Pasir	kepala pelabuhan	Desember

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	nelayan belum terjamin oleh asuransi (BPJS Ketenagakerja an)	16	Kurangnya kesadaran nelayan/pemilik kapal akan pentingnya asuransi	Nelayan tidak memperoleh santunan jika terjadi laka laut	Sosialisasi dan koordinasi terkait asuransi nelayan	Kepala pelabuhan	Desember

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	SDM tidak kompeten dan kurang terampil	16	SDM tidak cakap melayani	Pelayanan PPP Lohgending tidak optimal	Menugaskan pegawai untuk mengikuti Diklat Fungsional maupun teknis serta Seminar guna meningkatkan kompetensi pegawai	kepala Pelabuhan	Desember

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Pelayanan dan kinerja terhambat	16	Pegawai tidak kompeten	kegiatan Operasional kedinasan tidak terpenuhi, nilai kepuasan masyarakat menurun	Pembagian tugas kepada pegawai sesuai kompetensinya sehingga semua kegiatan operasional dan pelayanan terpenuhi	Kepala pelabuhan	Desember

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah	12	Barang Milik Daerah yang rusak tidak dapat diperbaiki	kegiatan pelayanan dan operasional kantor terhambat	penentuan skala prioritas pemeliharaan	Kasubbag TU	Desember

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	Wabah penyakit ikan tertentu tidak tertangani	12	Kompetensi dan fasilitas pengujian belum ada	Sebaran Hama dan Penyakit Ikan semakin meluas	Pelaksanaan monitoring dan sosialisasi pencegahan dan pengobatan penyakit ikan berpotensi wabah kepada pelaku usaha serta menambah ruang lingkup pengujian	BLPKIL	1 Tahun

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Kegiatan operasional tidak berjalan dengan baik	12	SOP operasional tidak diterapkan	Ketidakpuasan pelanggan dan penurunan kinerja pegawai	Pengusulan perbaikan sarana prasarana dan kegiatan operasional sesuai kebutuhan	BLPKIL	1 Tahun
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase produksi ikan konsumsi air laut	adanya kerusakan pada rumah jaga di karamba jaring apung	10	terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi tidak tercapai	perbaikan rumah jaga di karamba jaring apung	Kepala BBIAPL Kelas A	Desember 2025

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	Terhambatnya pelayanan kepelabuhanan yang diberikan kepada nelayan	12	Keterbatasan anggaran dalam peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana dan SDM di PPP Larangan	Penurunan nilai produksi perikanan tangkap dan ekonomi di PPP Larangan	Menyesuaikan dan merubah program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dan SDM di PPP Larangan dengan anggaran yang tersedia	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	12	Lokasi penanaman merupakan daerah rawan sedimentasi atau daerah yang harus dilakukan pembersihan lahan dengan anggaran yang besar	Target rehabilitasi mangrove yang sesuai dengan pembagian wilayah penanaman dari Bappeda Jateng tidak dapat terpenuhi	Pemantauan dan pendampingan pada saat pelaksanaan penanaman mangrove	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	1 Tahun

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	Terjadinya Peningkatan Kasus Pelanggaran	12	Kurangnya kepedulian pelaku usaha terhadap kelengkapan dokumen berusaha	Kapal perikanan beroperasi tanpa dilengkapi dokumen periznan yang berlaku	Peningkatan Intensitas Patroli	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	1 Tahun
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Ketertanggung jawabannya nahkoda dan ABK dari Instansi lain	16	Tidak ada tenaga Nahkoda dan ABK kapal pengawasan CDK Wil Selatan	Kegiatan pengawasan terhambat	Melatih Tenaga yang ada untuk mengikuti pelatihan Nakhoda	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	1 Tahun

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	12	Lokasi penanaman mangrove berada pada pesisir yang berbatasan langsung dengan laut	Target luas lahan penanaman mangrove yang direhabilitasi tidak terpenuhi	Survei lokasi sebelum dilakukan penanaman	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	1 Tahun
Kegiatan								

[illegible]

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Pelayanan tambat labuh tidak dapat dilaksanakan	15	Sedimentasi di sepanjang dermaga	Fasilitas plabuhan perikanan tidak dapat dimanfaatka n secara maksimal	Membuat usulan pengadaan anggaran pengerukan dan koordinasi dengan Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Kepala PPP Tawang	1 Tahun

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Dokumen administrasi pendukung pengembang an pelabuhan tidak tersusun	12	Data dukung pelabuhan perikanan tidak update dan akurat	Pengembang an pelabuhan perikanan terhambat	Melakukan penyusunan WKOPP, UKL UPL, KKPR, KKPRL	Kepala PPP Tawang	1 Tahun
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak berjalan	15	Dokumen perizinan kapal tidak lengkap	Ketidakatura n aktivitas perikanan tangkap	Mengadakan kegiatan Fasilitasi Perizinan berupa sosialisasi dan pendampingan nelayan	Kepala PPP Tawang	1 Tahun

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Mekanisme sewa lahan tidak sesuai peraturan yang berlaku	16	Kurangnya pengawasan	Layout kawasan pelabuhan tidak sesuai masterplan	Belum ada	Kepala PPP Tasikagung	Triwulan 4
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pengguna Layanan Pengujian	Media/reagen dan peralatan di laboratorium tidak tersedia, rusak dan kadaluarsa	12	Penambahan Ruang Lingkup disetiap laboratorium membutuhkan support peralatan dan media reagen	Parameter pengujian tertentu tidak dapat diujikan dan tidak tersertifikasi	Penyusunan rencana pengadaan media/reagen dan peralatan sesuai penambahan ruang lingkup pengujian	BLPKIL	1 Tahun

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkatkan Kompetensinya	Petugas laboratorium tidak kompeten dalam pengujian	12	Penyelenggara pelatihan tidak menyediakan jenis kompetensi penunjang kegiatan laboratorium	Kompetensi petugas laboratorium berpengaruh dalam penambahan ruang lingkup parameter pengujian	Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi secara swadaya dengan mengundang narasumber yang kompeten dan tersertifikasi	BLPKIL	1 tahun

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani	Hama Penyakit Ikan di lingkungan budidaya tidak terkendali	12	Monitoring dan pengendalian HPI tidak dilakukan diseluruh pembudidaya di Jawa Tengah	Produksi ikan budidaya menurun	Pelaksanaan monitoring pengendalian hama dan penyakit ikan di 35 lokasi	BLPKIL	1 Tahun
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Ketidakpuasan pelanggan dan terganggunya aktivitas pelayanan BLPKIL	12	Sarana dan prasarana yang tidak memadai	Kondisi barang dan peralatan kantor penunjang pelayanan rusak	Rehab/pemeliharaan gedung gantong dan Perbaikan Ruang laboratorium	BLPKIL	1 Tahun

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Bak pembenihan tidak dapat digunakan	10	Bak pembenihan retak/bocor/rus ak	Target produksi tidak tercapai	Perbaikan bak pembenihan	Kepala BBIAPL Kelas A	Desember 2025
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Adanya kerusakan pada rumah jaga di karamba jaring apung	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi tidak tercapai	Perbaikan rumah jaga di karamba jaring apung	Kepala BBIAPL Kelas A	Desember 2025

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut	Ketrampilan teknis pegawai stagnan	10	tidak adanya pelatihan ketrampilan teknis bagi pegawai	Kurang optimalnya produktivitas budidaya di masing- masing lokasi	peningkatan ketrampilan teknis pegawai	Kepala BBIAPL Kelas A	Desember 2025
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	Kolam bocor/retak/r usak	10	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan endemik tidak tercapai	Perbaiki kolam budidaya	Kepala BBIAPL Kelas A	Desember 2025

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	Kolam tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya	10	Adanya kebocoran pada kolam budidaya	target produksi tidak tercapai	Perbaiki kolam budidaya	Kepala BBIAPL Kelas A	Desember 2025
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	kolam tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya	10	Adanya kerusakan pada kolam pendederan dan pemijahan	target produksi benih tidak tercapai	Perbaiki kolam pendederan dan pemijahan	Kepala BBIAPL Kelas A	Desember 2025
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	Debit air yang masuk ke kolam berkurang	10	Adanya kerusakan pada saluran air	target produksi induk bermutu tidak tercapai	Perbaiki saluran air	Kepala BBIAPL Kelas A	Desember 2025

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	Kolam tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya	10	adanya kebocoran pada kolam budidaya	target produksi ikan konsumsi tidak tercapai	perbaiki kolam budidaya	Kepala BBIAPL Kelas A	Desember 2025
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	Bak pembenihan bocor/retak/r usak	10	Terdapat fasilitas budidaya benih yang kurang memadai	target produksi benih unggul tidak tercapai	Pembuatan unit produksi benih	Kepala BBIAPL Kelas A	Desember 2025

[illegible]

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	Pelanggaran kesepakatan pembayaran dari perjanjian sewa lahan yang sudah diterbitkan	12	Kurangnya kesadaran dari penyewa lahan untuk membayar retribusi sewa lahan	Target PAD retribusi sewa lahan yang tidak terpenuhi	Berkoordinasi dengan pihak aparatus penegak hukum yang beroperasi di kawasan pelabuhan perikanan agar bisa membantu menertibkan penyewa lahan	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember

[illegible]

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Akses keluar dan masuk kawasan pelabuhan yang semakin rusak dan sulit dilewati	12	Keterbatasan anggaran untuk perbaikan akses jalan masuk kawasan pelabuhan	Penurunan jumlah pengunjung dan pelaku usaha di kawasan PPP Larangan	Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah agar bisa memprioritaskan perbaikan akses jalan masuk kawasan PPP Larangan	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Kolam pelabuhan dan alur pelayaran yang semakin dangkal dan sempit	12	Keterbatasan Anggaran untuk perubahan pintu masuk dan perluasan kolam pelabuhan	Penurunan jumlah trip harian dan nilai produksi perikanan tangkap di PPP Larangan	Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah agar bisa memprioritaskan perubahan pintu masuk dan perluasan kolam PPP Larangan	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketampilannya	Waktu penyelesaian pelayanan yang lebih lama dengan kualitas yang rendah	12	Keterbatasan jumlah SDM pegawai di PPP Larangan yang kompeten dalam memberikan pelayanan	Penurunan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di PPP Larangan	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah agar bisa diadakan penambahan pegawai yang kompeten di PPP Larangan dan Menginformasikan kepada seluruh pegawai di PPP Larangan agar mengikuti setiap pengembangan kompetensi yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi lainnya sesuai dengan jabatan dan minat pegawai	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Desember

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya	Adanya praktek gratifikasi dalam pengadaan Hibah Sarpras Garam	10	Hubungan pertemanan/kek erabatan dan atau pihak penyedia menginginkan pekerjaan tersebut	Kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan	Proses pemilihan dilakukan secara profesional, terbuka dan segala proses pengadaan melalui aplikasi LPSE	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 tahun

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Ijin Usaha	Ikan hasil produksi, benih, dan pakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kriteria pasar	10	Pelaku usaha belum memahami pentingnya perizinan usaha budidaya (CPIB, CBIB, dan CPPIB)	Ikan konsumsi, benih, dan pakan yang dihasilkan tidak terjual dipasaran dan tidak dapat masuk ke pangsa pasar yang lebih luas	sosialisasi pentingnya perizinan usaha budidaya; pembinaan CPIB, CBIB, dan CPPIB	Kepala Bidang UPK	Desember 2025

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Pembudidaya tidak menerapkan teknologi budidaya secara berkelanjutan	12	Pembudidaya belum menguasai teknologi budidaya yang diterapkan	Bantuan yang diberikan mangkrak dan tidak dimanfaatkan kembali	- verifikasi penerima bantuan secara berjenjang - penelaahan proposal bantuan dengan lebih mendalam - sosialisasi dan pelatihan terkait teknologi budidaya yang akan diberikan ke pembudidaya sebelum bantuan diserahkan	Kepala Bidang UPK	Desember 2025
Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2025								

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Poklajsar yang Meningkat Usahnya	Dana hibah yang diberikan tidak dibelanjakan oleh kelompok penerima	12	Ada tindakan manipulatif/pen ggelapan dana oleh kelompok penerima	Kerugian aset negara/peme rintah	- verifikasi penerima bantuan secara berjenjang serta penelaahan proposal bantuan dengan lebih mendalam - penerima hibah mengirimkan laporan pertanggungjawa ban hibah	Kepala Bidang Usaha dan Pengembang an Komoditas	Desember 2025

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi	Tingkat kematian bibit mangrove pasca penanaman cukup tinggi dikarenakan lingkungan penanaman yang kotor, kriteria lokasi/sedime n kurang sesuai, pemeliharaan bibit tidak maksimal sebelum penanaman	12	Musim saat penanaman yang tidak mendukung, lahan tidak cocok	Bibit Mangrove tidak tumbuh/mati , bibit hilang karena ombak	- Pemilihan bibit mangrove yang baik - Pemilihan lokasi tanam yang sesuai habitatnya - Mencari waktu tanam sesudah musim Barat (menghindari gelombang dan cuaca ekstrim) - Adanya masa pemeliharaan 90 hari setelah penanaman	Kepala CDK Barat, Kasie Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan	2025
Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah			2025					

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi	Keselamatan petugas pada saat penenggela n Terumbu Karang Buatan (TKB)	12	TKB Berat dan gelombang laut yang tinggi	Kecelakaan Kerja (Luka/ Kematian)	- Pemantauan cuaca sebelum penenggela man TKB - Koordinasi dengan team penenggela man TKB untuk menghindari kecelakaan kerja	Kepala CDK Barat, Kasie Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan	2025

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	Meningkatnya pelanggaran kegiatan perikanan tangkap terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Kurangnya kepedulian nelayan terkait pentingnya pengurusan dokumen kapal dan penggunaan peralatan tangkap yang ramah lingkungan	Banyak ditemukan pelanggaran dokumen kapal, rusaknya lingkungan karena pemakaian peralatan tidak ramah lingkungan	- Koordinasi dan Sosialisasi di Desa/ Dinas Kab/Kota terkait pentingnya pengurusan dokumen kapal	Kepala CDK Barat, Kasie Pengawasan	2025

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan	Keselamatan Petugas Pengawasan	12	Kondisi kapal tidak terawat, cuaca buruk, kurang keahlian personil ABK	Mesin kapal rusak saat di laut, kecelakaan saat di laut	- Pemeliharaan kapal secara rutin - Peningkatan kompetensi ABK	Kepala CDK Barat, Kasie Pengawasan	2025

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan	Rendahnya intensitas patroli pengawasan SDKP dengan speedboat	12	Rendahnya intensitas patroli pengawasan SDKP dengan speedboat	Banyak pelaku usaha dan kapal perikanan yang beroperasi tidak terperiksa	Penambahan anggaran operasional dan pemeliharaan speedboat secara rutin (pemanasan harian, service bulanan dan Docking Speedboat Napoleon 3303)	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	1 Tahun

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak terpenuhinya pembayaran tarif listrik	12	Kenaikan tarif listrik yang tidak bisa diprediksi	Tidak dapat dilakukan pembayaran listrik	Perencanaan anggaran tahun yang akan datang dinaikkan anggaran tarif listriknya	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	1 Tahun

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi	Penanaman Mangrove yang ditanam pada lokasi yang telah ditentukan mengalami kerusakan, kematian, atau hilang terkena ombak	12	Kondisi cuaca dipesisir pantura yang extrem	Tingkat kelulus hidupan mangrove yang ditanam sangat rendah	Survei lokasi penanaman mangrove	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	1 Tahun

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi	Penanaman Mangrove yang ditanam pada lokasi yang telah ditentukan mengalami kerusakan, kematian, atau hilang terkena ombak	12	Kondisi cuaca dipesisir pantura yang extrem	Tingkat kelulus hidupan mangrove yang ditanam sangat rendah	Dilakukan pemeliharaan setelah penanaman	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	3 bulan setelah penanaman

Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Tidak terpenuhinya penilaian EVIKA	12	Kurangnya pemahaman pengelola dalam mengelola kawasan konservasi	Terjadi penurunan nilai EVIKA	Melakukan monitoring target biofisik dikawasan konservasi	Kepala cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	1 Tahun
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Biota target di kawasan konservasi mengalami penurunan	12	Kurangnya pemahaman masyarakat terkiat kawasan konservasi	Sumber Daya Ikan di sekitar Kawasan Konservasi berkurang	Sosialisasi kawasan konservasi	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	1 tahun

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Penyusunan Renja Tahun 2025 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.

Dokumen perencanaan tahun 2025 utamanya RKPD 2025 yang menjadi pedoman penyusunan Renja PD 2025 merupakan dokumen yang cukup penting. Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026, sehingga RKPD Tahun 2025 memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026, dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan risiko menjadi faktor penting bagi tercapainya tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yaitu Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah. Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih tepat sasaran dan juga efektif serta efisien dalam memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan *good governance* bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN

Tabel 1
Indentitas Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan	Menurunnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Risiko Strategis	Semakin jauhnya wilayah tangkapan ikan, adanya hama penyakit ikan, cuaca buruk dan tingginya biaya operasi/produksi	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Masyarakat
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Garam	Produksi garam	Tingginya curah hujan dan proses produksi tradisional	Risiko Operasional	Petambak garam tidak dapat berproduksi sepanjang tahun	Produktifitas petambak garam rendah	Masyarakat
3	Sasaran Program	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan	Masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya konsumsi ikan	Risiko Operasional	Rendahnya konsumsi ikan masyarakat	kekurangan gizi pada masyarakat	Masyarakat
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Penurunan SDI dan cuaca buruk	Risiko Strategis	Produksi perikanan tangkap menurun	Kesejahteraan nelayan rendah	Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sasaran Strategis	Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Terjadinya serangan hama penyakit ikan, cuaca buruk dan tingginya biaya produksi	Risiko Strategis	Rendahnya volume produksi perikanan budidaya	Kesejahteraan pembudidaya ikan rendah	Masyarakat
6	Sasaran Program	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	Masih adanya IUU dan kegiatan masyarakat yang merusak SDKP	Risiko Kepatuhan	Kurangnya patroli pengawasan SDKP	Rusaknya SDKP di Jawa Tengah	Masyarakat
7	Sasaran Program	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Personil OPD tidak mempunyai orientasi pelayanan	Risiko Reputasi	Pelayanan lambat	Buruknya tingkat pelayanan kepada masyarakat	Masyarakat
8	Sasaran Program	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Kurang pemahaman identifikasi risiko	Risiko Reputasi	Kurangnya sosialisasi SPIP	Risiko tidak teridentifikasi	OPD

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Program/kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kurangnya pengendalian	Risiko Strategis	Rendahnya integritas ASN	Tidak tercapainya target program/kegiatan	Pemda, OPD dan masyarakat
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Capaian Kinerja Rendah	Risiko Operasional	Kapasitas SDM Kurang Memadai	Kinerja Perangkat Daerah Tidak Mencapai Target	PEMDA
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase produksi perikanan tangkap	Jumlah ikan hasil tangkapan di laut jawa menurun	Risiko Strategis	Kerusakan habitat ikan	Lokasi penangkapan ikan semakin jauh dan kebutuhan perbekalan melaut bertambah	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan tangkap

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Indeks harga yang diterima oleh nelayan	Nelayan kecil tidak mendapatkan jaminan perlindungan kecelakaan kerja saat melaksanakan kegiatan penangkapan ikan	Risiko Strategis	Pendapatan nelayan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari	Nelayan/keluarga nelayan tidak mendapatkan santunan saat terjadi kecelakaan	Pemerintah dan rumah tangga perikanan
3	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase lokasi yang dilindungi sumber dayanya	Terjadinya penurunan kelestarian sumberdaya ikan	Risiko Kepatuhan	1. Tingkat pendidikan nelayan/SDM masih rendah; 2. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dengan metode/teknologi yang turun temurun	1. Degradasi sumber daya ikan dan lingkungan; 2. Konflik Nelayan; 3. Pendapatan Nelayan/tingkat kesejahteraan menurun	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan tangkap

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	Ketidakcakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah	Risiko Operasional	Ketidakcakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah.	Pelayanan kepelabuhanan tidak terlaksana secara optimal.	PPP Tegalsari dan penerima layanan kepelabuhanan di PPP Tegalsari.
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Ketidakcakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah.	Operasional kedinasan tidak terpenuhi dan tidak berjalan optimal sesuai dengan indikator kinerja.	PPP Tegalsari dan pelaku usaha Perikanan Tangkap
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemtoyong	Pelayanan kepada masyarakat kawasan PPP Asemtoyong tidak berjalan dengan baik	Risiko Operasional	Tidak Tersedia Fasilitas Sarana Kebersihan di PPP Asemtoyong secara memadai	Masyarakat Pengguna Kawasan Tidak Terfasilitasi Sarana Kebersihannya dengan Baik	Pengguna Kawasan, Nelayan dan Pelaku Usaha

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Tidak Berjalan dengan Baik dan Nyaman	Risiko Operasional	Kurangnya sarana pas masuk yang nyaman dan representatif bagi petugas	Pendapatan Retribusi Pas Masuk berkurang	Pengguna kawasan, Masyarakat dan Kantor PPP Asemdayong
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Kekurangan SDM yang berkompeten dibidangnya, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah	Operasional kedinasan tidak terpenuhi dan tidak berjalan optimal sesuai dengan indikator kinerja.	PPP Asemdayong
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan kepelabuhanan	Risiko Operasional	Ketidaccakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah.	Pelayanan kepelabuhanan tidak terlaksana secara optimal.	PPP Wonokerto dan penerima layanan kepelabuhanan di PPP Wonokerto.

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Ketidakcakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah.	Operasional kedinasan tidak terpenuhi dan tidak berjalan optimal sesuai dengan indikator kinerja.	PPP Wonokerto dan pelaku usaha Perikanan Tangkap
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	Peraturan Pemerintah yang terkait dengan kepelabuhanan dapat dilaksanakan dengan lancar	Risiko Operasional	Pelayanan tidak terganggu	pelaku usaha merasa puas dengan pelayanan di PPP Klidang Lor	pegawai dan stakeholder
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Target dan realisasi program kegiatan tercapai	Risiko Operasional	Pelayanan terganggu	Pelayanan tidak terganggu	pegawai dan stakeholder

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	Pengelolaan perikanan tangkap yang telah ditetapkan belum bisa dilaksanakan dengan baik	Risiko Operasional	Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penangkapan ikan belum memadai	Nilai produksi perikanan tangkap dan ekonomi menurun	Masyarakat, PPP Tawang
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Pengelolaan pelayanan publik belum dilaksanakan dengan baik	Risiko Operasional	Sumber Daya Manusia (SDM) belum terampil	Nilai indeks kepuasan masyarakat menurun	Pengguna jasa, PPP Tawang
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	Pelayanan kepelabuhanan tidak tercapai	Risiko Operasional	Pelayanan buruk dan sarpras tidak memadai	Nelayan tidak dapat melaut dan mendaratkan ikan	Nelayan, Masyarakat
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah tidak tercapai	Risiko Operasional	Keterbatasan SDM (PNS dan PPPK) yang ditugaskan di PPP Morodemak	Pelayanan eksternal (kepada masyarakat) dan pelayanan internal (kepegawaian, keuangan) kurang optimal	Pegawai PPP Morodemak dan Masyarakat Pengguna Jasa

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	Jumlah Staf yang belum memenuhi kebutuhan di Analisis Beban Kerja (ABK)	Risiko Operasional	Kebijakan di level OPD terkait pembatasan perekrutan tenaga honorer serta kurangnya penambahan jumlah pegawai ASN pada PPP Bajomulyo	Pelayanan kepelabuhanan tidak terlaksana dengan optimal	PPP Bajomulyo dan Masyarakat Penerima Layanan Kepelabuhanan
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Kurang tertatanya manajemen kepegawaian di PPP Bajomulyo	Risiko Operasional	Perangkapan jabatan Sub Koor Tata Kelola dan Pelayanan Usaha dengan Plt Kasubbag TU dan terbatasnya jumlah staf sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum berjalan optimal	Keterlambatan pelaporan hasil evaluasi SKP dan keterlambatan penyusunan dokumen pengadaan pegawai non ASN pada tahun berikutnya	Pegawai ASN dan Non ASN PPP Bajomulyo, Sub Bag Umpeg DKP Jateng
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	Ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung rendah	Risiko Operasional	- Keterbatasan jumlah, kompetensi dan integritas SDM - Belum adanya investor	Kegiatan penangkapan ikan terhambat	Pelaku usaha penangkapan ikan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah yang tersedia rendah	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dan SDM	Operasional pelabuhan terganggu	PPP Tasikagung dan penerima layanan
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan kepelabuhan	Risiko Operasional	Ketidakcakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah	Pelayanan kepelabuhanan tidak terlaksana secara optimal	PPP Karimunjawa dan penerima layanan kepelabuhanan
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Ketidakcakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah	Operasional kedinasan tidak terpenuhi dan tidak berjalan optimal sesuai dengan indikator kinerja.	PPP Karimunjawa dan pelaku usaha Perikanan Tangkap

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	Pelayanan Kepelabuhan tidak maksimal	Risiko Reputasi	Tidak tersedianya sapras yang memadai	Rendahnya kepuasan publik atas layanan PPP Lohgending	PPP Lohgending, masyarakat nelayan
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta pengawasan dan keamanan operasional pelabuhan tidak berjalan optimal	Risiko Operasional	kurangnya sapras dan pengawasan kegiatan nelayan di kawasan pelabuhan	Pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan dan kegiatan operasional kapal perikanan tidak optimal, Jumlah kapal di kawasan pelabuhan kurang termonitor	PPP Lohgending, Masyarakat nelayan
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan	Risiko Operasional	kurangnya fasilitas yang memadai	pemanfaatan Fasilitas pelabuhan terlaksana kurang optimal	PPP Lohgending, Masyarakat pelaku usaha perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	percepatan pengembangan pelabuhan terhambat	Risiko Operasional	Belum adanya sertifikat tanah pelabuhan sebagai salah satu bentuk penguasaan terhadap suatu wilayah kerja	Penyusunan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) terhambat	PPP Lohgending
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	kurangnya fasilitas pokok, penunjang, fungsional yang dimiliki pelabuhan	Risiko Operasional	sapras tidak memadai	Kegiatan operasional pelabuhan terhambat	PPP Lohgending, Nelayan
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	nelayan belum terjamin oleh asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran nelayan/pemilik kapal akan pentingnya asuransi	Nelayan tidak memperoleh santunan jika terjadi laka laut	PPP Lohgending, Nelayan
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	SDM tidak kompeten dan kurang terampil	Risiko Operasional	SDM tidak cakap melayani	Pelayanan PPP Lohgending tidak optimal	PPP Lohgending, Nelayan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Pelayanan dan kinerja terhambat	Risiko Operasional	Pegawai tidak kompeten	kegiatan Operasional kedinasan tidak terpenuhi, nilai kepuasan msyarakat menurun	PPP Lohgending
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Kegiatan pelayanan administasi tidak berjalan oprimal	Risiko Operasional	Terbatasnya perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan administrasi kantor	Kegiatan operasional kantor dan Pelayanan tidak optimal	PPP Lohgending
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Anggaran yang telah disusun tidak mencukupi untuk pembayaran tagihan langganan	Risiko Operasional	Adanya kenaikan tarif biaya langganan listrik/air/telepon/internet di tahun berjalan yang tidak dapat di prediksi	Anggaran yang tersedia tidak mencukupi biaya tagihan langganan sehingga menyebabkan silpa dan tagihan langganan di akhir tahun dibayarkan oleh kantor induk	PPP Lohgending

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah	Risiko Operasional	Barang Milik Daerah yang rusak tidak dapat diperbaiki	kegiatan pelayanan dan operasional kantor terhambat	PPP Lohgending
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	Wabah penyakit ikan tertentu tidak tertangani	Risiko Operasional	Kompetensi dan fasilitas pengujian belum ada	Sebaran Hama dan Penyakit Ikan semakin meluas	BLPKIL dan Pelaku Usaha
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Kegiatan operasional tidak berjalan dengan baik	Risiko Operasional	SOP operasional tidak diterapkan	Ketidakpuasan pelanggan dan penurunan kinerja pegawai	BLPKIL dan Pelanggan
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase produksi ikan konsumsi air laut	adanya kerusakan pada rumah jaga di karamba jaring apung	Risiko Operasional	terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi tidak tercapai	pemerintah dan stakeholder

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	terdapat kebutuhan pegawai dan fasilitas yang kurang memenuhi standar untuk menunjang urusan pemerintahan	kegiatan operasional kedinasan tidak terpenuhi dan tidak berjalan optimal sesuai dengan indikator kinerja	pemerintahan
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	Terhambatnya pelayanan kepelabuhanan yang diberikan kepada nelayan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana dan SDM di PPP Larangan	Penurunan nilai produksi perikanan tangkap dan ekonomi di PPP Larangan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Terhambatnya pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam peningkatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di PPP Larangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang tidak bisa dilaksanakan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	Tingkat pelanggaran sangat tinggi	Risiko Operasional	Pelaku usaha tidak memahami Peraturan perundang - undang	Pemerintah rugi, kegiatan usaha terganggu	Pelaku usaha, Masyarakat dan pemerintah
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase produksi garam	Target produksi garam tidak tercapai	Risiko Strategis	1. Pendataan jumlah produksi garam yang tidak tercatat secara berkala dan kontinyu 2. Terjadi kemarau basah	Data produksi garam menurun/rendah	Pemerintah dan petambak garam
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	Tidak ada penetapan kawasan konservasi hasil rezonasi Kawasan Konservasi Ujungnegoro oleh Menteri Kelautan dan Perikanan	Risiko Operasional	Hasil kajian rezonasi Kawasan Konservasi Ujungnegoro tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi	Penurunan kualitas dan habitat ekosistem pesisir Kawasan Konservasi Ujungnegoro	pemerintah daerah, nelayan, masyarakat pesisir, pelaku usaha perikanan kelautan
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Pembudidaya tidak lagi melakukan kegiatan budidaya	Risiko Strategis	harga pakan ikan yang semakin mahal, cuaca ekstrim, benih ikan yang digunakan tidak unggul	produksi perikanan budidaya menurun	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Tidak tercapainya produksi perikanan budidaya	Risiko Strategis	Produksi perikanan budidaya tidak terdata	Data produksi perikanan budidaya tidak valid	Pemerintah, Masyarakat, Pembudidaya
3	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	Pengurangan jumlah produksi oleh pembudidaya	Risiko Operasional	Ketersediaan air untuk kegiatan budidaya rendah (musim kemarau), tren harga ikan yang menurun	Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya rendah	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan
4	Sasaran Program	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan ikan	Tidak tercapainya produksi olahan ikan	Risiko Strategis	Produksi Olahan Ikan tidak terdata	Data produksi olahan ikan tidak valid	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha Perikanan
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	Lokasi penanaman mangrove yang dilakukan belum sesuai dengan pembagian lokasi penanaman dari Bappeda Jateng	Risiko Operasional	Kurangnya informasi lahan untuk penanaman mangrove yang sesuai dengan pembagian lokasi dari Bappeda Jateng	Luas lahan penanaman mangrove yang direhabilitasi tidak terpenuhi	Masyarakat pesisir

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	Meningkatnya pelanggaran kegiatan perikanan tangkap terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Risiko Operasional	Kurangnya kepedulian nelayan terkait pentingnya pengurusan dokumen kapal dan penggunaan peralatan tangkap yang ramah lingkungan	Banyak ditemukan pelanggaran dokumen kapal, rusaknya lingkungan karena pemakaian peralatan tidak ramah lingkungan	Masyarakat dan Lingkungan
3	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	Keselamatan Petugas Pengawasan,	Risiko Operasional	Mesin kapal rusak saat di laut, kecelakaan saat di laut	Kondisi kapal tidak terawat, cuaca buruk, kurang keahlian personil ABK	OPD
4	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Kurang tertatanya kepegawaian di CDK Barat	Risiko Operasional	Pembagian pekerjaan kurang merata	Kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian terhambat	Pegawai CDK Barat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	Risiko Operasional	Lokasi penanaman merupakan daerah rawan sedimentasi atau daerah yang harus dilakukan pembersihan lahan dengan anggaran yang besar	Target rehabilitasi mangrove yang sesuai dengan pembagian wilayah penanaman dari Bappeda Jateng tidak dapat ternenuhi	Masyarakat pesisir
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	Terjadinya Peningkatan Kasus Pelanggaran	Risiko Operasional	Kurangnya kepedulian pelaku usaha terhadap kelengkapan dokumen berusaha	Kapal perikanan beroperasi tanpa dilengkapi dokumen periznan yang berlaku	Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	Intensitas patroli pengawasan yang rendah	Risiko Operasional	Tidak terawasinya WPPNRI	Terjadinya peningkatan IUU Fishing	Masyarakat dan Lingkungan
4	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	Intensitas patroli pengawasan yang rendah	Risiko Operasional	Tidak terawasinya WPPNRI	Terjadinya peningkatan IUU Fishing	Masyarakat dan Lingkungan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Ketergantungan nahkoda dan ABK dari Instansi lain	Risiko Operasional	Tidak ada tenaga Nahkoda dan ABK kapal pengawasan CDK Wil Selatan	Kegiatan pengawasan terhambat	Tim Pengawasan
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	Risiko Operasional	Lokasi penanaman mangrove berada pada pesisir yang berbatasan langsung dengan laut	Target luas lahan penanaman mangrove yang direhabilitasi tidak terpenuhi	Masyarakat pesisir, Pemerintah Daerah, Lingkungan fisik yang ada di lokasi
2	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	Pelaku usaha belum mengetahui peraturan terkait Perijinan Berusaha	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha bidang Kelautan dan Perikanan terhadap peraturan perundang-undangan bidang Kelautan dan Perikanan yang berlaku	Pelaku usaha tidak tertib aturan	Pemerintah Daerah, Masyarakat, pemangku kepentingan/stakeholder dan Lingkungan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	Pelaku usaha/Nelayan tidak memiliki dokumen perizinan yang lengkap	Risiko Operasional	Periode patroli pengawasan yang rendah	Pelaku usaha tidak tertib	Nelayan/Pelaku usaha/Pemilik Kapal
4	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	Tidak terawasinya WPPNRI 712 wilayah perairan pantai utara bagian timur dari kegiatan Unreported and Unregulated (IUU) Fishing	Risiko Operasional	1. Periode patroli pengawasan yang rendah 2. Kondisi kapal pengawas perikanan perlu untuk pemeliharaan dan perawatan (docking)	Kasus IUU meningkat	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lingkungan
5	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Kurang tertatanya kepegawaian di CDK Timur	Risiko Operasional	Belum terisinya Kepala Subbag TU pada CDK Timur	Kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian terhambat	Pegawai CDK Timur

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Kurang tertatanya kepegawaian di CDK Wilayah Timur	Risiko Operasional	Pembagian pekerjaan kurang merata	Kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian terhambat	Pegawai CDK Wilayah Timur
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	Penurunan jumlah dokumen kelayakan yang diterbitkan mencakup Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertiikat Hasil Analisis (Certificate Analysis Test) hasil perikanan	Risiko Strategis	Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau pelaku usaha hasil perikanan belum memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar, dan belum mampu menghasilkan produk olahan hasil perikanan yang berkualitas sesuai standar	Menurunnya daya saing produk hasil perikanan Provinsi Jawa Tengah serta belum dapat memenuhi tuntutan pasar akan produk hasil perikanan yang berkualitas	Pelaku usaha perikanan, UPI, masyarakat umum
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Penyediaan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah tidak dapat berjalan secara optimal	Risiko Strategis	Sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran yang belum mencukupi	Turunnya tingkat kepuasan masyarakat serta kinerja organisasi tidak optimal	Masyarakat umum

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Lambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi	Risiko Operasional	Tidak tersediannya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi	Pelaksanaan program tidak terencana dan tidak dievaluasi	OPD
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Terlambatnya penyampaian data kepegawaian	Risiko Fraud	Pegawai Tidak menyampaikan pembaharuan data terkait kepegawaian	Pegawai menerima Kelebihan Gaji dan Tunjangan	Dinas
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terlambatnya klaim asuransi barang milik daerah (gedung dan kendaraan)	Risiko Operasional	Lamanya administrasi pengajuan klaim	Terlambatnya pencairan klaim	OPD
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Pemahaman regulasi kepegawaian yang kurang	Risiko Operasional	Penyampaian informasi yang tidak merata	Keterlambatan penyampaian informasi kepegawaian yang terbaru	OPD

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Tidak lengkapnya dokumen kepegawaian masing masing ASN	Risiko Operasional	Kesadaran ASN yang kurang dalam memenuhi dokumen kepegawaian	Keterlambatan pelayanan kepegawaian	OPD
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Pengadaan BMD masih belum semua terakomodir TKDN	Risiko Strategis	Tidak semua merk luar ber TKDN	Sedikit pilihan dalam menentukan pengadaan BMD	OPD
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Pagu dalam penyediaan jasa penunjang belum memadai	Risiko Strategis	Pagu dalam penyediaan jasa penunjang belum memadai	Tidak semua Barang milik daerah dapat dipelihara dengan baik	OPD
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Pemeliharaan barang milik daerah tidak optimal	Risiko Operasional	Pagu anggaran tidak mencukupi dengan BMD yang ada	Tidak semua BMD dapat dipelihara dengan maksimal	OPD

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Nelayan yang memperoleh perlindungan	Nelayan kecil tidak mendapatkan bantuan premi asuransi nelayan	Risiko Operasional	Nelayan kecil belum memiliki kartu identitas nelayan	100% 11 Q16 Nelayan tidak mendapatkan pertanggunggunaan apabila terjadi kecelakaan kerja ☐ Nelayan tidak mendapatkan pertanggunggunaan apabila terjadi kecelakaan kerja	Pemerintah dan nelayan kecil

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah pelabuhan yang menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan	Penyedia memberikan gratifikasi agar terhadap item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dapat diterima dan dibayarkan 100%	Risiko Fraud	PPK tidak mempunyai kompetensi keahlian pada pekerjaan konstruksi bangunan pelabuhan perikanan	kualitas tidak sesuai spesifikasi sehingga dapat mempengaruhi umur bangunan dan terjadi kerugian negara	Pemerintah dan pelaku usaha perikanan tangkap
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan yang didaratkan	Data produksi perikanan tangkap belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya di daerah	Risiko Operasional	Ikan hasil tangkapan tidak dilaporkan seluruhnya	data dukung untuk menentukan kebijakan pemerintah sektor kelautan dan perikanan kurang valid	Pemerintah dan pelaku usaha perikanan tangkap

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan	Ketertiban nelayan yang rendah dalam melengkapi dokumen kapal perikanan sesuai aturan yang berlaku dan memberikan gratifikasi untuk dibantu dipercepat dokumen perizinannya	Risiko Fraud	'Keterbatasan kemampuan SDM nelayan dalam mengurus perijinan kapal secara online	1. Denda Administrasi kepada nelayan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen kapal sesuai aturan yang berlaku; 2. Nelayan tidak bisa berangkat melaut	Pelaku Usaha Sektor Perikanan Tangkap
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Kapal Perikanan yang menerapkan teknologi Penangkapan Ikan	Nelayan tidak dapat melakukan penangkapan ikan secara efektif dan efisien	Risiko Operasional	Minimnya teknologi penangkapan ikan yang dimiliki nelayan	biaya operasional semakin besar dan ikan hasil tangkapan berkurang	Pemerintah dan Pelaku Usaha Sektor Perikanan Tangkap

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah nelayan yang meningkat ketrampilan dan kompetensi	Nelayan/awak kapal perikanan tidak dapat bekerja sesuai dengan prosedur diatas kapal	Risiko Operasional	'Nelayan/awak kapal perikanan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang minim mengenai keselamatan kerja dan prosedur kerja di atas kapal	1. Resiko kecelakaan pada kapal perikanan; 2.Nelayan tidak bisa mendapatkan sertifikat keterampilan dan kompetensi	Pemerintah dan Pelaku Usaha perikanan tangkap/ Nelayan
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah lokasi yang dilindungi SDI nya	Terjadinya penurunan stok sumberdaya ikan dan kerusakan lingkungan	Risiko Kepatuhan	Adanya nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan karena memberikan keuntungan finansial dan hasil tangkapan lebih banyak;	Degradasi sumber daya ikan dan lingkungan dan potensi konflik antar Nelayan;	'Pemerintah, Pelaku usaha sektor perikanan tangkap dan - Masyarakat Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	Risiko Kepatuhan	Kurangnya kesadaran masyarakat perikanan tangkap terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	Banyak kapal yang tidak memiliki dokumen perikanan lengkap sehingga rawan terjadi pelanggaran dan tertangkap oleh penegak hukum	DKP Prov. Jateng, PPP Tegalsari, dan pelaku usaha Perikanan Tangkap
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran masyarakat perikanan tangkap terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Banyak kapal yang tidak memiliki dokumen perikanan lengkap sehingga rawan terjadi pelanggaran dan tertangkap oleh penegak hukum	DKP Prov. Jateng, PPP Tegalsari, dan pelaku usaha Perikanan Tangkap

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Tidak tersusunnya dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Risiko Operasional	Kekurangan data pendukung yang akurat dalam penyusunan dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan dan kondisi kawasan pelabuhan yang sudah berubah	Pengembangan kawasan Pelabuhan Perikanan tidak optimal	PPP Tegalsari dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Fasilitas Pelabuhan Perikanan banyak mengalami kerusakan (sedang dan parah)	Risiko Operasional	Kondisi wilayah pelabuhan yang terkena rob dan minimnya anggaran untuk pembangunan kawasan PPP Tegalsari	Fasilitas Pelabuhan Perikanan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal	PPP Tegalsari dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Pemilihan/penujukan penyedia jasa oleh Tim Pokja PBJ yang tidak kompeten	Risiko Fraud	Persekongkolan yang dilakukan oleh Tim Pokja PBJ dengan calon penyedia jasa; penurunan harga penawaran sampai dibawah 80%; gratifikasi dan suap	Penurunan kualitas output pekerjaan dengan kemungkinan terburuknya adalah putus kontrak; memburuknya citra/image Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng, PPP Tegalsri dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Melakukan pendampingan dan pengawasan dengan menggandeng Tim Pengawasan Eksternal (contoh: TP4D) mulai proses pemilihan penyedia jasa sampai pekerjaan selesai	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran nelayan terhadapnya pentingnya asuransi atau perlindungan	Nelayan tidak mendapatkan jaminan perlindungan untuk menghindari resiko yang dialami ketika bekerja	Nelayan
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	SDM yang kurang kompeten dan terampil	Risiko Operasional	Kurangnya informasi dan akses mengenai diklat-diklat kompetensi terkait serta keterbatasan anggaran untuk mengikuti diklat kompetensi	Pelayanan tidak maksimal karena SDM yang kurang kompeten dan terampil	PPP Tegalsari dan pengguna pelayanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pelayanan administrasi umum daerah belum sesuai standar	Risiko Operasional	SDM kurang kompeten, anggaran terbatas	Kepuasan masyarakat terhadap layanan berkurang, banyak keluhan yang disampaikan	DKP, PPP Tegalsari, dan Masyarakat pengguna jasa
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Risiko Operasional	Pegawai kurang kompeten	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan dilaporkan	PPP Tegalsari
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	BMD dan kendaraan operasional mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dan kesulitan dalam penghapusan BMD	Pemanfaatan BMD kurang optimal.	PPP Tegalsari dan pengguna jasa kawasan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Tidak ada nya petugas syahbandar yang menetap di PPP Asemdayong	Risiko Operasional	Petugas syahbandar tidak berfungsi dengan maksimal karena alih tugas di Dinas Non sector kelautan dan perikanan	Penerbitan SPB tidak maksimal	Nelayan, Pemilik kapal
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Fasilitas pelabuhan kurang memadai dan banyak yang mengalami penurunan fungsi	Risiko Operasional	Banyaknya kapal yang melakukan bongkar ikan melebihi kapasitas dermaga, dan letak pelabuhan di DAS sungai elon sehingga tetjadi pendangkalan terutama di muara sungai	Terjadi antrian yang panjang saat lelang pada musim ikan dan nelayan mengalami kesulitan pada saat keluar dan masuk pelabuhan.	PPP Asemdayong dan masyarakat nelayan.
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Tidak tersusunnya dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Risiko Operasional	Kekurangan data pendukung yang akurat dalam penyusunan dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan dan kondisi kawasan pelabuhan yang sudah berubah	Pengembangan kawasan Pelabuhan Perikanan tidak optimal	PPP Asemdayong

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Pelayanan kepada masyarakat kawasan PPP Asemdayong tidak berjalan dengan baik	Risiko Operasional	Tidak Tersedia Fasilitas Sarana Kebersihan di PPP Asemdayong secara memadai	Masyarakat Pengguna Kawasan Tidak Terfasilitasi Sarana Kebersihannya dengan Baik	Pengguna Kawasan, Nelayan dan Pelaku Usaha
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Pelaku usaha tidak memiliki sumber air bersih yang cukup	Risiko Operasional	Tidak Tersedia Fasilitas Sumber Air Bersih yang memadai bagi para pelaku usaha kawasan PPP Asemdayong	Pelaku usaha kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih guna mendukung usahanya	Pelaku Usaha, Masyarakat dan Pemerintah
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Fasilitas pelabuhan kurang memadai dan banyak yang mengalami penurunan fungsi	Risiko Operasional	Banyaknya kapal yang melakukan bongkar ikan melebihi kapasitas dermaga, dan letak pelabuhan di DAS sungai elon sehingga terjadi pendangkalan terutama di muara sungai	Terjadi antrian yang panjang saat lelang pada musim ikan dan nelayan mengalami kesulitan pada saat keluar dan masuk pelabuhan.	PPP Asemdayong dan masyarakat nelayan.

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Nelayan tidak memahami mengenai pentingnya asuransi	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran nelayan terhadapnya pentingnya asuransi atau perlindungan	Nelayan tidak mendapatkan jaminan perlindungan untuk menghindari resiko yang dialami ketika bekerja	Nelayan
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	ABK tidak terlindungi hak nya dalam pemenuhan pendapatan dan jaminan kerja	Risiko Operasional	Tidak ada PKL sebagai dasar ABK bekerja dengan hasil yang memadai	ABK tidak terlindungi haknya secara proporsional	Pemilik Kapal, ABK dan Pemerintah
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	Pelayanan pada masyarakat tidak optimal	Risiko Operasional	Tidak Tersedia Informasi Kantor Pelabuhan Secara Memadai	Masyarakat Pengguna Layanan Tidak Mengetahui dengan jelas Keberadaan Kantor PPP Asemdayong	Masyarakat dan Stakeholder

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	SDM yang kurang kompeten dan terampil	Risiko Operasional	Keterbatasan penyelenggaraan diklat baik jumlah peserta maupun jenis kompetensinya.	Pelayanan tidak sesuai standar sehingga pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	PPP Asemdayong dan pengguna jasa layanan
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pelayanan administrasi umum daerah belum sesuai standar	Risiko Operasional	SDM kurang kompeten, anggaran terbatas	Kepuasan masyarakat terhadap layanan berkurang, banyak keluhan yang disampaikan	DKP, PPP Asemdayong, dan Masyarakat pengguna jasa
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Risiko Operasional	Pegawai kurang kompeten	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan dilaporkan	PPP Asemdayong

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	BMD dan kendaraan operasional mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dan kesulitan dalam penghapusan BMD	Pemanfaatan BMD kurang optimal.	PPP Asemboyong dan pengguna jasa kawasan
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	Risiko Kepatuhan	Kurangnya kesadaran masyarakat perikanan tangkap terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	Banyak kapal yang tidak memiliki dokumen perikanan lengkap sehingga rawan terjadi pelanggaran dan tertangkap oleh penegak hukum	DKP Prov. Jateng, PPP Wonokerto, dan pelaku usaha Perikanan Tangkap

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Tidak tersusunnya dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Risiko Operasional	Kekurangan data pendukung yang akurat dalam penyusunan dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan dan kondisi kawasan pelabuhan yang sudah berubah	Pengembangan kawasan Pelabuhan Perikanan tidak optimal	PPP Wonokerto dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Fasilitas Pelabuhan Perikanan banyak mengalami kerusakan (sedang dan parah)	Risiko Operasional	Kondisi wilayah pelabuhan yang terkena rob dan minimnya anggaran untuk pembangunan kawasan PPP Wonokerto	Fasilitas Pelabuhan Perikanan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal	PPP Wonokerto dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Pemilihan/penunjukan penyedia jasa oleh Tim Pokja PBJ yang tidak kompeten	Risiko Fraud	Persekongkolan yang dilakukan oleh Tim Pokja PBJ dengan calon penyedia jasa; penurunan harga penawaran sampai dibawah 80%; gratifikasi dan suap	Penurunan kualitas output pekerjaan dengan kemungkinan terburuknya adalah putus kontrak; memburuknya citra/image Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng, PPP Wonokerto dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Melakukan pendampingan dan pengawasan dengan menggandeng Tim Pengawasan Eksternal (contoh: TP4D) mulai proses pemilihan penyedia jasa sampai pekerjaan selesai	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran nelayan terhadapnya pentingnya asuransi atau perlindungan	Nelayan tidak mendapatkan jaminan perlindungan untuk menghindari resiko yang dialami ketika bekerja	Nelayan
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	SDM yang kurang kompeten dan terampil	Risiko Operasional	Kurangnya informasi dan akses mengenai diklat-diklat kompetensi terkait serta keterbatasan anggaran untuk mengikuti diklat kompetensi	Pelayanan tidak maksimal karena SDM yang kurang kompeten dan terampil	PPP Wonokerto dan pengguna pelayanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pelayanan administrasi umum daerah tidak optimal dan sesuai standar layanan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dan SDM tidak kompeten	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan menurun karena tidak sesuai dengan standar pelayanan	DKP Prov. Jateng, PPP Wonokerto, dan pengguna layanan
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan penyediaan jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	Risiko Operasional	Pegawai tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan dilaporkan	PPP Wonokerto
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah, serta lambatnya proses penghapusan aset yang rusak	Aset dan Barang milik pemerintah yang sudah tidak bisa dipakai	PPP Wonokerto dan pengguna kawasan (pengguna aset)
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	pelayanan fungsi pemerintahan sudah berjalan lancar	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dan sarpras	pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha belum optimal	pegawai, nelayan dan pelaku usaha

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	perlu peningkatan fasilitas loss ikan	Risiko Operasional	belum tersediayanya loss ikan karena masih swadaya dari penyewa	pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha berjalan lancar	nelayan dan pelaku usaha
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	luas lahan pelabuhan terbatas belum memenuhi standar	Risiko Operasional	belum bisa melakukan review WKOPP, Master Plan, DED, Amdal yang memenuhi kriteria pelabuhan perikanan	Pelabuhan belum dapat dikembangkan	nelayan dan pelaku usaha
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	anggaran untuk pembangunan dan perawatan terbatas	Risiko Operasional	fasilitas pelabuhan perlu direhab dan dikembangkan	penyewa dan pembeli ikan kurang nyaman	nelayan dan pelaku usaha

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	kecelakaan kerja nelayan dan pelaku usaha tidak terjamin, kapal diatas 30 GT sudah mendapatkan asuransi dan PKL; sedangkan kapal dibawah 30 GT masih sebagian sedang berproses pembinaanya	Risiko Operasional	Nelayan dan pelaku usaha belum memahami pentingnya PKL/Asuransi	bagi nelayan yang tidak asuransi tidak akan menerima santunan musibah dari asuransi	nelayan dan pelaku usaha
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	peningkatan kompetensi dan ketrampilan untuk pegawai, nelayan dan pelaku usaha (melalui staff meeting, rembug gayeng, rakor SKPD)	Risiko Operasional	keterbatasan anggaran dan kegiatan pelatihan di pelabuhan untuk pegawai nelayan dan pelaku usaha	pelaku usaha kurang mendapatkan informasi terkait informasi terbaru	pegawai, nelayan dan pelaku usaha

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Kegiatan operasional administrasi umum perkantoran belum maksimal	Risiko Operasional	keterlambatan ketersediaan anggaran	Pelayanan terganggu	pegawai dan stakeholder
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Risiko Operasional	keterlambatan ketersediaan anggaran	Pelayanan terganggu	pegawai dan stakeholder
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	kondisi kendaraan dinas dan asset milik daerah tidak dapat berfungsi dengan baik karena kurangnya pemeliharaan	Risiko Operasional	anggaran untuk pemeliharaan asset milik daerah terbatas	Pelayanan terganggu ketidaknyamanan dalam melaksanakan tugas	pegawai dan stakeholder

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	SDM yang kurang kompeten dan terampil	Risiko Operasional	Kurangnya informasi dan akses mengenai diklat-diklat kompetensi terkait serta keterbatasan anggaran untuk mengikuti diklat kompetensi	Pelayanan tidak maksimal karena SDM yang kurang kompeten dan terampil	PPP Tawang dan pengguna pelayanan
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Nelayan tidak memahami mengenai pentingnya asuransi	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran nelayan terhadapnya pentingnya asuransi atau perlindungan	Nelayan tidak mendapatkan jaminan perlindungan untuk menghindari resiko yang dialami ketika bekerja	Nelayan
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	belum optimalnya pelayanan tambat labuh kapal perikanan	Risiko Operasional	sedimentasi disepanjang dermaga	Fasilitas Pelabuhan Perikanan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal	PPP Tawang dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Tidak tersusunnya dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Risiko Operasional	Kekurangan data pendukung yang akurat dalam penyusunan dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan dan kondisi kawasan pelabuhan yang sudah berubah	Pengembangan kawasan Pelabuhan Perikanan tidak optimal	PPP Tawang dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Belum optimalnya fungsi perusahaan di pelabuhan perikanan	Risiko Operasional	Sarana prasarana pelayanan tidak mendukung	Kegiatan penangkapan ikan terhambat	PPP Tawang dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	Risiko Kepatuhan	Kurangnya kesadaran masyarakat perikanan tangkap terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Banyak kapal yang tidak memiliki dokumen perikanan lengkap sehingga rawan terjadi pelanggaran dan tertangkap oleh penegak hukum	DKP Prov. Jateng, PPP Tawang, dan pelaku usaha Perikanan Tangkap

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pelayanan administrasi umum daerah tidak optimal dan sesuai standar layanan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dan SDM tidak kompeten	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan menurun karena tidak sesuai dengan standar pelayanan	DKP Prov. Jateng, PPP Tawang, dan pengguna layanan
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan penyediaan jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	Risiko Operasional	Pegawai tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan dilaporkan	PPP Tawang
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah, serta lambatnya proses penghapusan aset yang rusak	Aset dan Barang milik pemerintah yang sudah tidak bisa dipakai	PPP Tawang dan pengguna kawasan (pengguna aset)
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Fungsi Pemerintahan tidak dapat dilaksanakan	Risiko Fraud	Rendahnya Integritas Pegawai	Menurunnya tingkat kepatuhan nelayan untuk tertib aturan	Nelayan, Masyarakat pengguna jasa

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Fungsi Perusahaan tidak dapat dilaksanakan	Risiko Reputasi	Adanya pungutan yang tidak resmi kepada pengguna jasa	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelabuhan	Nelayan, Masyarakat pengguna jasa
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Tidak tersusunnya dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Risiko Kemitraan	Data tidak lengkap	Pengembangan Pelabuhan tidak optimal	Nelayan, PPP Morodemak
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Fasilitas Pelabuhan Perikanan tidak berfungsi optimal	Risiko Reputasi	Penerapan kebijakan prioritas	Pelayanan kepelabuhanan terganggu	Nelayan, pengguna jasa
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Nelayan melaut tanpa dilengkapi PKL / Asuransi	Risiko Kepatuhan	Tingkat kesadaran nelayan rendah	Risiko kecelakaan kerja di laut tidak dapat di klaim	Nelayan
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	SDM tidak kompeten dan tidak terampil	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran pegawai untuk meningkatkan kompetensi	SDM kurang cakap dalam melayani	Nelayan, pengguna jasa

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar Layanan tidak tercapai	Risiko Operasional	Pelaksanaan kegiatan belum sesuai SOP yang sudah ditetapkan	Waktu pelayanan kepada pengguna jasa menjadi lebih lama (tidak sesuai standar layanan)	Masyarakat Pengguna Jasa
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun tidak tersusun	Risiko Operasional	Data dukung tidak lengkap	Penyediaan Jasa Penunjang tidak optimal	PPP Morodemak
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal	Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak berfungsi baik	Risiko Operasional	Rendahnya integritas pegawai	Operasional kegiatan kantor tidak berjalan lancar	PPP Morodemak, Masyarakat Pengguna Jasa

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	Belum terealisasinya outcome pelatihan	Risiko Operasional	SDM pengelola Pelabuhan Perikanan tidak bisa mengikuti pelatihan dengan optimal karena masih adanya beban pekerjaan lain	Keterampilan yang seharusnya didapatkan dari pelatihan tidak memberi manfaat terhadap kinerja SDM pengelola Pelabuhan Perikanan	PPP Bajomulyo
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Belum lengkapnya dokumen administrasi persyaratan keberangkatan kapal	Risiko Operasional	Kurangnya kecakapan pengurus kapal perikanan dan terlalu banyaknya beban pekerjaan	Keterlambatan keberangkatan kapal perikanan	PPP Bajomulyo, DKP Jateng, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Masyarakat
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Adanya fasilitas rusak di Pelabuhan Perikanan yang belum mendapatkan perbaikan	Risiko Operasional	Belum dilaksanakannya pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan sarana dan Prasarana, dan Dokumen) dari Pemkab Pati ke Pemprov Jawa Tengah	Mengganggu aktivitas perikanan tangkap di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo	PPP Bajomulyo, DKP Jateng, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Belum ada kejelasan wilayah kerja dan operasional PPP Bajomulyo	Risiko Operasional	Belum dilaksanakannya pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan sarana dan Prasarana, dan Dokumen) dari Pemkab Pati ke Pemprov Jawa Tengah sehingga dokumen WKOPP belum dapat ditetapkan	Belum terbitnya WKOPP PPP Bajomulyo menyebabkan PPP Bajomulyo belum dapat mengajukan usulan DAK untuk pembangunan kawasan Pelabuhan Perikanan	PPP Bajomulyo, DKP Jateng, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Masyarakat
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Terjadinya blooming enceng gondok yang menyumbat alur sungai	Risiko Operasional	Faktor alam yang terjadi secara periodik	Terhambatnya lalu lintas dan aktivitas kapal perikanan	PPP Bajomulyo, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Masyarakat
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Adanya kepadatan kapal di alur pelayaran sungai silugonggo	Risiko Operasional	Belum adanya kolam Pelabuhan	Terjadinya kemacetan alur pelayaran dan potensi kebakaran kapal perikanan	PPP Bajomulyo, DKP Jateng, Instansi Maritim terkait, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku	Risiko Kepatuhan	Adanya celah/kesempatan untuk melanggar peraturan	Ketidakteraturan aktivitas perikanan tangkap	PPP Bajomulyo, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Masyarakat, Instansi Maritim terkait
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Masih banyaknya aktivitas nelayan dan pekerja pada kapal perikanan yang belum menerapkan kaidah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Risiko Operasional	Kurangnya penyadartahuan dan rendahnya kesadaran nelayan serta pekerja pada kapal perikanan	Kecelakaan kerja pada nelayan dan pekerja pada kapal perikanan serta bencana yang disebabkan oleh kelalaian pekerja (kebakaran kapal perikanan)	PPP Bajomulyo, DKP Jateng, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Masyarakat, Instansi Maritim terkait

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Adanya Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan	Risiko Operasional	Dinamika kondisi usaha perikanan tangkap dan peraturan perundangundangan yang berlaku	Kurang efisiennya waktu pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan	PPP Bajomulyo, Masyarakat penerima layanan dan DKP Jateng
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kebutuhan jasa air PDAM dan listrik PLN yang tidak sesuai alokasi anggaran	Risiko Operasional	Fluktuasi kebutuhan karena fluktuasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu	Deviasi negatif pada realisasi keuangan bulanan dan potensi kekurangan anggaran pada akhir tahun	PPP Bajomulyo
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terjadinya kerusakan barang milik daerah yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi	Risiko Operasional	Tingkat kerusakan barang milik daerah yang terlalu parah	Barang milik daerah tidak dapat dipergunakan untuk keperluan kantor	PPP Bajomulyo

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Pelayanan penerbitan dokumen kesyahbandaran berbayar	Risiko Fraud	Integritas petugas rendah	- Biaya operasional yang dikeluarkan pelaku usaha menjadi lebih besar. - Terjadi Fraud di intansi pelabuhan perikanan	- Pelaku usaha - PPP Tasikagung
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Fungsi pemerintahan yang dilaksanakan tidak memadai	Risiko Operasional	Fasilitas pendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan terbatas	Kegiatan penangkapan ikan terhambat	Pelaku usaha penangkapan ikan
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Fungsi perusahaan yang dilaksanakan terbatas	Risiko Operasional	Keterbatasan jumlah, kompetensi dan integritas SDM	Pelabuhan tidak mendukung perekonomian masyarakat sekitar	Masyarakat
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Mekanisme sewa lahan tidak sesuai peraturan yang berlaku	Risiko Reputasi	Kurangnya pengawasan	Layout kawasan pelabuhan tidak sesuai masterplan	PPP Tasikagung

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Tidak ada dokumen pendukung pengembangan pelabuhan perikanan yang tersedia	Risiko Operasional	Kelengkapan dokumen persyaratan tidak lengkap	Status otoritas pelabuhan kurang kuat	PPP Tasikagung
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Fasilitas pelabuhan perikanan tidak layak pakai	Risiko Operasional	Fasilitas sudah lama dan rusak	Aktifitas kapal perikanan di pelabuhan terganggu	Pelaku usaha perikanan tangkap
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Kapal perikanan berangkat tanpa dilengkapi dengan perjanjian kerja laut	Risiko Kepatuhan	Kesadaran nahkoda dan pelaku usaha untuk perlindungan tenaga kerja masih rendah	Tidak ada Jaminan ketenagakerjaan bagi ABK	ABK
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	Tidak ada SDM yang meningkat kopetensinya	Risiko Operasional	Atasan tidak mengusulkan SDM untuk mengikuti pengembangan kopetensi	Pelayanan terhambat	Penerima layanan
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Layanan administrasi tidak sesuai standar	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran	Operasional pelabuhan terganggu	PPP Tasikagung

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tidak tersusun dengan baik	Risiko Operasional	SDM kurang kompeten	Kinerja PPP tidak dapat dinilai	PPP Tasikagung
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Tidak ada barang milik daerah yang terpelihara	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pencatatan dan pengecekan kondisi barang milik daerah	Barang milik daerah tidak berfungsi dengan baik	PPP Tasikagung, Penerima layanan
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Pemeliharaan/pengadaan barang/jasa milik daerah tidak melalui sistem pengadaan yang benar	Risiko Kemitraan	Hubungan pribadi antara KPA/PPTK dengan penyedia barang/jasa	Barang/jasa yang tersedia tidak sesuai spesifikasi yang diharapkan	PPP Tasikagung
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Fungsi pelayanan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik	Risiko Operasional	Sarana prasarana PPP yang sangat terbatas, keterbatasan SDM pelayanan	Keperluan nelayan dan pelaku usaha tidak terlayani dengan baik	PPP Karimunjawa, Nelayan dan pelaku usaha perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Fungsi pelayanan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik	Risiko Fraud	Persekongkolan yang dilakukan pihak pengguna layanan dengan petugas lapangan	Kualitas hasil pekerjaan yang menyalahi prosedur dan menyalahi SOP yang ada	PPP Karimun Jawa, nelayan, dan pelaku usaha perikanan
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Fungsi perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik	Risiko Fraud	Persekongkolan yang dilakukan pihak pengguna layanan dengan petugas lapangan	Penurunan kualitas output pekerjaan	PPP Karimun Jawa dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Fungsi perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik	Risiko Kemitraan	Pengguna layanan atau mitra melanggar perjanjian yang telah disepakati	Pelaksanaan kerjasama penggunaan layanan terganggu dan terhambat	PPP Karimun Jawa dan masyarakat perikanan (pengguna kawasan pelabuhan)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Kurangnya dokumen pendukung pengembangan pelabuhan	Risiko Operasional	Dokumen tidak lengkap, proyek strategis nasional Karimunjawa mempengaruhi perubahan wilayah operasional PPP Karimunjawa, dokumen yang ada sudah tidak sesuai dengan wilayah operasional PPP Karimunjawa saat ini	Pelabuhan Perikanan kurang dapat berkembang lebih baik	PPP Karimunjawa, DKP Jateng
6	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Fasilitas pelabuhan banyak yang rusak dan tidak layak	Risiko Operasional	Kurangnya pemeliharaan dan faktor usia bangunan	Pelayanan pelabuhan terganggu	PPP Karimunjawa, DKP Jateng
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Perbaikan fasilitas terhambat	Risiko Fraud	Rekanan / penyedia barang kurang kompeten	Kualitas barang / fasilitas rendah	PPP Karimunjawa, DKP Jateng
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Perbaikan fasilitas terhambat	Risiko Kemitraan	Rekanan melanggar SPK yang ada	Hasil pekerjaan kurang berkualitas / penyelesaian pekerjaan terlambat	PPP Karimunjawa, DKP Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Nelayan tidak memahami mengenai pentingnya asuransi / PKL	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran nelayan terhadapnya pentingnya asuransi atau perlindungan	Nelayan tidak mendapatkan jaminan perlindungan untuk menghindari resiko yang dialami ketika bekerja	Nelayan
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	SDM yang kurang kompeten dan terampil	Risiko Operasional	Kurangnya informasi dan akses mengenai diklat-diklat kompetensi terkait serta keterbatasan anggaran untuk mengikuti diklat kompetensi	Pelayanan tidak maksimal karena SDM yang kurang kompeten dan terampil	PPP Karimun Jawa dan Pengguna Layanan
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pelayanan administrasi umum daerah tidak optimal dan sesuai standar layanan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dan SDM tidak kompeten	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan menurun karena tidak sesuai dengan standar pelayanan	DKP Prov. Jateng, PPP Karimun Jawa, dan pengguna layanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan penyediaan jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	Risiko Operasional	Pegawai tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan dilaporkan	PPP Karimunjawa
13	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah, serta lambatnya proses penghapusan aset yang rusak	Aset dan Barang milik pemerintah yang sudah tidak bisa dipakai	PPP Karimunjawa dan pengguna kawasan (pengguna aset)
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Pelaksanaan perijinan dan kegiatan operasional kapal perikanan belum terlaksana secara maksimal	Risiko Operasional	Kurangnya pengetahuana nelayan terkait peraturan perijinan berusaha dan kurangnya pengawasan di kawasan pelabuhan	Dokumen kesyahbandaran yang dimiliki nelayan tidak lengkap, jumlah kapal di kawasan pelabuhan tidak termonitor	PPP Lohgending, masyarakat nelayan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Nelayan belum terjamin oleh asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran nelayan/pemilik kapal akan pentingnya asuransi	Nelayan tidak memperoleh santunan jika terjadi laka laut	PPP Lohgending, Nelayan
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	SDM tidak kompeten dan kurang terampil	Risiko Reputasi	SDM tidak cakap melayani	Pelayanan PPP Lohgending tidak optimal	PPP Lohgending, Nelayan
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Percepatan pengembangan pelabuhan terhambat	Risiko Operasional	Kurangnya integritas dan pengetahuan SDM	Pengembangan pelabuhan terhambat	PPP Lohgending,
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan	Risiko Operasional	Kurangnya fasilitas yang memadai	Fasilitas pelabuhan tidak digunakan secara optimal	PPP Lohgending, Masyarakat pelaku usaha perikanan
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Kurangnya fasilitas pokok, penunjang, fungsional yang dimiliki pelabuhan	Risiko Operasional	Sarpras tidak memadai	Kegiatan operasional pelabuhan terhambat	PPP Lohgending, Nelayan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pegawai kurang kompeten	Risiko Operasional	Terbatasnya jumlah SDM	Kegiatan peayanan tidak optimal	PPP Lohgending
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Pembayaran tagihan langganan listrik/air/telepon/internet tidak terpenuhi	Risiko Operasional	Adanya kenaikan tarif biaya langganan listrik/air/telepon/internet di tahun berjalan yang tidak dapat di prediksi	Anggaran yang tersedia tidak mencukupi biaya tagihan langganan sehingga menyebabkan silpa dan tagihan langganan di akhir tahun dibayarkan oleh kantor induk	PPP Lohgending
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah	Risiko Operasional	Barang milik daerah yang rusak tidak dapat diperbaiki	Kegiatan pelayanan dan operasional kantor terhambat	PPP Lohgending

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pengguna Layanan Pengujian	Kurangnya media/reagen dan peralatan di laboratorium	Risiko Operasional	Penambahan ruang lingkup setiap tahunnya memerlukan penambahan media/reagen dan peralatan sesuai dengan kebutuhan pengujian	Terganggunya aktifitas pengujian dalam memenuhi kebutuhan pelanggan	BLPKIL dan Pelanggan
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pengguna Layanan Pengujian	Menurunnya jumlah sampel yang diujikan	Risiko Operasional	Kurangnya informasi kepada masyarakat/pembudidaya mengenai pelayanan pengujian di BLPKIL	Informasi layanan pengujian belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat/pembudidaya	BLPKIL
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkatkan Kompetensinya	Kurangnya jumlah jenis pelatihan yang dimiliki petugas laboratorium untuk mendukung penambahan ruang lingkup	Risiko Operasional	Penyelenggara pelatihan tidak menyediakan jenis pelatihan penunjang kegiatan laboratorium	Kurangnya kompetensi petugas laboratorium dan berpengaruh dalam penambahan ruang lingkup pengujian	BLPKIL Pelanggan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani	Tidak terlaksananya pencegahan dan pengendalian hama penyakit ikan pada lingkungan budidaya	Risiko Operasional	Munculnya kejadian tidak terduga terkait wabah hama penyakit ikan dan pelaksanaan pengendalian penyebaran hama penyakit ikan belum menyeluruh ke pembudidaya perikanan	Jumlah sebaran penyakit ikan yang meningkat dan tidak terkendali sehingga produksi perikanan budidaya menurun	BLPKIL dan Pelanggan
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani	Resistensi antimikroba dan penggunaan obat ikan tidak terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan PerMen-KP No.1 Tahun 2019	Risiko Operasional	Penggunaan obat ikan yang tidak bijak dan beredarnya obat ikan yang tidak terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan PerMen-KP No.1 Tahun 2019	Terjadinya resistensi antimikroba karena penggunaan obat ikan yang tidak bijak dan obat ikan yang tidak terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan PerMen-KP No.1 Tahun 2019	Pelaku usaha

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani	Pelaku usaha tidak melakukan pengendalian hama penyakit ikan	Risiko Operasional	Pelaku usaha tidak memahami upaya pencegahan dan pengendalian hama penyakit ikan	Terjadinya kematian ikan dan kerugian usaha akibat hama penyakit ikan	Pelaku usaha
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Terhambatnya aktivitas perkantoran	Risiko Operasional	Tidak tercukupinya sarana prasarana perkantoran	Terganggunya aktivitas perkantoran	BLPKIL dan Pelanggan
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kurang maksimalnya pelayanan perkantoran	Risiko Operasional	Pelayanan tidak sesuai standar	Ketidakpuasan pelanggan	BLPKIL dan Pelanggan
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Ketidaknyaman an pelanggan dan terganggunya asktifitas pelayanan pengujian laboratorium	Risiko Operasional	Sarana dan prasarana yang tidak memadai	Terganggunya aktivitas pelayanan dan perkantoran	BLPKIL dan Pelanggan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Balai dalam memproduksi benih, calin dan ikan konsumsi kurang optimal	Risiko Operasional	terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan di Loka	tidak dapat memenuhi permintaan pembudidaya, UPR, dan UPTD Kabupaten Kota	pemerintah dan stakeholder
2	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Balai dalam memproduksi ikan konsumsi kurang optimal	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas budidaya ikan konsumsi kurang memadai	tidak dapat memenuhi permintaan konsumen	pemerintah dan stakeholder
3	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Balai dalam memproduksi ikan endemik lokal hasil domestikasi masih terbatas	Risiko Operasional	Terancamnya habitat endemik ikan lokal di perairan umum	tidak dapat memenuhi permintaan konsumen	pemerintah dan stakeholder
4	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Balai dalam memproduksi benih, calin dan ikan konsumsi kurang optimal	Risiko Operasional	terdapat kerusakan pada kolam budidaya,	tidak dapat memenuhi permintaan pembudidaya, UPR, dan UPTD Kabupaten Kota	pemerintah dan stakeholder

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Balai dalam memproduksi benih, unggul kurang optimal	Risiko Strategis	terdapat fasilitas budidaya benih unggul yang kurang memadai	tidak dapat memenuhi permintaan benih pembudidaya, UPR dan UPTD Kabupaten Kota	pemerintah dan stakeholder
6	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	Balai dalam memproduksi calon induk kurang optimal	Risiko Operasional	terdapat penurunan kualitas genetik calon induk	tidak dapat memenuhi permintaan calon induk bermutu di masyarakat	pemerintah dan stakeholder
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut	Balai belum mengembangkan teknologi budidaya terbaru	Risiko Strategis	Perkembangan Teknologi Budidaya yang Dinamis	Kurang optimalnya produktivitas budidaya di masing-masing lokasi	pemerintah dan stakeholder
8	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	Balai dalam memproduksi ikan konsumsi payau dan tawar kurang optimal	Risiko Operasional	Terdapat fasilitas budidaya ikan konsumsi ikan konsumsi payau dan tawar kurang memadai	tidak dapat memenuhi permintaan konsumen	pemerintah dan stakeholder

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	Balai dalam memproduksi benih, unggul ikan air tawar kurang optimal	Risiko Operasional	terdapat fasilitas budidaya benih unggul ikan air tawar yang kurang memadai	tidak dapat memenuhi permintaan pembudidaya, UPR dan UPTD Kabupaten Kota	pemerintah dan stakeholder
10	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	pemilihan/penujukan penyedia jasa yang tidak kompeten	Risiko Fraud	persekongkolan yang dilakukan oleh pemilik pekerjaan dan penyedia jasa	penerapan tender/lelang secara elektronik dan bersifat rasional, melakukan monev pengadaan barang dan jasa secara berkala	pemerintah dan stakeholder
11	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	Balai dalam pemilihan/penujukan penyedia jasa yang tidak kompeten	Risiko Strategis	persekongkolan yang dilakukan oleh pemilik pekerjaan dan penyedia jasa	penurunan kualitas output pekerjaan	pemerintah dan stakeholder

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	pemilihan/penujukan penyedia jasa yang tidak kompeten	Risiko Kemitraan	harga calon induk yang ditawarkan penyedia jasa lebih tinggi dari harga pasar	adanya peningkatan biaya produksi karena harga beli calon induk yang lebih tinggi dari harga pasar	pemerintah dan stakeholder
13	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Pelayanan administrasi umum daerah belum sesuai standar	Risiko Operasional	SDM kurang terpenuhi, anggaran terbatas	Kepuasan masyarakat terhadap layanan disampaikan	Pemerintahan dan Masyarakat Pengguna layanan
14	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan penyediaan jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	Risiko Operasional	SDM kurang memadai, anggaran terbatas	Pelaksanaan kegiatan tidak tercatat dan dilaporkan	pemerintahan
15	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Pemanfaatan BMD kurang optimal	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran serta kesulitan dalam pengusulan dan penghapusan BMD	Pemanfaatan BMD kurang optimal	pemerintahan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Ketertiban nelayan yang rendah dalam melengkapi dokumen kapal perikanan sesuai aturan yang berlaku	Risiko Operasional	Keterbatasan kemampuan SDM nelayan di PPP Larangan dalam mengurus perijinan kapal secara online dan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang	Pemberian sanksi kepada nelayan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen kapal sesuai aturan yang ada	Nelayan
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah fungsi perusahaan yang dilaksanakan	Ketertiban penyewa lahan yang rendah dalam membayar retribusi sewa lahan	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran dari penyewa lahan untuk membayar retribusi sewa lahan	Penurunan retribusi sewa lahan dari target PAD PPP Larangan	PPP Larangan
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Tidak tersusunnya dokumen administrasi pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	Risiko Operasional	Terhambatnya status peningkatan kelas pelabuhan dari PPI ke PPP sesuai Peraturan Menteri KKP tentang pelabuhan perikanan karena adanya miskomunikasi terkait data produksi ikan yang didaratkan	Pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan yang terhambat dan tidak bisa dilaksanakan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Akses keluar dan masuk kawasan pelabuhan yang sulit dilewati	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran untuk perbaikan akses jalan masuk kawasan pelabuhan	Penurunan nilai produksi perikanan tangkap dan ekonomi di PPP Larangan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	Trip harian kapal nelayan yang terhambat oleh pendangkalan kolam pelabuhan dan alur sungai serta kapasitas kolam pelabuhan yang sudah penuh	Risiko Operasional	Keterbatasan Anggaran untuk perubahan pintu masuk kolam pelabuhan untuk mengurangi sedimentasi dari alur sungai bongkok serta anggaran untuk memperluas kolam pelabuhan	Penurunan nilai trip kapal dan produksi perikanan tangkap di PPP Larangan	Nelayan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	Keamanan dan keselamatan kerja dari nelayan yang belum terjamin oleh asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran nelayan/pemilik kapal akan manfaat dan pentingnya dari program asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	Pendapatan Nelayan (one day fishing) yang berkurang apabila digunakan untuk biaya lain yang tidak terduga	-Nelayan -Pelaku Usaha
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi dan Ketrampilannya	Kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh pegawai PPP Larangan	Risiko Operasional	Keterbatasan jumlah SDM pegawai di PPP Larangan yang kompeten dalam memberikan pelayanan	Penurunan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di PPP Larangan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Kegiatan operasional perkantoran di PPP Larangan yang kurang maksimal	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam penyediaan peralatan perkantoran	Penurunan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di PPP Larangan	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Adanya perubahan biaya jasa penunjang urusan pemerintah daerah dari anggaran yang sudah disusun	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan RAB yang sudah disusun	PPP Larangan
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah	Aset dan Barang milik pemerintah yang sudah tidak bisa dipakai	-Nelayan -Pelaku Usaha -PPP Larangan
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil	Tingkat pelanggaran tinggi	Risiko Operasional	Pelaku usaha tidak memahami undang - undang	Pemerintah rugi, kegiatan usaha terganggu	Pelaku usaha dan pemerintah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Pelaku usaha tidak Mengetahui Peraturan perundangan	Risiko Operasional	Pelaku Usaha tidak sesuai undang-undang	Pelaku usaha melanggar peraturan Perundang Undangan	Nelayan, Masyarakat
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sumberdaya kelautan dan perikanan tidak terawasi dengan baik	Risiko Reputasi	POKMASWAS tidak aktif, Jumlah Pengawas Perikanan terbatas	POKMASWAS tidak aktif, Jumlah Pengawas Perikanan terbatas	Pemerintah, masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya	Pelaku usaha tidak mengetahui peraturan perundang-undangan	Risiko Operasional	Usaha tidak sesuai peraturan perundang-undangan	Pelanggaran peraturan perundang-undangan	Nelayan, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	Rendahnya periode operasi pengawasan sektor KP	Risiko Operasional	Kurangnya operasi pengawasan Sektor KP	Pelaku usaha melanggar peraturan perundang undangan	Pemerintah, Nelayan, Masyarakat
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Adanya praktek suap dan pengaturan pemenang lelang pengadaan Kajian Kawasan Konservasi Perairan Kab. Brebes	Risiko Fraud	Hubungan pertemanan/kekerabatan dan atau pihak penyedia menginginkan pekerjaan tersebut	Kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai harapan	Pemerintah Daerah, Nelayan, Masyarakat Pesisir, dan Pelaku Usaha

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Kategori kawasan konservasi yang diusulkan tidak sesuai dengan Permen KP No 31 Tahun 2020	Risiko Operasional	Kajian penetapan kawasan konservasi kurang data dukung dan analisa kurang akurat	Penurunan kualitas dan habitat ekosistem pesisir	Pemerintah Daerah, Nelayan, Masyarakat Pesisir, dan Pelaku Usaha
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Tidak tercapainya jumlah stakeholder yang memahami peraturan terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Risiko Operasional	Kurangnya keaktifan stakeholder untuk mengikuti sosialisasi peraturan terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Adanya pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai RTRWP	Pemerintah Daerah, Nelayan, Masyarakat Pesisir, dan Pelaku Usaha
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	Pemanfaatan ruang laut tidak sesuai dengan alokasi ruang RTRWP	Risiko Operasional	Tidak tercapainya jumlah stakeholder dan pelaku usaha yang memahami peraturan RTRWP	Pengelolaan ruang laut tidak optimal	Pemerintah Daerah, Nelayan, Masyarakat Pesisir, dan Pelaku Usaha
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya	KUGAR tidak terakses teknologi	Risiko Operasional	Produktifitas KUGAR rendah	Produksi dan kualitas garam rendah	Petambak garam

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya	Adanya praktek suap dan pengaturan pemenang lelang pengadaan	Risiko Fraud	Hubungan pertemanan/kekerabatan dan atau pihak penyedia menginginkan pekerjaan tersebut	Kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan	Penyedia
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya	Adanya gratifikasi dari penyedia karena ditetapkan sebagai pemenang pengadaan	Risiko Fraud	Hubungan pertemanan/kekerabatan dan atau pihak penyedia menginginkan pekerjaan tersebut	Kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan	Penyedia
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya	Adanya gratifikasi dari penerima bantuan	Risiko Fraud	Menginginkan agar penerima bantuan dapat diberikan bantuan kembali sesering mungkin	Profesionalitas pemilik pekerjaan berkurang	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah KUGAR yang meningkat kompetensinya	KUGAR tidak terbina	Risiko Operasional	Produktifitas KUGAR rendah	Produksi garam turun/rendah	Petambak garam
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah sentra garam rakyat yang didata potensinya	Potensi sentra garam rakyat tidak terdata	Risiko Operasional	Pendataan tidak lengkap	Data produksi garam tidak valid serta potensi pergaraman tak terdata	Sentra garam

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Kelompok masyarakat pesisir tidak mendapat bantuan sarana prasarana usaha	Risiko Operasional	Kelompok masyarakat pesisir kurang terampil dan kurang berkembang	Kelompok Masyarakat pesisir tidak sejahtera	Kelompok masyarakat pesisir
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Adanya praktek suap dan pengaturan pemenang lelang pengadaan	Risiko Fraud	Hubungan pertemanan/kekerabatan dan atau pihak penyedia menginginkan pekerjaan tersebut	Kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan	Penyedia
13	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Adanya gratifikasi dari penyedia karena pemenang pengadaan	Risiko Fraud	Hubungan pertemanan/kekerabatan dan atau pihak penyedia menginginkan pekerjaan tersebut	Kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan	Penyedia
14	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	Adanya gratifikasi dari penerima bantuan	Risiko Fraud	Menginginkan agar penerima bantuan dapat diberikan bantuan kembali sesering mungkin	Objektifitas pemilik pekerjaan berkurang	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Ijin Usaha	Pengelolaan perikanan budidaya dianggap baik apabila memenuhi standar yang telah ditentukan meliputi CPIB, CPPIB dan CBIB. Pelaku usaha pembudidaya skala kecil belum melaksanakan kegiatan pembudidayaan sesuai dengan standar yang berlaku	Risiko Operasional	Pelaku usaha belum memahami pentingnya perizinan usaha budidaya (CPIB, CBIB, dan CPPIB)	Produk perikanan budidaya pelaku budidaya skala kecil tidak mampu bersaing	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan
2	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Kualitas bantuan rendah	Risiko Fraud	Penyedia barang tidak kompeten	Produksi perikanan rendah	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan
3	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	Rendahnya tingkat pemanfaatan bantuan	Risiko Operasional	Bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan	Produksi Perikanan Rendah	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Strategis	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Meningkatkan Keterampilannya	Pelatihan peningkatan keterampilan bagi pembudiaya yang kurang optimal	Risiko Operasional	Sosialisasi dan pelatihan hanya berupa materi tanpa adanya praktek	Pembudidaya tidak meningkatkan ketrampilannya	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Unit Pengolahan Ikan yang terdata	Rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan perizinan	Risiko Operasional	Pelaku usaha tidak memiliki izin usaha	Produk perikanan tidak mampu bersaing dengan produk lain	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Usaha Kelautan dan Perikanan yang dipromosikan	Tidak semua pelaku usaha terpromosikan	Risiko Operasional	Masyarakat tidak mengenal produk perikanan	Produk perikanan tidak dikenal oleh masyarakat	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah jenis pelatihan peningkatan keterampilan dan kompetensi	Pelatihan peningkatan keterampilan yang kurang optimal	Risiko Operasional	Kurangnya jenis pelatihan peningkatan keterampilan yang diselenggarakan	SDM perikanan tidak meningkatkan keterampilan	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Poklahsar yang Meningkatkan Usahanya	Rendahnya tingkat pemanfaatan bantuan	Risiko Operasional	Bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan	Produksi perikanan rendah	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan	Pemetaan dan Pemantauan Logistik tidak tersusun	Risiko Operasional	Pendataan tidak dilaksanakan secara maksimal	Tidak efektif dan efisiennya rantai pasok perikanan	Pemerintah, Masyarakat, Pelaku usaha perikanan
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi	Tingkat kematian bibit mangrove pasca penanaman cukup tinggi dikarenakan lingkungan penanaman yang kotor, kriteria lokasi/sedimen kurang sesuai, pemeliharaan bibit tidak maksimal sebelum penanaman	Risiko Operasional	Musim saat penanaman yang tidak mendukung, lahan tidak cocok	Bibit Mangrove tidak tumbuh/mati, bibit hilang karena ombak	Masyarakat pesisir

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi	"Lokasi penanaman mangrove yang dilakukan belum sesuai dengan pembagian lokasi penanaman dari Bappeda Jateng "	Risiko Operasional	Kurangnya informasi lahan untuk penanaman mangrove yang sesuai dengan pembagian lokasi dari Bappeda Jateng	Kurangnya informasi lahan untuk penanaman mangrove yang sesuai dengan pembagian lokasi dari Bappeda Jateng Luas lahan penanaman mangrove yang direhabilitasi tidak amanah	Masyarakat, Pemerintah
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi	Keselamatan petugas pada saat penenggelaman Terumbu Karang Buatan (TKB)	Risiko Operasional	TKB Berat dan gelombang laut yang tinggi	Kecelakaan Kerja (Luka/ Kematian)	Petugas, Pemerintah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Pelanggaran pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman masyarakat/ nelayan sekitar tentang zonasi dan aturan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	Kerusakan terumbu karang	Masyarakat dan lingkungan
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	Jumlah penerbitan perizinan berusaha masih rendah	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya perizinan berusaha	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha masih rendah	Pelaku usaha
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	Meningkatnya pelanggaran kegiatan perikanan tangkap terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Risiko Operasional	Kurangnya kepedulian nelayan terkait pentingnya pengurusan dokumen kapal dan penggunaan peralatan tangkap yang ramah lingkungan	Banyak ditemukan pelanggaran dokumen kapal, rusaknya lingkungan karena pemakaian peralatan tidak ramah lingkungan	Masyarakat dan Lingkungan
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan	Keselamatan Petugas Pengawasan	Risiko Operasional	Kondisi kapal tidak terawat, cuaca buruk, kurang keahlian personil ABK	Mesin kapal rusak saat di laut, kecelakaan saat di laut	Petugas

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Meningkatnya pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	Risiko Operasional	Kurangnya jumlah pokmaswas yang ada dan aktif dalam membantu pengawasan	Penggunaan alat tangkap yang merusak (bahan peledak, stoom listrik)	Masyarakat dan Lingkungan
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Serapan anggaran tidak terpenuhi 100%	Risiko Operasional	Adanya selisih harga GO lebih tinggi atau lebih rendah menyebabkan SILPA anggaran	Kegiatan layanan administrasi terhambat	Pegawai CDK Wilayah Barat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Kurang tertatanya kepegawaian di CDK Barat	Risiko Operasional	Pembagian pekerjaan kurang merata	Kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian terhambat	Masyarakat, Pemerintah
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak terpenuhi pembayaran tarif listrik dalam 1 tahun	Risiko Operasional	Peningkatan penggunaan sumberdaya listrik tidak disesuaikan dengan anggaran	Jumlah anggaran tidak memenuhi tagihan sehingga menimbulkan silpa dan tagihan dibayar DKP	Pegawai CDK Wilayah Barat
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kerusakan barang inventaris kantor	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran pemeliharaan barang yang ada	Pemeliharaan tidak terlaksana, pelayanan terhambat	Pegawai CDK Wilayah Barat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi	Mangrove yang ditanam mengalami kerusakan, kematian, atau hilang terkena ombak	Risiko Operasional	Kondisi oseanografi pesisir selatan Jawa Tengah yang ekstrim	Hasil penanaman mangrove hingga masa pemeliharaan selesai menjadi kurang baik	Masyarakat Pesisir
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	Jumlah penerbitan perizinan berusaha masih rendah	Risiko Operasional	Petugas serta pelaku usaha belum memahami sistem perizinan terbaru	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha masih rendah	Pelaku Usaha
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	SDM petugas kurang memadai	Risiko Operasional	Pemeriksaan tidak terselesaikan	Target kinerja tidak tercapai	OPD
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan	Operasional kapal pengawasan yang mahal	Risiko Operasional	Rendahnya patroli pengawasan SDKP	Kerusakan SDKP	Masyarakat dan Lingkungan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	SDM petugas kurang memadai	Risiko Operasional	Pemeriksaan tidak terselesaikan	Target kinerja tidak tercapai	OPD
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Harga barang di GO lebih tinggi dari RAB sehingga tidak dapat melakukan transaksi	Risiko Operasional	Tidak dapat transaksi pembelian barang lewat GO	Kegiatan layanan Administrasi terhambat	Seluruh pegawai CDK Selatan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak terpenuhinya pembayaran tarif listrik	Risiko Operasional	Kenaikan tarif listrik yang tidak bisa diprediksi	Tidak dapat dilakukan pembayaran listrik	Seluruh Pegawai CDK Wilayah Selatan
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Barang yang rusak tidak dapat segera diperbaiki	Risiko Operasional	Anggaran yang terbatas untuk pemeliharaan barang	Kegiatan pelayanan terhambat	Seluruh Pegawai Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi	Penanaman Mangrove dilakukan pada lokasi yang memiliki resiko kematian yang tinggi	Risiko Operasional	Kurangnya informasi lahan yang sesuai untuk penanaman mangrove di wilayah kerja CDK Timur	Tingkat kelulus hidupan mangrove yang ditanam sangat rendah	Masyarakat pesisir
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	Pengelolaan kawasan konservasi belum dikelola secara berkelanjutan	Risiko Operasional	kurangnya pemahaman pengelola, dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi	Tidak terpenuhi target penilaian EVIKA	Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	Jumlah penerbitan perizinan berusaha masih rendah	Risiko Operasional	Pelaku usaha belum memahami pentingnya memiliki perizinan berusaha	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha masih rendah	Pelaku usaha
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	Petugas pengawasan tidak kompeten	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman petugas terhadap peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan	Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan tidak tertangani	Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lingkungan
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah patroli pengawasan dengan speedboat yang dilaksanakan	Periode patroli pengawasan yang rendah	Risiko Operasional	Tidak terawasinya WPPNRI 713 secara maksimal	Kasus IUU meningkat	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Stakeholder dan Lingkungan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Petugas pengawasan tidak kompeten	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman petugas terhadap peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan yang berlaku	Pelanggaran sektor kelautan dan perikanan tidak tertangani	Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pemangku kepentingan/stakeholder dan Lingkungan
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Tidak terpenuhinya pembelanjaan Barang sesuai RAB	Risiko Operasional	Kenaikan harga barang	Kegiatan layanan Administrasi terhambat	Staf CDK Timur

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak terpenuhinya pembayaran tarif listrik	Risiko Operasional	Kenaikan tarif listrik yang tidak bisa diprediksi	Tidak dapat dilakukan pembayaran listrik	Seluruh pegawai CDK Timur
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Barang yang rusak tidak dapat segera diperbaiki	Risiko Operasional	Anggaran yang terbatas untuk pemeliharaan barang	Kegiatan pelayanan terhambat	Seluruh pegawai CDK Timur
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Rekomendasi sertifikat Good Manufacturing Product (GMP) yang diterbitkan	Jumlah UPI yang dibina dan produk perikanan yang dimonitoring tidak sebanding dengan anggaran	Risiko Operasional	keterbatasan alokasi anggaran yang disediakan untuk BPMHP	tidak semua UPI dapat dibina jaminan keamanan pangan produk perikanan di Jawa Tengah dengan optimal	masyarakat, pelaku usaha perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)	keengganan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi SNI	Risiko Operasional	Kurangnya sosialisasi mengenai kebermanfaatan penerapan SNI produk	Daya saing produk perikanan di Jawa Tengah kurang	Pelaku Usaha perikanan
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan	Tidak terpenuhinya target CAT	Risiko Operasional	Tidak mampu memenuhi tuntutan kebutuhan parameter pengujian yang semakin meningkat	-Penjaminan keamanan dan mutu produk perikanan tidak optimal -Target PAD tidak tercapai	Pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha perikanan
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan	peralatan pengujian kurang optimal karena banyak yang rusak dan butuh perbaikan	Risiko Operasional	peralatan pengujian sudah berumur diatas 8 tahun dan keterbatasan anggaran	durasi pengujian menjadi lebih lama	masyarakat, pelaku usaha perikanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan	Ketersediaan media dan reagen pengujian yang tidak mencukupi	Risiko Operasional	peraturan pemerintah mewajibkan TKDN min 40% sedangkan produk media dan reagen lokal (non impor) masih terbatas	Kegiatan pengujian terhambat	Masyarakat
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Kurang optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kantor	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kantor	Menurunnya kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat	Masyarakat
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terhambatnya kegiatan pelayanan akibat terhentinya suplai air dan listrik untuk kegiatan operasional	Risiko Operasional	Permasalahan pada suplai listrik dan air dari penyedia jasa	Menurunnya kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat	Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kurang optimalnya kegiatan operasional kantor dan pelayanan	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas kantor (gedung, peralatan pelayanan)	Kegiatan pelayanan terhambat	Masyarakat

Tabel 2
Analisi Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menurunnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	4	4	16	Ada	Pembuatan TKB, pengawasan penggunaan alat tangkap, monitoring hama penyakit ikan dan hibah/bantuan kepada nelayan dan pembudidaya ikan	Memadai	3	3	9
Tingginya curah hujan dan proses produksi tradisional	4	4	16	Ada	Penggunaan teknologi dalam produksi garam dan bantuan/hibah kepada petambak garam	Memadai	3	3	9
Masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya konsumsi ikan	3	4	12	Ada	Kampanye gemar makan ikan di masyarakat	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penurunan SDI dan cuaca buruk	3	4	12	Ada	Pembuatan TKB, pengawasan penggunaan alat tangkap dan hibah/bantuan kepada nelayan	Memadai	3	3	9
Terjadinya serangan hama penyakit ikan, cuaca buruk dan tingginya biaya produksi	3	4	12	Ada	Monitoring hama penyakit ikan dan bantuan/hibah kepada pembudidaya ikan	Memadai	2	3	6
Masih adanya IUU dan kegiatan masyarakat yang merusak SDKP	4	4	16	Ada	Sosialisasi kepada masyarakat dan peningkatkan operasi pengawasan SDKP	Memadai	3	2	6
Personil OPD tidak mempunyai orientasi pelayanan	3	3	9	Ada	Rapat evaluasi dan pengendalian kegiatan setiap bulan	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurang pemahaman identifikasi risiko	3	3	9	Ada	Pertemuan dan pembinaan SPIP setiap tahun, penilaian maturitas SPIP	Memadai	2	3	6
Program/kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kurangnya pengendalian	3	4	12	Ada	Rapat koordinasi pengendalian operasional program/kegiatan secara rutin tiap bulan	Memadai	2	2	4
Capaian Kinerja Rendah	2	2	4	Ada	Peningkatan Kapasitas SDM Yang Memadai	Memadai	1	1	1
Ikan hasil tangkapan yang didaratkan mempunyai kualitas kurang bagus dan pelaporan jumlah produksi tidak sesuai	3	4	12	Ada	Pembangunan/ pemeliharaan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan, pendataan dan pelayanan perizinan dengan melibatkan Kabupaten/Kota dan pemberian bantuan alat tangkap dan pendukungnya	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pendapatan yang diterima nelayan menurun	3	3	9	Ada	pemberian perlindungan kepada nelayan kecil, sosialisasi/pemberdayaan /pelatihan kepada nelayan untuk mendapatkan akses permodalan dan meningkatkan kompetensinya	Memadai	0	0	0
Terjadinya penurunan kelestarian sumberdaya ikan	3	4	12	Ada	Deseminasi regulasi cara penangkapan ikan yang bertanggung jawab secara berkala	Memadai	0	0	0

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ketidakcakapan SDM, kekurangan SDM kepegawaian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, dan kebijakan yang sering berubah.	2	2	4	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik	Memadai	1	2	2
Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	2	2	4	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelayanan kepada masyarakat kawasan PPP Asemdayong tidak berjalan dengan baik	4	3	12	Belum Ada	Memperbaiki Fasilitas Sarana Kebersihan (MCK) di Kawasan PPP Asemdayong	Belum Memadai	2	2	4
Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Tidak Berjalan dengan Baik dan Nyaman	4	3	12	Ada	Memperbaiki Sarana Pas masuk Kawasan PPP Asemdayong	Belum Memadai	3	2	6
Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	2	2	4	Ada	Diikutkan diklat pegawai, perbaikan sarana dan prasana yang menunjang dan dilakukan evaluasi secara periodik dengan staf meting.	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Belum optimalnya ketercapaian pelayanan kepelabuhan	2	2	4	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik	Memadai	1	2	2
Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	2	2	4	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peraturan Pemerintah yang terkait dengan kepelabuhanan dapat dilaksanakan dengan lancar	3	3	9	Ada	Meningkatkan sarana prasarana pelabuhan di PPP Klidang Lor	Memadai	3	3	9
Target dan realisasi program kegiatan tercapai	3	3	9	Ada	mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun depan	Memadai	3	3	9
Belum optimalnya ketercapaian pelayanan kepelabuhan	2	2	4	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	2	2	4	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik	Memadai	1	2	2
Pelayanan kepelabuhanan tidak tercapai	4	3	12	Ada	Pelatihan dan pemenuhan sarpras	Belum Memadai	3	2	6
Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah tidak tercapai	2	2	4	Ada	Mengajukan usulan Analisis Beban Kerja untuk penambahan pegawai	Memadai	2	2	4
Jumlah Staf yang belum memenuhi kebutuhan di Analisis Beban Kerja (ABK)	3	3	9	Ada	Mengusulkan permohonan staf tambahan kepada Sekretaris DKP Jateng	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurang tertatanya manajemen kepegawaian di PPP Bajomulyo	3	3	9	Ada	Pendelegasian sebagian tugas Plt Kasubbag TU kepada staf untuk memastikan pelaksanaan evaluasi SKP triwulan dan tahunan serta pengadaan tenaga honorer untuk tahun berikutnya sesuai dengan jadwal	Memadai	1	3	3
Ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung rendah	3	4	12	Ada	- Pengembangan kompetensi ASN - Promosi peluang investasi	Belum Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah yang tersedia rendah	2	4	8	Ada	- Melakukan perhitungan rencana anggaran secara cermat - Melakukan setiap kegiatan sesuai dengan rencana anggaran yang sudah disepakati	Memadai	1	2	2
Belum optimalnya ketercapaian pelayanan kepelabuhan	2	2	4	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masih belum optimalnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	2	2	4	Ada	Dilaksanakannya pelatihan pegawai, perbaikan sarana dan prasarana, adanya monitoring dan evaluasi internal yang dilaksanakan secara periodik	Memadai	1	2	2
Pelayanan Kepelabuhan tidak maksimal	4	4	16	Ada	Sosialisasi dan Pelatihan, Pembinaan personil	Memadai	4	4	16
Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta pengawasan dan keamanan operasional pelabuhan tidak berjalan optimal	4	4	16	Ada	Sosialisasi, Pengadaan sapras (CCTV) di kawasan pelabuhan	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan	4	4	16	Ada	Sosialisasi dan publikasi terkait fasilitas yang tersedia di pelabuhan	Belum Memadai	4	4	16
percepatan pengembangan pelabuhan terhambat	4	4	16	Ada	Koordinasi dengan instansi terkait (ATR/BPN, BBWS, BPKAD)	Belum Memadai	4	4	16
kurangnya fasilitas pokok, penunjang, fungsional yang dimiliki pelabuhan	4	4	16	Ada	perbaiki halaman ruang pertemuan SPI Pasir	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
nelayan belum terjamin oleh asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	4	4	16	Ada	Sosialisasi dan koordinasi terkait asuransi nelayan	Belum Memadai	4	4	16
SDM tidak kompeten dan kurang terampil	4	4	16	Ada	Menugaskan pegawai untuk mengikuti Diklat Fungsional maupun teknis serta Seminar guna meningkatkan kompetensi pegawai	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelayanan dan kinerja terhambat	4	4	16	Ada	Pembagian tugas kepada pegawai sesuai kompetensinya sehingga semua kegiatan operasional dan pelayanan terpenuhi	Belum Memadai	4	4	16
Kegiatan pelayanan administasi tidak berjalan oprimal	2	2	4	Ada	pembagian tugas bagi pegawai secara merata	Belum Memadai	3	3	9
Anggaran yang telah disusun tidak mencukupi untuk pembayaran tagihan langganan	4	4	16	Ada	Penambahan anggaran tagihan langganan listrik/air/telepon/interne t	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah	4	4	16	Ada	penentuan skala prioritas pemeliharaan	Belum Memadai	4	3	12
Tidak tertanganinya kasus hama penyakit ikan	3	3	9	Ada	Menyusun rencana monitoring pengendalian penyakit ikan dan menyusun rencana penambahan ruang lingkup pengujian penyakit ikan berpotensi wabah	Memadai	3	4	12
Kegiatan operasional tidak berjalan dengan baik	3	3	9	Ada	Perencanaan penganggaran sesuai dengan kebutuhan	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Balai dalam memproduksi ikan untuk perbenihan dan produksi konsumsi kurang optimal	3	2	6	Ada	Pengoptimalan Penggunaan Sarpras Produksi Budidaya Ikan untuk perbenihan dan produksi konsumsi	Memadai	2	2	4
Jumlah Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	3	2	6	Ada	Pengoptimalan kebutuhan pegawai dan fasilitas sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan yang memadai	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peraturan dan Kebijakan tentang pengelolaan perikanan tangkap yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum bisa dilaksanakan dengan baik	4	4	16	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran terkait peningkatan sarana dan prasarana serta SDM di PPP Larangan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Realisasi dan pencapaian target dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan sulit untuk tercapai	3	3	9	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran terkait peningkatan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di PPP Larangan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	3	3	9
Tingkat pelanggaran sangat tinggi	4	3	12	Ada	kegiatan Sosialisasi peraturan Perundang - undang/Pemahaman Peraturan Perundangan	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Target produksi garam tidak tercapai	3	3	9	Ada	1. Memperkuat komitmen petambak dan petugas operator garam dalam melaporkan data produksi garam 2. Meningkatkan teknologi dan penggunaannya dalam produksi garam	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nilai Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) rendah	4	2	8	Ada	melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan konservasi, bekerjasama dengan yayasan yang peduli lingkungan untuk membantu kegiatan pengelolaan kawasan konservasi	Memadai	2	1	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produksi perikanan budidaya menurun	3	3	9	Ada	Memberikan bantuan kepada kelompok pembudidaya berupa benih dan pakan, memberikan pembinaan bagaimana budidaya ikan yang baik	Memadai	2	2	4
Indeks harga yang diteruma oleh pembudidaya rendah	2	4	8	Ada	Menjembatani hubungan pembudidaya dan konsumen	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak tercapainya produksi olahan ikan	3	3	9	Ada	Mengikutsertakan produk perikanan dalam kegiatan bazar, mengadakan pelatihan tentang digitalisasi produk maupun diversifikasi produk	Memadai	2	2	4
Lokasi penanaman mangrove yang dilakukan belum sesuai dengan pembagian lokasi penanaman dari Bappeda Jateng	4	3	12	Ada	Memetakan potensi lahan untuk rehabilitasi hutan mangrove	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya pelanggaran kegiatan perikanan tangkap terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	4	3	12	Ada	Koordinasi dan Sosialisasi di Desa/ Dinas Kab/Kota terkait pentingnya pengurusan dokumen kapal	Memadai	3	1	3
Keselamatan Petugas Pengawasan,	4	3	12	Ada	Pelatihan/bimtek SOP terkait keselamatan kerja ABK selama pengawasan	Memadai	2	2	4
Kurang tertatanya kepegawaian di CDK Barat	3	4	12	Ada	Pembagian pekerjaan sesuai dengan kompetensi staff	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi (daerah rawan sedimentasi atau daerah yang harus dilakukan pembersihan lahan dengan anggaran yang besar)	5	3	15	Ada	1. Survei lokasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, kelompok konservasi masyarakat setempat, dan penyuluh kehutanan 2. Peningkatan anggaran untuk pembersihan lahan	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaku usaha tidak mengetahui peraturan	5	4	20	Ada	Sosialisasi Peraturan	Memadai	3	4	12
Pelaku usaha tidak mengetahui peraturan	5	4	20	Ada	Sosialisasi Peraturan	Memadai	3	4	12
Intensitas patroli pengawasan yang rendah	3	4	12	Ada	Peningkatan intensitas patroli pengawasan	Memadai	2	4	8
Intensitas patroli pengawasan yang rendah	3	4	12	Ada	Peningkatan intensitas patroli pengawasan	Memadai	2	4	8
Ketergantungan nahkoda dan ABK dari Instansi lain	4	4	16	Ada	Bekerjasama dengan PSDKP	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lokasi penanaman mangrove yang dilakukan belum sesuai dengan pembagian lokasi penanaman dari Bappeda Jateng	4	4	16	Ada	Memetakan potensi lahan untuk rehabilitasi hutan mangrove	Memadai	3	3	9
Tidak tersedia data luas wilayah kerusakan mangrove	4	4	16	Ada	Rencana pengendaliannya dilakukan pemasangan apo sebelum dilakukan penanaman	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaku usaha tidak mengetahui peraturan terkait Perijinan Berusaha	3	4	12	Ada	- Melaksanakan penyadartahuan kepada pelaku usaha tentang peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan yang berlaku - Melaksanakan pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan terkait perijinan berusaha dan peraturan dan perundangan bidang kelautan dan Perikanan agar pelaku usaha bisa tertib - Bagi pelaku usaha yang tidak tertib diberikan sanksi administratif dan memfasilitasi/mendorong pelengkapan secara administrasi perijinan berusaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Periode patroli pengawasan yang rendah	4	4	16	Ada	Sosialisasi dan Clinic Perizinan	Memadai	3	3	9
Periode patroli pengawasan yang rendah	3	3	9	Ada	Peningkatan intensitas patroli pengawasan di wilayah perairan sampai 12 mil	Memadai	2	2	4
Kurang tertatanya kepegawaian di CDK Timur	3	4	12	Ada	Penunjukan Kepala Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan sebagai pelaksana tugas	Memadai	3	3	9
Kurang tertatanya kepegawaian di CDK Wilayah Timur	3	3	9	Ada	Pembagian pekerjaan sesuai dengan kompetensi staff	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penurunan jumlah dokumen kelayakan yang diterbitkan mencakup Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertiikat Hasil Analisis (Certificate Analysis Test) hasil perikanan	3	4	12	Ada	Melakukan pembinaan pada UPI dan pelaku usaha perikanan hingga agar mampu memenuhi standar serta memberikan pelayanan dalam pengujian mutu hasil perikanan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk hasil perikanan yang dihasilkan	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah tidak dapat berjalan secara optimal	3	3	9	Ada	Mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia secara optimal sesuai dengan kebutuhan	Memadai	2	3	6
Lambatnya penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi	2	4	8	Ada	Penyusunan RKPD dan Rakor POK	Memadai	1	2	2
Terlambatnya penyampaian data kepegawaian	2	3	6	Ada	Pengecekan secara berkala antara data kepegawaian dan data gaji	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terlambatnya klaim asuransi barang milik daerah (gedung dan kendaraan)	2	4	8	Ada	Memilih asuransi yang terpercaya	Memadai	1	2	2
Pemahaman regulasi kepegawaian yang kurang	2	4	8	Ada	Mendatangkan narasumber untuk memberikan pemahaman tentang regulasi kepegawaian	Memadai	1	2	2
Tidak lengkapnya dokumen kepegawaian masing masing ASN	2	4	8	Ada	Menyampaikan daftar nominatif ASN yang belum melengkapi dokumen kepegawaian	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan BMD masih belum semua terakomodir TKDN	2	4	8	Ada	Menaikkan pagu anggaran dalam pengadaan BMD	Memadai	1	2	2
Pagu dalam penyediaan jasa penunjang belum memadai	2	4	8	Ada	Memaksimalkan pagu anggaran yang telah ditetapkan	Belum Memadai	1	2	2
Pemeliharaan barang milik daerah tidak optimal	2	4	8	Ada	Memaksimalkan pagu anggaran yang telah ditetapkan	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nelayan kecil tidak mendapatkan bantuan premi asuransi nelayan	3	3	9	Ada	melakukan sosialisasi dan memfasilitasi nelayan kecil dengan melibatkan penyuluh perikanan di kabupaten kota	Memadai	0	0	0

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyedia memberikan gratifikasi agar terhadap item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dapat diterima dan dibayarkan 100%	5	5	25	Ada	PPK menunjuk tim teknis sebagai pendamping dari instansi teknis terkait, akademisi dan tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi di bidang konstruksi bangunan pelabuhan dan melibatkan inspektorat provinsi jawa tengah dalam tahap pelaksanaan kegiatan serta menerapkan nilai-dasar ASN BerAKHLAK terutama pada nilai Akuntabel dan kolaboratif	Memadai	0	0	0

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Data produksi perikanan tangkap belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya di daerah	3	4	12	Ada	Pengumpulan data statistik perikanan tangkap melibatkan petugas/operator di masing2 kabupaten/kota dan dilakukan validasi data tiap semester sehingga setiap data produksi dan nilai produksi telah dilakukan filter dan validasi, dimulai dari petugas dilapangan, operator dan petugas Validator di masing-masing kabupaten/kota, kemudian dilakukan validasi pada tingkat provinsi	Memadai	0	0	0

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ketertiban nelayan yang rendah dalam melengkapi dokumen kapal perikanan sesuai aturan yang berlaku dan memberikan gratifikasi untuk dibantu dipercepat dokumen perizinannya	5	5	25	Ada	Melakukan Sosialisasi dan Gerai Pelayanan Perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan Pengawasan kelengkapan dokumen kapal perikanan serta menerapkan nilai-dasar ASN BerAKHLAK terutama pada nilai Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel	Memadai	0	0	0

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nelayan tidak dapat melakukan penangkapan ikan secara efektif dan efisien	3	3	9	Ada	'1. Memberikan bantuan Teknologi Penangkapan Ikan sangat bermanfaat dan berguna bagi nelayan, serta dapat memudahkan nelayan dalam melakukan tangkap ikan di perairan; 2. Sosialisasi dan melakukan pendampingan dalam mengaplikasikan teknologi tersebut kepada nelayan	Memadai	0	0	0

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nelayan/ awak kapal perikanan tidak dapat bekerja sesuai dengan prosedur diatas kapal	3	3	9	Ada	Sosialisasi dan Pelatihan melalui paguyuban nelayan, HNSI, KNTI dan Penyuluh Perikanan	Memadai	0	0	0
Terjadinya penurunan stok sumberdaya ikan dan kerusakan lingkungan	3	3	9	Ada	'Sosialisasi melalui paguyuban nelayan, HNSI, KNTI dan Penyuluh Perikanan	Memadai	0	0	0

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	3	3	9	Ada	Sosialisasi bersama dengan instansi terkait dan stakeholder terkait peraturan perundang-undangan, dan pendampingan kepada nelayan oleh instansi terkait.	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	5	5	25	Ada	Sosialisasi bersama dengan instansi terkait dan stakeholder terkait peraturan perundang-undangan, dan pendampingan kepada nelayan oleh instansi terkait	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak tersusunnya dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	3	3	9	Ada	Pemenuhan data dukung yang akurat sebagai bahan penyusunan dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan dan penyesuaian dengan kondisi Pelabuhan eksisting yang sekarang, pembentukan tim penyusun dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan, koordinasi dengan pemerintah pusat (KKP) selaku koordinator penyusunan dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan.	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fasilitas Pelabuhan Perikanan banyak mengalami kerusakan (sedang dan parah)	3	4	12	Ada	Memasukan program pengembangan kawasan PPP Tegalsari sebagai program prioritas baik di pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemilihan/penunjukan penyedia jasa oleh Tim Pokja PBJ yang tidak kompeten	2	5	10	Ada	Melakukan pendampingan dan pengawasan dengan menggandeng Tim Pengawasan Eksternal (contoh: TP4D) mulai proses pemilihan penyedia jasa sampai pekerjaan selesai	Memadai	1	5	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Melakukan pendampingan dan pengawasan dengan menggandeng Tim Pengawasan Eksternal (contoh: TP4D) mulai proses pemilihan penyedia jasa sampai pekerjaan selesai	3	3	9	Ada	Sosialisasi dan pendampingan kepada pemilik kapal dan nelayan oleh instansi terkait	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SDM yang kurang kompeten dan terampil	2	3	6	Ada	Koordinasi dengan instansi terkait tentang informasi pelatihan kompetensi, pengajuan anggaran dan usulan pelatihan SDM	Memadai	2	2	4
Pelayanan administrasi umum daerah belum sesuai standar	2	3	6	Ada	Mengusulkan anggaran kegiatan, pelatihan pegawai dan evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1	2	2	Ada	Pelatihan pegawai sesuai tupoksinya, monitoring dan evaluasi internal secara periodik	Memadai	1	1	1
BMD dan kendaraan operasional mengalami kerusakan	2	4	8	Ada	Mengajukan jumlah anggaran yang optimal, perawatan kendaraan dinas secara rutin	Memadai	2	3	6
Tidak ada nya petugas syahbandar yang menetap di PPP Asemdayong	3	4	12	Belum Ada	Mengusulkan petugas syahbandar di PPP Asemdayong dari Internal DKP / Asemdayong	Belum Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fasilitas pelabuhan kurang memadai dan banyak yang mengalami penurunan fungsi	3	4	12	Ada	Monitoring terhadap kegiatan pendaratan ikan, mengusulkan kegiatan pengerukan di alur sungai elon.	Memadai	3	3	9
Tidak tersusunnya dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	3	3	9	Ada	Pemenuhan data dukung yang akurat sebagai bahan penyusunan dokumen pengembang Pelabuhan Perikanan dan penyesuain dengan kondisi Pelabuhan eksiting,	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelayanan kepada masyarakat kawasan PPP Asemtoyong tidak berjalan dengan baik	4	3	12	Ada	Memperbaiki Fasilitas Sarana Kebersihan (MCK) di Kawasan PPP Asemtoyong	Memadai	2	2	4
Pelaku usaha tidak memiliki sumber air bersih yang cukup	4	4	16	Ada	Pembuatan Sumur Bor Sederhana di Sekitar Kawasan Usaha	Memadai	2	2	4
Fasilitas pelabuhan kurang memadai dan banyak yang mengalami penurunan fungsi	3	4	12	Ada	Monitoring terhadap kegiatan pendaratan ikan, mengusulkan kegiatan pengerukan di alur sungai elon.	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nelayan tidak memahami mengenai pentingnya asuransi	3	3	9	Ada	'Sosialiasi dan pendampingan kepada nelayan dan pemilik kapal	Memadai	2	3	6
ABK tidak terlindungi hak nya dalam pemenuhan pendapatan dan jaminan kerja	4	3	12	Ada	Membuat PKL antara ABK dan Pemilik kapal, Pembinaan kepada nelayan dan ABK	Memadai	3	2	6
Pelayanan pada masyarakat tidak optimal	4	3	12	Ada	Upaya Perbaikan Papan Nama Kantor dengan Lebih Baik dan Informatif	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SDM yang kurang kompeten dan terampil	2	3	6	Ada	Usulan pelatihan diklat, monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan pelayanan	Memadai	2	2	4
Pelayanan administrasi umum daerah belum sesuai standar	2	3	6	Ada	Mengusulkan anggaran kegiatan, pelatihan pegawai dan evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1	2	2	Ada	Pelatihan pegawai sesuai tupoksinya, monitoring dan evaluasi internal secara periodik	Memadai	1	1	1
BMD dan kendaraan operasional mengalami kerusakan	2	4	8	Ada	Mengajukan jumlah anggaran yang optimal, perawatan kendaraan dinas secara rutin	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	3	3	9	Ada	Sosialisasi bersama dengan instansi terkait dan stakeholder terkait peraturan perundang-undangan, dan pendampingan kepada nelayan oleh instansi terkait.	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak tersusunnya dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	3	3	9	Ada	Pemenuhan data dukung yang akurat sebagai bahan penyusunan dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan dan penyesuaian dengan kondisi Pelabuhan eksisting yang sekarang, pembentukan tim penyusun dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan, koordinasi dengan pemerintah pusat (KKP) selaku koordinator penyusunan dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan.	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fasilitas Pelabuhan Perikanan banyak mengalami kerusakan (sedang dan parah)	3	4	12	Ada	Memasukan program pengembangan kawasan PPP Wonokerto sebagai program prioritas baik di pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemilihan/penunjukan penyedia jasa oleh Tim Pokja PBJ yang tidak kompeten	2	5	10	Ada	Melakukan pendampingan dan pengawasan dengan menggandeng Tim Pengawasan Eksternal (contoh: TP4D) mulai proses pemilihan penyedia jasa sampai pekerjaan selesai	Memadai	1	5	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Melakukan pendampingan dan pengawasan dengan menggandeng Tim Pengawasan Eksternal (contoh: TP4D) mulai proses pemilihan penyedia jasa sampai pekerjaan selesai	3	3	9	Ada	Sosialisasi dan pendampingan kepada pemilik kapal dan nelayan oleh instansi terkait	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SDM yang kurang kompeten dan terampil	2	3	6	Ada	Koordinasi dengan instansi terkait tentang informasi pelatihan kompetensi, pengajuan anggaran dan usulan pelatihan SDM	Memadai	2	2	4
Pelayanan administrasi umum daerah tidak optimal dan sesuai standar layanan	2	3	6	Ada	Melakukan pengajuan tambahan anggaran, melakukan pelatihan peningkatan serta ketrampilan SDM, dilakukan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Laporan penyediaan jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	1	2	2	Ada	Pelatihan dan peningkatan kompetensi operator, penataan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahliannya, digitalisasi arsip, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	2	4	8	Ada	Penambahan jumlah anggaran untuk pemeliharaan aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah, pelatihan kompetensi petugas aset barang, menyusun jadwal pemeliharaan berkala, percepatan penghapusan barang milik daerah yang rusak, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
pelayanan fungsi pemerintahan sudah berjalan lancar	3	3	9	Ada	mengusulkan peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kemampuan sdm	Memadai	3	3	9
perlu peningkatan fasilitas loss ikan	3	3	9	Ada	belum cukup anggaran untuk menangani/belum tersedianya anggaran	Memadai	3	3	9
luas lahan pelabuhan terbatas belum memenuhi standar	3	3	9	Ada	Pemenuhan dokumen pendukung pengembangan pelabuhan	Memadai	3	3	9
anggaran untuk pembangunan dan perawatan terbatas	3	3	9	Ada	pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kecelakaan kerja nelayan dan pelaku usaha tidak terjamin, kapal diatas 30 GT sudah mendapatkan asuransi dan PKL; sedangkan kapal dibawah 30 GT masih sebagian sedang berproses pembinaanya	3	3	9	Ada	perlu sosialisasi PKL dan Asuransi bagi Nelayan	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
peningkatan kompetensi dan ketrampilan untuk pegawai, nelayan dan pelaku usaha (melalui staff meeting, rembug gayeng, rakor SKPD)	3	3	9	Ada	mengikutkan SDM untuk pelatihan yang sesuai	Memadai	3	3	9
Kegiatan operasional administrasi umum perkantoran belum maksimal	3	3	9	Ada	mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun depan	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	3	3	9	Ada	Memenuhi Laporan	Memadai	3	3	9
kondisi kendaraan dinas dan asset milik daerah tidak dapat berfungsi dengan baik karena kurangnya pemeliharaan	3	3	9	Ada	mengusulkan penambahan anggaran untuk pemeliharaan asset barang milik daerah di PPP Klidang Lor	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SDM yang kurang kompeten dan terampil	2	3	6	Ada	Koordinasi dengan instansi terkait tentang informasi pelatihan kompetensi, pengajuan anggaran dan usulan pelatihan SDM	Memadai	2	2	4
Nelayan tidak memahami mengenai pentingnya asuransi	3	3	9	Ada	Sosialisasi dan pendampingan kepada pemilik kapal dan nelayan oleh instansi terkait	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
belum optimalnya pelayanan tambat labuh kapal perikanan	3	4	12	Ada	Memasukan pengerukan dan penyediaan sarpras sebagai program prioritas baik di pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak tersusunnya dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	3	3	9	Ada	Pemenuhan data dukung yang akurat sebagai bahan penyusunan dokumen pengembang Pelabuhan Perikanan dan penyesuain dengan kondisi Pelabuhan eksiting yang sekarang, pembentukan tim penyusun dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan, koordinasi dengan pemerintah pusat (KKP) selaku koordinator penyusunan dokumen pengembangan Pelabuhan Perikanan	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Belum optimalnya fungsi perusahaan di pelabuhan perikanan	3	3	9	Ada	Penyediaan sarpras, pembinaan SDM, Penyusunan dokumen pendukung pengelolaan PPP	Memadai	3	2	6
Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku dalam hal kelengkapan dokumen kapal dan penggunaan API	3	3	9	Ada	Sosialisasi bersama dengan instansi terkait dan stakeholder terkait peraturan perundang-undangan, dan pendampingan kepada nelayan oleh instansi terkait	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelayanan administrasi umum daerah tidak optimal dan sesuai standar layanan	2	3	6	Ada	Melakukan pengajuan tambahan anggaran, melakukan pelatihan peningkatan serta ketrampilan SDM, dilakukan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Laporan penyediaan jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	1	2	2	Ada	Pelatihan dan peningkatan kompetensi operator, penataan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahliannya, digitalisasi arsip, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	2	3	6	Ada	Penambahan jumlah anggaran untuk pemeliharaan aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah, pelatihan kompetensi petugas aset barang, menyusun jadwal pemeliharaan berkala, percepatan penghapusan barang milik daerah yang rusak, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi Pemerintahan tidak dapat dilaksanakan	2	2	4	Ada	Membuat pakta integritas, pengawasan berjenjang serta membuat reward and punishment	Memadai	1	1	1
Fungsi Pengusahaan tidak dapat dilaksanakan	2	2	4	Ada	Pembuatan Perjanjian Kerjasama dengan Pengguna Lahan dan pembayaran sewa dilakukan di kantor pelayanan	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak tersusunnya dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	2	1	2	Ada	Meningkatkan validitas pengumpulan data dan koordinasi antar instansi / lembaga	Memadai	1	1	1
Fasilitas Pelabuhan Perikanan tidak berfungsi optimal	4	3	12	Ada	Mencari alternatif sumber pembiayaan dari APBN dan / CSR	Memadai	3	2	6
Nelayan melaut tanpa dilengkapi PKL / Asuransi	4	3	12	Ada	Sosialisasi kepada nelayan	Memadai	4	2	8

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SDM tidak kompeten dan tidak terampil	3	1	3	Ada	Mencari alternatif diklat/pelatihan/bimtek online/bebas biaya atau melakukan in house training	Memadai	2	1	2
Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Standar Layanan tidak tercapai	3	2	6	Ada	Membuat SOP dan Melakukan Pelayanan kepada Pengguna Jasa berdasarkan SOP yang telah ditetapkan; Pengawasan Berjenjang	Memadai	2	1	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun tidak tersusun	2	1	2	Ada	Pengawasan Internal terhadap kegiatan Rutin	Memadai	1	1	1
Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah tidak berfungsi baik	2	2	4	Ada	Pengawasan Internal terhadap kegiatan Rutin	Memadai	1	1	1
Belum terealisasinya outcome pelatihan	3	3	9	Ada	Pendelegasian pekerjaan bagi SDM yang sedang mengikuti pelatihan kepada staf lain	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Belum lengkapnya dokumen administrasi persyaratan keberangkatan kapal	3	3	9	Ada	Sosialisasi dan pembinaan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan	Memadai	1	3	3
Adanya fasilitas rusak di Pelabuhan Perikanan yang belum mendapatkan perbaikan	3	3	9	Ada	Upaya Penyelesaian P3D serta Mengusulkan RAB pembangunan fisik fasilitas Pelabuhan Perikanan kepada KKP agar dapat diturunkan DAK	Memadai	1	3	3
Belum ada kejelasan wilayah kerja dan operasional PPP Bajomulyo	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan DKP Provinsi dan DKP Kab. Pati	Memadai	3	1	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terjadinya blooming enceng gondok yang menyumbat alur sungai	4	4	16	Ada	Melaksanakan bersih kawasan Pelabuhan Perikanan dan Alur Sungai Silugonggo	Belum Memadai	4	1	4
Adanya kepadatan kapal di alur pelayaran sungai silugonggo	4	4	16	Ada	Patroli rutin alur pelayaran oleh tim maritim terpadu (PPP Bajomulyo, Satpolairud Polresta Pati, Pos TNI AL Juwana, UPP Kelas III Juwana, dan TPI Juwana)	Memadai	3	1	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ketidakpatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan yang berlaku	3	3	9	Ada	Komunikasi efektif dengan pelaku usaha perikanan tangkap melalui Rembug Gayeng, Forum Koordinasi, dan Patroli rutin serta meningkatkan koordinasi dengan elemen Tim Terpadu Maritim terkait dengan adanya ketentuan kebijakan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masih banyaknya aktivitas nelayan dan pekerja pada kapal perikanan yang belum menerapkan kaidah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	4	4	16	Ada	Patroli/Monitoring Kapal Perikanan bersama instansi terkait yang terdiri dari PPP Bajomulyo, Satpolairud Polresta Pati, TNI AL Juwana, dan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Semarang Wilker Pelabuhan Juwana	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Adanya Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan	3	3	9	Ada	Review Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur pada setiap layanan di PPP Bajomulyo	Memadai	1	3	3
Kebutuhan jasa air PDAM dan listrik PLN yang tidak sesuai alokasi anggaran	3	3	9	Ada	Pencatatan fluktuasi ekstrim (tertinggi dan terendah) dan menyusun data historis sebagai dasar penyusunan anggaran pada tahun berikutnya	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terjadinya kerusakan barang milik daerah yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi	3	3	9	Ada	Menyusun jadwal pemeliharaan berkala dan mencatat jenis kerusakan yang pernah terjadi	Memadai	1	3	3
Pelayanan penerbitan dokumen kesyahbandaran berbayar	3	4	12	Ada	- Secara rutin melakukan pembinaan pegawai - melakukan mutasi internal secara berkala	Belum Memadai	2	4	8
Fungsi pemerintahan yang dilaksanakan tidak memadai	2	3	6	Ada	Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar ISO 9001/2015	Memadai	1	2	2
Fungsi perusahaan yang dilaksanakan terbatas	3	3	9	Ada	Menugaskan SDM untuk mengikuti pengembangan kompetensi	Belum Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mekanisme sewa lahan tidak sesuai peraturan yang berlaku	4	4	16	Ada	Melakukan patroli pengawasan secara rutin	Belum Memadai	4	4	16
Tidak ada dokumen pendukung pengembangan pelabuhan perikanan yang tersedia	3	3	9	Ada	- Menyusun proposal PKKPR - Melengkapi dokumen WKOPP	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fasilitas pelabuhan perikanan tidak layak pakai	2	3	6	Ada	- Melakukan renovasi bangunan secara bertahap - Menjadwalkan perbaikan/perawatan sarpras secara rutin (komputer, AC, kendaraan bermotor dll)	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kapal perikanan berangkat tanpa dilengkapi dengan perjanjian kerja laut	3	4	12	Ada	- Mewajibkan setiap kapal untuk dilengkapi dengan dokumen PKL - Tidak menerbitkan PB (Persetujuan Berlayar) bagi kapal yang tidak dilengkapi dengan PKL	Memadai	1	3	3
Tidak ada SDM yang meningkat kopetensinya	2	4	8	Ada	- Mengusulkan SDM untuk mengikuti pengembangan kompetensi - Melakukan pembinaan pegawai secara rutin	Belum Memadai	2	4	8

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Layanan administrasi tidak sesuai standar	2	3	6	Ada	- Melakukan perhitungan rencana anggaran secara cermat - Melakukan setiap kegiatan sesuai dengan rencana anggaran yang sudah disepakati	Memadai	1	2	2
Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tidak tersusun dengan baik	3	2	6	Ada	Setiap petugas bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan laporan (rekapitulasi kegiatan bulanan) sehingga pada akhir tahun tinggal menyusun saja	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak ada barang milik daerah yang terpelihara	1	3	3	Ada	Melakukan pengecekan terhadap bangunan dan barang yang sudah membutuhkan perawatan	Memadai	1	2	2
Pemeliharaan/pengadaan barang/jasa milik daerah tidak melalui sistem pengadaan yang benar	3	4	12	Ada	Selalu mengupayakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui prosedur yang disarankan	Memadai	2	3	6
Fungsi pelayanan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik	3	3	9	Ada	Peningkatan efesiensi SDM yang ada, Perbaikan dan melengkapi sarpras, peningkatan pelayanan	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi pelayanan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik	3	4	12	Ada	Peningkatan kualitas SDM, Pembinaan Tenaga pelaksanaan dan Monitoring dan pengawasan atasan	Memadai	2	3	6
Fungsi perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik	4	3	12	Ada	Peningkatan kualitas SDM, Pembinaan Tenaga pelaksanaan dan Monitoring dan pengawasan atasan	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fungsi perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik	4	3	12	Ada	Peningkatan kualitas SDM, Pembinaan Tenaga pelaksanaan dan Monitoring dan pengawasan atasan	Memadai	3	2	6
Kurangnya dokumen pendukung pengembangan pelabuhan	4	3	12	Ada	Pengajuan perencanaan anggaran data pendukung pelabuhan, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, perencanaan pembuatan dokumen pendukung.	Memadai	3	3	9
Fasilitas pelabuhan banyak yang rusak dan tidak layak	4	3	12	Ada	Perbaikan dan pemeliharaan, pengajuan anggaran	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Perbaikan fasilitas terhambat	4	3	12	Ada	Pemilihan rekanan yang profesional, monitoring dan pengawasan pekerjaan	Memadai	3	2	6
Perbaikan fasilitas terhambat	3	3	9	Ada	Pemilihan rekanan yang profesional, monitoring dan pengawasan pekerjaan	Memadai	2	3	6
Nelayan tidak memahami mengenai pentingnya asuransi / PKL	4	3	12	Ada	Sosialiasi dan pendampingan kepada pemilik kapal serta nelayan oleh instansi terkait	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SDM yang kurang kompeten dan terampil	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan instansi terkait tentang informasi pelatihan kompetensi, pengajuan anggaran dan usulan pelatihan SDM	Memadai	2	2	4
Pelayanan administrasi umum daerah tidak optimal dan sesuai standar layanan	3	3	9	Ada	Melakukan pengajuan tambahan anggaran, melakukan pelatihan peningkatan serta ketrampilan SDM, dilakukan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Laporan penyediaan jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	3	3	9	Ada	Pelatihan dan peningkatan kompetensi operator, penataan tenaga kerja sesuai dengan bidang keahliannya, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	2	4	8	Ada	Penambahan jumlah anggaran untuk pemeliharaan aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah, pelatihan kompetensi petugas aset barang, menyusun jadwal pemeliharaan berkala, percepatan penghapusan barang milik daerah yang rusak, dan monitoring evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan perijinan dan kegiatan operasional kapal perikanan belum terlaksana secara maksimal	4	4	16	Ada	Sosialisasi, pengadaan sarpras (CCTV)	Belum Memadai	2	2	4
Nelayan belum terjamin oleh asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	3	3	9	Ada	Sosialisasi dan koordinasi terkait asuransi nelayan	Memadai	2	1	2
SDM tidak kompeten dan kurang terampil	2	2	4	Ada	Koordinasi dan pembinaan personil	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Percepatan pengembangan pelabuhan terhambat	2	3	6	Ada	Peningkatan kemampuan SDM, Koordinasi dengan instansi terkait	Memadai	2	1	2
Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan	3	3	9	Ada	Sosialisasi, pengadaan kontainer sampah dan pemeliharaan jaringan air	Memadai	2	1	2
Kurangnya fasilitas pokok, penunjang, fungsional yang dimiliki pelabuhan	4	3	12	Ada	Pembuatan turap	Memadai	3	3	9
Pegawai kurang kompeten	2	2	4	Ada	Pembagian tugas bagi pegawai secara merata	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pembayaran tagihan langganan listrik/ air/ telepon/ internet tidak terpenuhi	3	3	9	Ada	Penambahan anggaran tagihan langganan listrik/ air/ telepon/ internet	Memadai	1	1	1
Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan Barang Milik Daerah	3	2	6	Ada	Penentuan skala prioritas pemeliharaan	Memadai	1	1	1
Kurangnya media/reagen dan peralatan di laboratorium	3	3	9	Ada	Rekapitulasi penggunaan dan kebutuhan media/reagen dan peralatan	Memadai	3	4	12
Menurunnya jumlah sampel yang diujikan	3	3	9	Ada	Promosi dan penyebaran informasi layanan pengujian melalui media sosial BLPKIL	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurangnya jumlah jenis pelatihan yang dimiliki petugas laboratorium untuk mendukung penambahan ruang lingkup	3	3	9	Ada	Peningkatan kompetensi petugas laboratorium melalui magang/pelatihan	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak terlaksananya pencegahan dan pengendalian hama penyakit ikan pada lingkungan budidaya	3	3	9	Ada	Telah dibentuk tim pengendali hama penyakit ikan berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah No. 523.6/53/1 Tahun 2022 serta Sosialisasi pencegahan dan penanganan hama penyakit ikan kepada masyarakat/pelaku usaha budidaya perikanan	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Resistensi antimikroba dan penggunaan obat ikan tidak terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan PerMen-KP No.1 Tahun 2019	3	3	9	Ada	Pendataan peredaran obat ikan pada 35 Kab/Kota di Jawa Tengah	Memadai	2	2	4
Pelaku usaha tidak melakukan pengendalian hama penyakit ikan	3	3	9	Ada	Sosialisasi kepada pelaku usaha	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terhambatnya aktivitas perkantoran	3	3	9	Ada	Pemeliharaan secara berkala	Memadai	2	2	4
Kurang maksimalnya pelayanan perkantoran	3	3	9	Ada	Rutin pembayaran sesuai jatuh tempo	Memadai	2	2	4
Ketidaknyamanan pelanggan dan terganggunya aktifitas pelayanan pengujian laboratorium	3	3	9	Ada	Pengusulan rehabilitasi gedung kantor	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Balai dalam memproduksi benih, calin dan ikan konsumsi kurang optimal	3	2	6	Ada	Peningkatan sarana dan Prasarana Pembenihan dan Budidaya Ikan di Loka	Memadai	2	2	4
Balai dalam memproduksi ikan konsumsi kurang optimal	3	2	6	Ada	Pengoptimalan Penggunaan Sarpras Produksi Budidaya Ikan Konsumsi	Memadai	2	2	4
Balai dalam memproduksi ikan endemik lokal hasil domestikasi masih terbatas	3	2	6	Ada	Pengoptimalan Penggunaan Sarpras Produksi Budidaya Ikan Konsumsi	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Balai dalam memproduksi benih, calon dan ikan konsumsi kurang optimal	3	2	6	Ada	perbaikan kondisi dan kelayakan kolam budidaya	Memadai	2	2	4
Balai dalam memproduksi benih, unggul kurang optimal	3	2	6	Ada	Pengoptimalan Penggunaan Sarpras Produksi Budidaya Ikan benih unggul	Memadai	2	2	4
Balai dalam memproduksi calon induk kurang optimal	3	2	6	Ada	Pengoptimalan Penggunaan Sarpras Produksi Budidaya Calon Induk Bermutu	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Balai belum mengembangkan teknologi budidaya terbaru	3	2	6	Ada	Peningkatan keterampilan Tenaga Teknis (SDM) Loka	Memadai	2	2	4
Balai dalam memproduksi ikan konsumsi payau dan tawar kurang optimal	3	2	6	Ada	Pengoptimalan Penggunaan Sarpras Produksi Budidaya Ikan Konsumsi	Memadai	2	2	4
Balai dalam memproduksi benih, unggul ikan air tawar kurang optimal	3	2	6	Ada	Pengoptimalan Penggunaan Sarpras Produksi Budidaya Ikan benih unggul ikan air tawar	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
pemilihan/penunjukan penyedia jasa yang tidak kompeten	3	2	6	Ada	penerapan tender/lelang secara elektronik dan bersifat rasional, melakukan monev pengadaan barang dan jasa secara berkala	Memadai	2	2	4
Balai dalam pemilihan/penunjukan penyedia jasa yang tidak kompeten	3	2	6	Ada	penerapan tender/lelang secara elektronik dan bersifat rasional, melakukan monev pengadaan barang dan jasa secara berkala	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
pemilihan/penunjukan penyedia jasa yang tidak kompeten	3	2	6	Ada	penetapan HPS dalam pengadaan barang dan jasa	Memadai	2	2	4
Pelayanan administrasi umum daerah belum sesuai standar	3	2	6	Ada	Mengusulkan anggaran kegiatan, pelatihan pegawai dan evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	2	4
Laporan penyediaan jasa dan kegiatan tidak tersusun dengan baik	3	2	6	Ada	Pelatihan pegawai sesuai tupoksinya, monitoring dan evaluasi internal secara periodik	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemanfaatan BMD kurang optimal	3	2	6	Ada	Mengajukan jumlah anggaran yang optimal agar perawatan kendaraan dinas dan BMD lainnya bisa secara rutin	Memadai	2	2	4
Ketertiban nelayan yang rendah dalam melengkapi dokumen kapal perikanan sesuai aturan yang berlaku	4	4	16	Ada	Mendampingi nelayan yang kesulitan dalam pengurusan perijinan kapal secara online dan melakukan pengawasan kelengkapan dokumen kapal perikanan	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ketertiban penyewa lahan yang rendah dalam membayar retribusi sewa lahan	4	4	16	Ada	Melakukan kegiatan penarikan retribusi sewa lahan yang dijadwalkan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran penyewa lahan	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak tersusunnya dokumen administrasi pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	4	4	16	Ada	Melakukan pengajuan peningkatan kelas dan penyusunan dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Akses keluar dan masuk kawasan pelabuhan yang sulit dilewati	4	4	16	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran perbaikan akses jalan masuk ke kawasan pelabuhan perikanan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Trip harian kapal nelayan yang terhambat oleh pendangkalan kolam pelabuhan dan alur sungai serta kapasitas kolam pelabuhan yang sudah penuh	4	4	16	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran perubahan pintu masuk kolam pelabuhan dan anggaran perluasan kolam pelabuhan kepada kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Keamanan dan keselamatan kerja dari nelayan yang belum terjamin oleh asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	3	3	9	Ada	Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada pemilik kapal dan nelayan agar segera mengurus asuransi nelayan	Belum Memadai	3	3	9
Kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh pegawai PPP Larangan	4	4	16	Ada	Melakukan pengajuan dan partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan dan penambahan pegawai di PPP Larangan	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kegiatan operasional perkantoran di PPP Larangan yang kurang maksimal	3	3	9	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran untuk fasilitas kantor di PPP Larangan	Belum Memadai	3	3	9
Adanya perubahan biaya jasa penunjang urusan pemerintah daerah dari anggaran yang sudah disusun	3	3	9	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran untuk fasilitas penunjang urusan pemerintah daerah di PPP Larangan	Belum Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kondisi aset barang dan kendaraan milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan	3	3	9	Ada	Melakukan pengajuan penambahan anggaran untuk pemeliharaan aset barang dan kendaraan di PPP Larangan	Belum Memadai	3	3	9
Tingkat pelanggaran tinggi	4	3	12	Ada	Sosialisasi peraturan / Pemahaman Usaha Peraturan Perundang Undangan	Memadai	3	2	6
Pelaku usaha tidak Mengetahui Peraturan perundang-undangan	4	3	12	Ada	Peningkatan pengawasan ke pelaku usaha Sektor KP	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sumberdaya kelautan dan perikanan tidak terawasi dengan baik	4	3	12	Ada	Pembinaan	Memadai	3	2	6
Pelaku usaha tidak mengetahui peraturan perundang-undangan	4	3	12	Ada	Sosialisasi peraturan / Pemahaman Peraturan Perundang undangan	Memadai	3	2	6
Rendahnya periode operasi pengawasan sektor KP	4	3	12	Ada	Peningkatan operasi pengawasan Sektor KP	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Adanya praktek suap dan pengaturan pemenang lelang pengadaan Kajian Kawasan Konservasi Perairan Kab. Brebes	3	4	12	Ada	Proses pemilihan dilakukan secara profesional, terbuka dan segala proses pengadaan melalui aplikasi LPSE	Memadai	2	1	2
Kategori kawasan konservasi yang diusulkan tidak sesuai dengan Permen KP No 31 Tahun 2020	4	2	8	Ada	Melakukan kajian usulan lokasi kawasan konservasi secara detail dan komprehensif	Memadai	2	1	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak tercapainya jumlah stakeholder yang memahami peraturan terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	4	2	8	Ada	Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara aktif, efektif dan interaktif	Memadai	2	1	2
Pemanfaatan ruang laut tidak sesuai dengan alokasi ruang RTRWP	4	2	8	Ada	Sosialisasi RTRWP dan berkolaborasi dengan instansi terkait pengawasan pemanfaatan ruang laut	Memadai	2	1	2
KUGAR tidak terakses teknologi	3	2	6	Ada	Verifikasi lapangan terkait kondisi kelompok calon penerima bantuan	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Adanya praktek suap dan pengaturan pemenang lelang pengadaan	3	2	6	Ada	Proses pemilihan dilakukan secara profesional, terbuka dan segala proses pengadaan melalui aplikasi LPSE	Memadai	1	2	2
Adanya gratifikasi dari penyedia karena ditetapkan sebagai pemenang pengadaan	3	2	6	Ada	Membuat pernyataan dalam Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penyedia tidak akan melakukan gratifikasi serta praktek KKN lainnya pada pemilik pekerjaan	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Adanya gratifikasi dari penerima bantuan	3	2	6	Ada	Membuat pernyataan dalam Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penerima bantuan tidak akan melakukan gratifikasi serta praktek KKN lainnya pada pemilik pekerjaan serta melakukan verifikasi kelompok calon penerima bantuan bersama-sama dengan Dinas kabupaten/kota terkait	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KUGAR tidak terbina	2	2	4	Ada	Menjaring data KUGAR dan atau petambak garam yang akan dibina ke Pemerintah Kabupaten	Memadai	1	1	1
Potensi sentra garam rakyat tidak terdata	1	2	2	Ada	Mengokohkan komitmen operator garam dari Kabupaten	Memadai	1	2	2
Kelompok masyarakat pesisir tidak mendapat bantuan sarana prasarana usaha	2	2	4	Ada	Menjaring data taruna pesisir yang aktif dan layak untuk dapat diberikan hibah bantuan ke Pemerintah Kabupaten	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Adanya praktek suap dan pengaturan pemenang lelang pengadaan	3	2	6	Ada	Proses pemilihan dilakukan secara profesional, terbuka dan segala proses pengadaan melalui aplikasi LPSE	Memadai	1	2	2
Adanya gratifikasi dari penyedia karena pemenang pengadaan	3	2	6	Ada	Mebuat pernyataan dalam Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penyedia tidak akan melakukan gratifikasi serta praktek KKN lainnya pada pemilik pekerjaan	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Adanya gratifikasi dari penerima bantuan	3	2	6	Ada	Mebuat pernyataan dalam Pakta Integritas yang menyatakan bahwa penerima bantuan tidak akan melakukan gratifikasi serta praktek KKN lainnya pada pemilik pekerjaan serta melakukan verifikasi kelompok bersama-sama dengan Dinas kabupaten/kota terkait	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengelolaan perikanan budidaya dianggap baik apabila memenuhi standar yang telah ditentukan meliputi CPIB, CPPIB dan CBIB. Pelaku usaha pembudidaya skala kecil belum melaksanakan kegiatan pembudidayaan sesuai dengan standar yang berlaku	4	2	8	Ada	sosialisasi pentingnya perizinan usaha budidaya pembinaan CPIB, CBIB, dan CPPIB	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kualitas bantuan rendah	2	4	8	Ada	'- proses seleksi calon penyedia jasa secara terbuka - pendampingan oleh aparaturngawasan internal	Memadai	1	2	2
Rendahnya tingkat pemanfaatan bantuan	2	4	8	Ada	- verifikasi penerima bantuan secara berjenjang - penelaahan proposal bantuan dengan lebih mendalam	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelatihan peningkatan keterampilan bagi pembudiaya yang kurang optimal	3	3	9	Ada	mengadakan pelatihan disertai dengan praktik langsung di lapangan	Memadai	2	2	4
Rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan perizinan	2	4	8	Ada	sosialisasi dan fasilitasi perizinan berusaha melalui gerai SKP	Memadai	2	1	2
Tidak semua pelaku usaha terpromosikan	2	4	8	Ada	Promosi melalui media sosial dan mengikutsertakan pada kegiatan bazar	Memadai	2	1	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelatihan peningkatan keterampilan yang kurang optimal	2	4	8	Ada	mengadakan pelatihan peningkatan keterampilan seperti pelatihan diversifikasi produk	Memadai	2	1	2
Rendahnya tingkat pemanfaatan bantuan	2	4	8	Ada	verifikasi penerima bantuan secara berjenjang serta penelaahan proposal bantuan dengan lebih mendalam	Memadai	2	1	2
Pemetaan dan Pemantauan Logistik tidak tersusun	2	4	8	Ada	fasilitasi pendataan dengan mempertemukan antara pelaku usaha dan penyedia jasa logistik	Memadai	2	1	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tingkat kematian bibit mangrove pasca penanaman cukup tinggi dikarenakan lingkungan penanaman yang kotor, kriteria lokasi/sedimen kurang sesuai, pemeliharaan bibit tidak maksimal sebelum penanaman	3	3	9	Ada	"- Pemilihan bibit mangrove yang baik - Pemilihan lokasi tanam yang sesuai habitatnya - Mencari waktu tanam sesudah musim Barat (menghindari gelombang dan cuaca ekstrim) - Adanya masa pemeliharaan 90 hari setelah penanaman"	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Lokasi penanaman mangrove yang dilakukan belum sesuai dengan pembagian lokasi penanaman dari Bappeda Jateng "	3	3	9	Ada	- Survei untuk menentukan lokasi yang aman dan sesuai untuk penanaman mangrove	Memadai	2	2	4
Keselamatan petugas pada saat penenggelaman Terumbu Karang Buatan (TKB)	3	3	9	Ada	- Pemantauan cuaca sebelum penenggelaman TKB - Koordinasi dengan team penenggelaman TKB untuk menghindari kecelakaan kerja	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelanggaran pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan	4	3	12	Ada	- Sosialisasi stakeholder yang berkaitan - Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi perairan	Memadai	2	2	4
Jumlah penerbitan perizinan berusaha masih rendah	3	2	6	Ada	Sosialisasi dan pendampingan penerbitan perizinan berusaha yang dihadiri pelaku usaha dan petugas perizinan kabupaten/kota	Memadai	3	1	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya pelanggaran kegiatan perikanan tangkap terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	4	3	12	Ada	- Koordinasi dan Sosialisasi di Desa/ Dinas Kab/Kota terkait pentingnya pengurusan dokumen kapal	Memadai	3	1	3
Keselamatan Petugas Pengawasan	3	3	9	Ada	- Pemeliharaan kapal secara rutin - Peningkatan kompetensi ABK	Memadai	3	1	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	3	3	9	Ada	- Menambah papan pengumuman/banner di pelabuhan perikanan sebagai alat bantu sosialisasi	Memadai	2	2	4
Serapan anggaran tidak terpenuhi 100%	2	2	4	Ada	Pembelian lewat pengadaan langsung	Memadai	1	3	3
Kurang tertatanya kepegawaian di CDK Barat	3	3	9	Ada	Pembagian pekerjaan sesuai dengan kompetensi staff	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak terpenuhi pembayaran tarif listrik dalam 1 tahun	3	3	9	Ada	Perencanaan anggaran tahun yad dinaikkan anggaran tarif listrik	Memadai	1	3	3
Kerusakan barang inventaris kantor	2	2	4	Ada	Penambahan anggaran pemeliharaan	Memadai	1	2	2
Mangrove yang ditanam mengalami kerusakan, kematian, atau hilang terkena ombak	3	3	9	Ada	Survei untuk menentukan lokasi yang aman dan sesuai untuk penanaman mangrove	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah penerbitan perizinan berusaha masih rendah	3	3	9	Ada	Pendampingan penerbitan perizinan berusaha yang dihadiri pelaku usaha dan petugas perizinan kabupaten/kota	Memadai	2	2	4
SDM petugas kurang memadai	1	2	2	Ada	Peningkatan kompetensi dan pengawasan gabungan dengan pihak terkait	Memadai	1	1	1
Operasional kapal pengawasan yang mahal	3	3	9	Ada	Penambahan anggaran operasional kapal pengawasan	Belum Memadai	3	3	9
SDM petugas kurang memadai	1	2	2	Ada	Peningkatan kompetensi dan pengawasan gabungan dengan pihak terkait	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Harga barang di GO lebih tinggi dari RAB sehingga tidak dapat melakukan transaksi	2	3	6	Ada	Penyusunan rencana anggaran pembelian barang disesuaikan dengan harga barang pada aplikasi GO	Memadai	1	1	1
Tidak terpenuhinya pembayaran tarif listrik	3	4	12	Ada	Perencanaan anggaran tahun yang akan datang dinaikkan anggaran tarif listriknya	Belum Memadai	3	4	12
Barang yang rusak tidak dapat segera diperbaiki	2	3	6	Ada	Penambahan Anggaran Pemeliharaan	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penanaman Mangrove dilakukan pada lokasi yang memiliki resiko kematian yang tinggi	3	3	9	Ada	Survei dan identifikasi lokasi penanaman mangrove	Memadai	2	2	4
Pengelolaan kawasan konservasi belum dikelola secara berkelanjutan	4	4	16	Ada	Meningkatkan kualitas SDM pengelola dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi	Memadai	3	3	9
Jumlah penerbitan perizinan berusaha masih rendah	3	3	9	Ada	sosialisasi dan pendampingan penerbitan perizinan berusaha	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Petugas pengawasan tidak kompeten	3	3	9	Ada	Mengikuti pelatihan dan bimtek pengawasan SDKP	Memadai	2	2	4
Periode patroli pengawasan yang rendah	3	3	9	Ada	Peningkatan intensitas patroli pengawasan di wilayah perairan sampai 12 mil hingga cakupan perairan pantura timur wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Memadai	2	2	4
Petugas pengawasan tidak kompeten	3	3	9	Ada	Mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimtek pengawasan SDKP	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak terpenuhinya pembelanjaan Barang sesuai RAB	1	3	3	Ada	mencari harga yang sesuai dengan RAB	Memadai	1	2	2
Tidak terpenuhinya pembayaran tarif listrik	3	3	9	Ada	Dilakukan penambahan anggaran melalui perubahan anggaran	Memadai	3	2	6
Barang yang rusak tidak dapat segera diperbaiki	2	3	6	Ada	Penambahan anggaran pemeliharaan pada saat perubahan	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah UPI yang dibina dan produk perikanan yang dimonitoring tidak sebanding dengan anggaran	3	4	12	Ada	pembinaan kepada UPI menggunakan metode Remote Assement dan menginventarisir UPI yang perlu dibina dengan menggunakan skala prioritas (yang perlu dikunjungi secara langsung)	Memadai	3	3	9
keengganan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi SNI	3	3	9	Ada	Melakukan sosialisasi melalui media digital, melakukan penjangkaran klien	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak terpenuhinya target CAT	3	3	9	Ada	Terus melakukan pemeliharaan ruang lingkup pengujian yang sudah terakreditasi (20 parameter)	Memadai	3	2	6
peralatan pengujian kurang optimal karena banyak yang rusak dan butuh perbaikan	3	4	12	Ada	Terus Updating teknologi peralatan laboratorium	Belum Memadai	3	3	9
Ketersediaan media dan reagen pengujian yang tidak mencukupi	3	4	12	Ada	Pengajuan Surat Rekomendasi Penggunaan Media dengan TKDN 0%	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kurang optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kantor	3	3	9	Ada	Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana prioritas	Memadai	2	2	4
Terhambatnya kegiatan pelayanan akibat terhentinya suplai air dan listrik untuk kegiatan operasional	2	3	6	Ada	Melakukan komunikasi dengan penyedia jasa	Memadai	1	2	2
Kurang optimalnya kegiatan operasional kantor dan pelayanan	3	3	9	Ada	Mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas berdasarkan skala prioritas	Memadai	2	3	6

Tabel 3
Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program				
Jumlah ikan hasil tangkapan di laut jawa menurun	12	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Kerusakan habitat ikan	Lokasi penangkapan ikan semakin jauh dan kebutuhan perbekalan melaut bertambah
Pelayanan Kepelabuhan tidak maksimal	16	Kepala PPP Lohgending	Tidak tersedianya sapras yang memadai	Rendahnya kepuasan publik atas layanan PPP Lohgending
Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta pengawasan dan keamanan operasional pelabuhan tidak berjalan optimal	16	Kepala PPP Lohgending	kurangnya sapras dan pengawasan kegiatan nelayan di kawasan pelabuhan	Pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan dan kegiatan operasional kapal perikanan tidak optimal, Jumlah kapal di kawasan pelabuhan kurang termonitor
Rendahnya penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan	16	Kepala PPP Lohgending	kurangnya fasilitas yang memadai	pemanfaatan Fasilitas pelabuhan terlaksana kurang optimal
percepatan pengembangan pelabuhan terhambat	16	Kepala ppp Lohgending	Belum adanya sertifikat tanah pelabuhan sebagai salah satu bentuk penguasaan terhadap suatu wilayah kerja	Penyusunan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) terhambat
kurangnya fasilitas pokok, penunjang, fungsional yang dimiliki pelabuhan	16	Kepala PPP Lohgending	sapras tidak memadai	Kegiatan operasional pelabuhan terhambat

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
nelayan belum terjamin oleh asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)	16	Kepala PPP Lohgending	Kurangnya kesadaran nelayan/pemilik kapal akan pentingnya asuransi	Nelayan tidak memperoleh santunan jika terjadi laka laut
SDM tidak kompeten dan kurang terampil	16	Kepala PPP Lohgending	SDM tidak cakap melayani	Pelayanan PPP Lohgending tidak optimal
Pelayanan dan kinerja terhambat	16	Kepala PPP Lohgending	Pegawai tidak kompeten	kegiatan Operasional kedinasan tidak terpenuhi, nilai kepuasan msyarakat menurun
Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan <u>Barang Milik Daerah</u>	12	Kasubbag TU	Barang Milik Daerah yang rusak tidak dapat diperbaiki	kegiatan pelayanan dan operasional kantor terhambat
Wabah penyakit ikan tertentu tidak tertangani	12	BLPKIL	Kompetensi dan fasilitas pengujian belum ada	Sebaran Hama dan Penyakit Ikan semakin meluas
Kegiatan operasional tidak berjalan dengan baik	12	BLPKIL	SOP operasional tidak diterapkan	Ketidakpuasan pelanggan dan penurunan kinerja pegawai
adanya kerusakan pada rumah jaga di karamba jaring apung	10	Kepala BBIAPL Kelas A	terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi tidak tercapai
Terhambatnya pelayanan kepelabuhanan yang diberikan kepada nelayan	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan anggaran dalam peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana dan SDM di PPP Larangan	Penurunan nilai produksi perikanan tangkap dan ekonomi di PPP Larangan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Lokasi penanaman merupakan daerah rawan sedimentasi atau daerah yang harus dilakukan pembersihan lahan dengan anggaran yang besar	Target rehabilitasi mangrove yang sesuai dengan pembagian wilayah penanaman dari Bappeda Jateng tidak dapat terpenuhi
Terjadinya Peningkatan Kasus Pelanggaran	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Kurangnya kepedulian pelaku usaha terhadap kelengkapan dokumen berusaha	Kapal perikanan beroperasi tanpa dilengkapi dokumen periznan yang berlaku
Ketergantungan nahkoda dan ABK dari Instansi lain	16	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Tidak ada tenaga Nahkoda dan ABK kapal pengawasan CDK Wil Selatan	Kegiatan pengawasan terhambat
Lokasi penanaman mangrove yang ditentukan Bappeda Jateng kurang sesuai untuk direhabilitasi	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Lokasi penanaman mangrove berada pada pesisir yang berbatasan langsung dengan laut	Target luas lahan penanaman mangrove yang direhabilitasi tidak terpenuhi
Kegiatan				
Pemberian gratifikasi pada pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa	16	Ketua Kelompok Kerja Kepelabuhan dan Kenelayanan	Penyelesaian pekerjaan konstruksi oleh penyedia tidak selesai tepat waktu dan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak	Kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan kerugian negara
Pelayanan tambat labuh tidak dapat dilaksanakan	15	Kepala PPP Tawang	Sedimentasi di sepanjang dermaga	Fasilitas plabuhan perikanan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dokumen administrasi pendukung pengembangan pelabuhan tidak tersusun	12	Kepala PPP Tawang	Data dukung pelabuhan perikanan tidak update dan akurat	Pengembangan pelabuhan perikanan terhambat
Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak berjalan	15	Kepala PPP Tawang	Dokumen perizinan kapal tidak lengkap	Ketidakteraturan aktivitas perikanan tangkap
Mekanisme sewa lahan tidak sesuai peraturan yang berlaku	16	Kepala PPP Tasikagung	Kurangnya pengawasan	Layout kawasan pelabuhan tidak sesuai masterplan
Media/reagen dan peralatan di laboratorium tidak tersedia, rusak dan kadaluarsa	12	BLPKIL	Penambahan Ruang Lingkup disetiap laboratorium membutuhkan support peralatan dan media reagen	Parameter pengujian tertentu tidak dapat diujikan dan tidak tersertifikasi
Petugas laboratorium tidak kompeten dalam pengujian	12	BLPKIL	Penyelenggara pelatihan tidak menyediakan jenis kompetensi penunjang kegiatan laboratorium	Kompetensi petugas laboratorium berpengaruh dalam penambahan ruang lingkup parameter pengujian
Hama Penyakit Ikan di lingkungan budidaya tidak terkendali	12	BLPKIL	Monitoring dan pengendalian HPI tidak dilakukan diseluruh pembudidaya di Jawa Tengah	Produksi ikan budidaya menurun
Ketidakpuasan pelanggan dan terganggunya aktivitas pelayanan BLPKIL	12	BLPKIL	Sarana dan prasarana yang tidak memadai	Kondisi barang dan peralatan kantor penunjang pelayanan rusak

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bak pembenihan tidak dapat digunakan	10	Kepala BBIAPL Kelas A	Bak pembenihan retak/bocor/rusak	Target produksi tidak tercapai
Adanya kerusakan pada rumah jaga di karamba jaring apung	10	Kepala BBIAPL Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi tidak tercapai
Ketrampilan teknis pegawai stagnan	10	Kepala BBIAPL Kelas A	tidak adanya pelatihan ketrampilan teknis bagi pegawai	Kurang optimalnya produktivitas budidaya di masing-masing lokasi
Kolam bocor/retak/rusak	10	Kepala BBIAPL Kelas A	Terdapat fasilitas yang kurang memenuhi standar pembudidayaan ikan	target produksi ikan endemik tidak tercapai
Kolam tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya	10	Kepala BBIAPL Kelas A	Adanya kebocoran pada kolam budidaya	target produksi tidak tercapai
kolam tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya	10	Kepala BBIAPL Kelas A	Adanya kerusakan pada kolam pendederan dan pemijahan	target produksi benih tidak tercapai
Debit air yang masuk ke kolam berkurang	10	Kepala BBIAPL Kelas A	Adanya kerusakan pada saluran air	target produksi induk bermutu tidak tercapai
Kolam tidak dapat digunakan untuk kegiatan budidaya	10	Kepala BBIAPL Kelas A	adanya kebocoran pada kolam budidaya	target produksi ikan konsumsi tidak tercapai
Bak pembenihan bocor/retak/rusak	10	Kepala BBIAPL Kelas A	Terdapat fasilitas budidaya benih yang kurang memadai	target produksi benih unggul tidak tercapai

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelanggaran kepatuhan nelayan terhadap kelengkapan dokumen kapal yang harus dibawa saat melaut	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan kemampuan SDM nelayan di PPP Larangan dalam mengurus perijinan kapal secara online dan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang	Pemberian sanksi kepada nelayan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen kapal sesuai aturan yang ada
Pelanggaran kesepakatan pembayaran dari perjanjian sewa lahan yang sudah diterbitkan	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Kurangnya kesadaran dari penyewa lahan untuk membayar retribusi sewa lahan	Target PAD retribusi sewa lahan yang tidak terpenuhi
Waktu penyusunan dokumen administrasi pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan yang lebih lama	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Terhambatnya penyusunan dokumen administrasi pengembangan Pelabuhan Perikanan oleh status kelas pelabuhan yang ditetapkan oleh KKP	Pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan yang terhambat dan tidak bisa dilaksanakan
Akses keluar dan masuk kawasan pelabuhan yang semakin rusak dan sulit dilewati	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan anggaran untuk perbaikan akses jalan masuk kawasan pelabuhan	Penurunan jumlah pengunjung dan pelaku usaha di kawasan PPP Larangan
Kolam pelabuhan dan alur pelayaran yang semakin dangkal dan sempit	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan Anggaran untuk perubahan pintu masuk dan perluasan kolam pelabuhan	Penurunan jumlah trip harian dan nilai produksi perikanan tangkap di PPP Larangan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Waktu penyelesaian pelayanan yang lebih lama dengan kualitas yang rendah	12	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B	Keterbatasan jumlah SDM pegawai di PPP Larangan yang kompeten dalam memberikan pelayanan	Penurunan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di PPP Larangan
Adanya praktek gratifikasi dalam pengadaan Hibah Sarpras Garam	10	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Hubungan pertemanan/kekerabatan dan atau pihak penyedia menginginkan pekerjaan tersebut	Kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan
Ikan hasil produksi, benih, dan pakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kriteria pasar	10	Kepala Bidang UPK	Pelaku usaha belum memahami pentingnya perizinan usaha budidaya (CPIB, CBIB, dan CPPIB)	Ikan konsumsi, benih, dan pakan yang dihasilkan tidak terjual dipasaran dan tidak dapat masuk ke pangsa pasar yang lebih luas
Pembudidaya tidak menerapkan teknologi budidaya secara berkelanjutan	12	Kepala Bidang UPK	Pembudidaya belum menguasai teknologi budidaya yang diterapkan	Bantuan yang diberikan mangkrak dan tidak dimanfaatkan kembali
Dana hibah yang diberikan tidak dibelanjakan oleh kelompok penerima	12	Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas	Ada tindakan manipulatif/penggelapan dana oleh kelompok penerima	Kerugian aset negara/pemerintah

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat kematian bibit mangrove pasca penanaman cukup tinggi dikarenakan lingkungan penanaman yang kotor, kriteria lokasi/sedimen kurang sesuai, pemeliharaan bibit tidak maksimal sebelum penanaman	12	1. Ka. Sie Konservasi, Rehabilitasi dan Perizinan 2. Ka. Cabang Dinas Kelautan dan Wilayah Barat	Musim saat penanaman yang tidak mendukung, lahan tidak cocok	Bibit Mangrove tidak tumbuh/mati, bibit hilang karena ombak
Keselamatan petugas pada saat penenggelaman Terumbu Karang Buatan (TKB)	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	TKB Berat dan gelombang laut yang tinggi	Kecelakaan Kerja (Luka/ Kematian)
Meningkatnya pelanggaran kegiatan perikanan tangkap terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	12	1. Ka. Sie Pengawasan 2. Ka. Cabang Dinas Kelautan dan Wilayah Barat	Kurangnya kepedulian nelayan terkait pentingnya pengurusan dokumen kapal dan penggunaan peralatan tangkap yang ramah lingkungan	Banyak ditemukan pelanggaran dokumen kapal, rusaknya lingkungan karena pemakaian peralatan tidak ramah lingkungan
Keselamatan Petugas Pengawasan	12	1. Ka. Sie Pengawasan 2. Ka. Cabang Dinas Kelautan dan Wilayah Barat	Kondisi kapal tidak terawat, cuaca buruk, kurang keahlian personil ABK	Mesin kapal rusak saat di laut, kecelakaan saat di laut
Rendahnya intensitas patroli pengawasan SDKP dengan speedboat	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Rendahnya intensitas patroli pengawasan SDKP dengan speedboat	Banyak pelaku usaha dan kapal perikanan yang beroperasi tidak diperiksa

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak terpenuhinya pembayaran tarif listrik	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Kenaikan tarif listrik yang tidak bisa diprediksi	Tidak dapat dilakukan pembayaran listrik
Penanaman Mangrove yang ditanam pada lokasi yang telah ditentukan mengalami kerusakan, kematian, atau hilang terkena ombak	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Kondisi cuaca dipesisir pantura yang ekstrem	Tingkat kelulus hidupan mangrove yang ditanam sangat rendah
Penanaman Mangrove yang ditanam pada lokasi yang telah ditentukan mengalami kerusakan, kematian, atau hilang terkena ombak	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Kondisi cuaca dipesisir pantura yang ekstrem	Tingkat kelulus hidupan mangrove yang ditanam sangat rendah
Tidak terpenuhinya penilaian EVIKA	12	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Kurangnya pemahaman pengelola dalam mengelola kawasan konservasi	Terjadi penurunan nilai EVIKA
Biota target di kawasan konservasi mengalami <u>penurunan</u>	12	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kawasan <u>konservasi</u>	Sumber Daya Ikan di sekitar Kawasan Konservasi <u>berkurang</u>

Tabel 4
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan	Menurunnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	16	Semakin jauhnya wilayah tangkapan ikan, adanya hama penyakit ikan, cuaca buruk dan tingginya biaya operasi/produksi	Menurunnya pasokan ikan di masyarakat	Pembuatan TKB, pengawasan penggunaan alat tangkap, monitoring hama penyakit ikan dan hibah/bantuan kepada nelayan dan pembudidaya ikan	Kepala OPD	1 tahun
Meningkatnya Produksi Garam	Produksi garam	Tingginya curah hujan dan proses produksi tradisional	16	Petambak garam tidak dapat berproduksi sepanjang tahun	Produktifitas petambak garam rendah	Penggunaan teknologi dalam produksi garam dan bantuan/hibah kepada petambak garam	Kepala Dinas	1 tahun
Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan	Masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya konsumsi ikan	12	Rendahnya konsumsi ikan masyarakat	kekurangan gizi pada masyarakat	Kampanye gemar makan ikan di masyarakat	Kepala Dinas	1 tahun
Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Penurunan SDI dan cuaca buruk	12	Produksi perikanan tangkap menurun	Kesejahteraan nelayan rendah	Pembuatan TKB, pengawasan penggunaan alat tangkap dan hibah/bantuan kepada nelayan	Kepala Dinas	1 tahun

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Terjadinya serangan hama penyakit ikan, cuaca buruk dan tingginya biaya produksi	12	Rendahnya volume produksi perikanan budidaya	Kesejahteraan pembudidaya ikan rendah	Monitoring hama penyakit ikan dan bantuan/hibah kepada pembudidaya ikan	Kepala Dinas	1 tahun
Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Bertanggungjawab, Berkelanjutan dan Partisipatif	Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNR)I yang dipantau dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	Masih adanya IUU dan kegiatan masyarakat yang merusak SDKP	16	Kurangnya patroli pengawasan SDKP	Rusaknya SDKP di Jawa Tengah	Sosialisasi kepada masyarakat dan peningkatan operasi pengawasan SDKP	Kepala Dinas	1 tahun
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Personil OPD tidak mempunyai orientasi pelayanan	9	Pelayanan lambat	Buruknya tingkat pelayanan kepada masyarakat	Rapat evaluasi dan pengendalian kegiatan setiap bulan	Kepala Dinas	1 tahun
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Kurang pemahaman identifikasi risiko	9	Kurangnya sosialisasi SPIP	Risiko tidak teridentifikasi	Pertemuan dan pembinaan SPIP setiap tahun, penilaian maturitas SPIP	Kepala Dinas	1 tahun